

Membina Kemitraan Mendukung Pertumbuhan Berkualitas

## Membina Kemitraan Mendukung Pertumbuhan Berkualitas



LAPORAN TAHUNAN 2013

## Membina Kemitraan Mendukung Pertumbuhan Berkualitas

Sebagaimana yang tersirat dalam gambar cover, kemitraan yang dibangun BCA Syariah adalah kemitraan yang mengutamakan masyarakat banyak. Kemitraan ini dibangun tidak sekedar untuk kepentingan bisnis namun juga didasari niat tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan mendorong pertumbuhan usaha kecil yang berkualitas.



## Visi, Misi & Tata Nilai

### Visi

Menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan Masyarakat

### Misi

Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.

Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah perorangan, mikro kecil dan menengah.

## Daftar Isi

### **bab. 01**

#### Pendahuluan

- 01 Visi & Misi
- 04 Ikhtisar Data Keuangan
- 08 Laporan Presiden Komisaris
- 10 Laporan Presiden Direktur
- 14 Laporan Ketua Dewan Pengawas Syariah

### **bab. 02**

#### Tinjauan Bisnis

- 18 Tinjauan Bisnis



### **bab. 03**

#### Pendukung Bisnis

- 26 Manajemen Risiko
- 31 Pengembangan SDM
- 33 Teknologi Informasi

### **bab. 04**

#### Tinjauan Tata Kelola Perusahaan

- 38 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 39 Laporan Pelaksanaan GCG

### **bab. 05**

#### Tinjauan Keuangan



### **bab. 06**

#### Data Perusahaan

- 70 Struktur Organisasi
- 72 Profil Dewan Komisaris
- 74 Profil Direksi
- 76 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 78 Profil Komite Audit
- 80 Profil Komite Pemantau Risiko
- 82 Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi
- 84 Dewan Komisaris, Dewan Direksi & Dewan Pengawas Syariah
- 86 Peristiwa Penting
- 88 Informasi Pemegang Saham
- 88 Informasi Kepemilikan Saham
- 89 Produk dan Layanan
- 90 Kantor Cabang
- 95 Laporan Keuangan

bab.  
**01**

# Pendahuluan

01 Visi & Misi

04 Ikhtisar Data Keuangan

08 Laporan Presiden Komisaris

10 Laporan Presiden Direktur

14 Laporan Ketua Dewan Pengawas Syariah



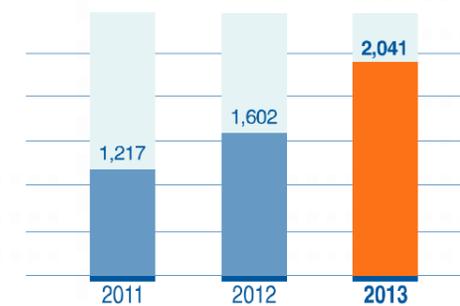
Pada tahun 2013, BCA Syariah mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan industri perbankan syariah pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa BCA Syariah telah menerapkan strategi bisnis yang tepat di tengah lesunya perekonomian Indonesia.

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

	2013	2012	2011
<b>Neraca</b> <i>(dalam miliar Rupiah)</i>			
Total Assets / Total Aktiva	2,041.4	1,602.2	1,217.1
Total Earning Assets / Total Aktiva Produktif	1,933.0	1,523.6	1,151.2
Demand Deposits with Bank Indonesia / Giro Pada Bank Indonesia	81.4	58.8	39.9
Sharia Deposit Facility / FASBIS	252.7	258.0	237.8
Financing / Pembiayaan	1,421.6	1,007.7	680.9
Securities / Surat-surat Berharga	107.1	206.9	227.6
Third Parties Funds / Dana Pihak Ketiga	1,703.0	1,261.8	864.1
Demand / Giro	144.4	143.2	106.1
Saving / Tabungan	149.5	133.0	80.3
Deposits / Deposito	1,409.1	985.5	677.7
Fund Borrowings / Pinjaman yang Diterima	1.0	0.1	0.5
Equity / Ekuitas	313.5	304.4	311.4
<b>Laba Rugi</b> <i>(dalam miliar Rupiah)</i>			
Net Revenue Sharing / Pendapatan Bagi Hasil Bersih	80.6	66.6	58.0
Revenue Sharing / Pendapatan Bagi Hasil	80.6	66.6	57.0
Other Operating Revenue / Pendapatan Operasional Lainnya	6.1	7.5	4.1
Other Operating Expenses / Beban Operasional Lainnya	63.5	62.1	48.8
Allowance for Losses on Other Assets / Penyisihan Penghapusan Aktiva Lainnya	6.5	1.5	3.3
Income From Operations / Laba Operasional	16.7	10.5	9.0
Income Before Tax / Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.8	11.0	9.0
Net Income / Laba Bersih	12.7	8.4	6.8
<b>Rasio Keuangan</b>			
Return On Assets (ROA)	1.0%	0.8%	0.9%
Return On Equity (ROE)	4.3%	2.8%	2.3%
Net Core Operating Margin (NCOM)	7.7%	9.6%	11.3%
Capital Adequacy Ratio / Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	22.4%	31.5%	45.9%
Financing Deposit Ratio / Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	83.5%	79.9%	78.8%
Non Performing Financing / Rasio NPF terhadap Total Pembiayaan	0.1%	0.1%	0.2%

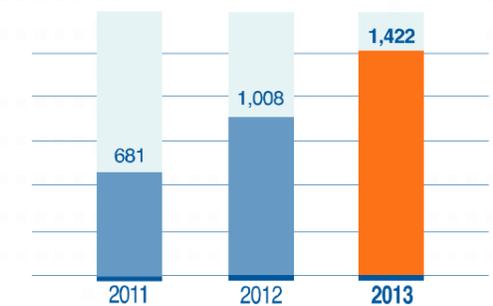
### Total Aktiva

*(dalam miliar rupiah)*



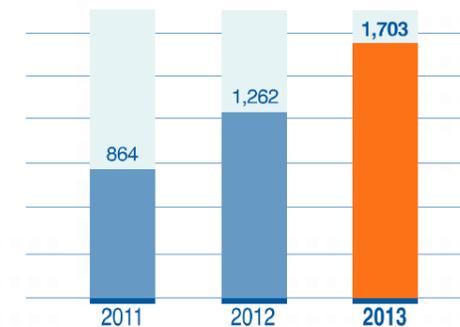
### Pembiayaan

*(dalam miliar rupiah)*



### Dana Pihak Ketiga

*(dalam miliar rupiah)*



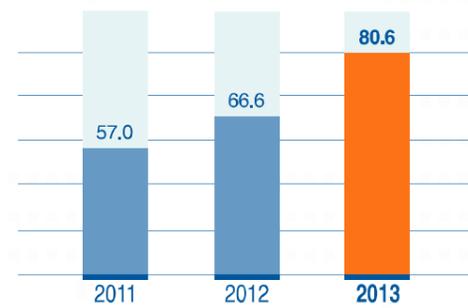
### Ekuitas

*(dalam miliar rupiah)*



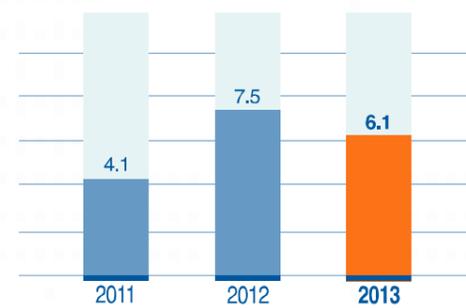
■ **Pendapatan Bagi Hasil**

(dalam miliar rupiah)



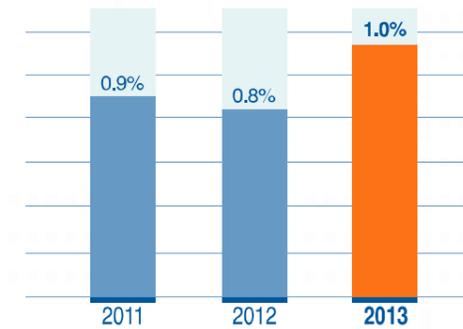
■ **Pendapatan Operasional Lainnya**

(dalam miliar rupiah)



■ **Return On Assets (ROA)**

(%)



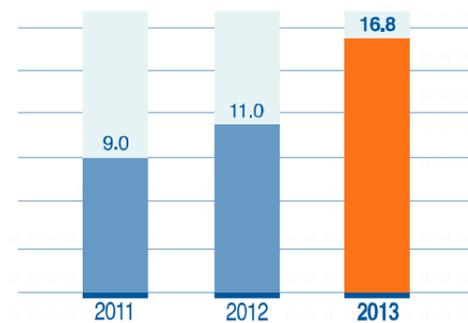
■ **Return On Equity (ROE)**

(%)



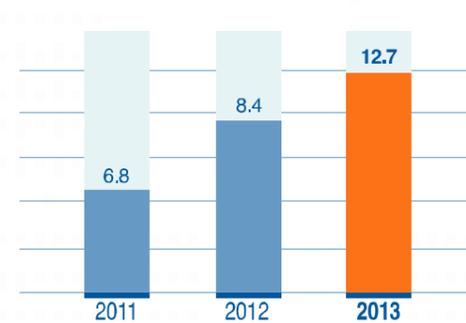
■ **Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

(dalam miliar rupiah)



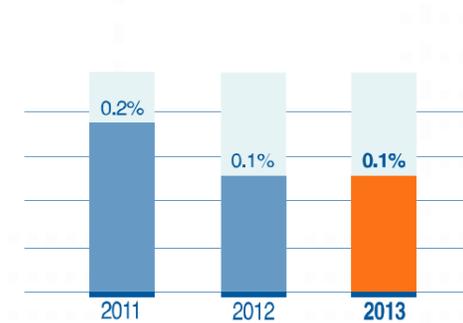
■ **Laba Bersih**

(dalam miliar rupiah)



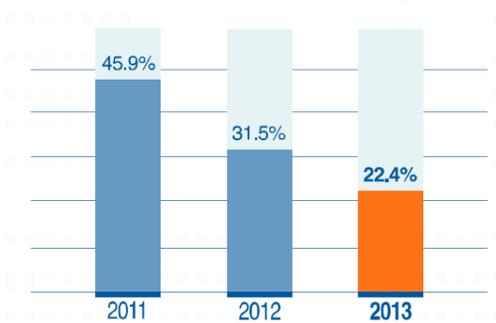
■ **Non Performing Financing (NPF)**

(%)



■ **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

(%)





Presiden Komisaris  
**Iwan Kusumobagio**

## Laporan Presiden Komisaris

...di usianya yang ketiga,  
BCA Syariah mampu menunjukkan perkembangan  
yang menggembirakan dengan berhasil  
melampaui Rencana Bisnis Bank.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh*

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan segala aktivitas dalam rangka mencari ridho-Nya.

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Di tahun 2013, ditengah ketidakpastian perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia, BCAS tetap mampu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan berhasil melampaui Rencana Bisnis Bank. Kami percaya bahwa dengan bermodalkan kerja keras, kerja sama dan kompetensi yang dimiliki segenap karyawan BCAS, serta dengan ijin Allah SWT segala rintangan dan kesulitan yang ada dapat kita lalui dengan baik.

Dalam menjalankan strategi bisnis, Bank telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan melaksanakan tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur (*Good Corporate Governance, Compliance, dan Risk Management*) seperti yang tertuang dalam persyaratan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

### Pengawasan Dewan Komisaris

Landasan dasar pengawasan yang digunakan oleh Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sudah disampaikan oleh Direksi ke Bank Indonesia. Pengawasan Dewan Komisaris memfokuskan pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan atas kegiatan operasional yang bersifat finansial maupun non finansial, dapat kami sampaikan bahwa Direksi BCAS telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja BCAS menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan rencana bisnisnya.

1. Total Aset yang dicapai BCAS pada akhir tahun 2013 sebesar Rp2.014,4 miliar, tumbuh 27,4% dari posisi akhir tahun 2012.
2. Realisasi pembiayaan yang disalurkan sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp1.421,6 miliar, tumbuh 41,1% dari posisi akhir tahun 2012.
3. Pertumbuhan Dana Pihak III (DPK) tahun 2013 sebesar 35,0% menjadi Rp1.703,1 miliar.
4. Perolehan laba sebelum pajak berhasil dibukukan pada akhir tahun 2013 sebesar 16,8 miliar atau tumbuh 52,9% dibandingkan posisi akhir tahun 2012.

### Good Corporate Governance dan Risk Management

Kunci utama keberhasilan dan kelangsungan pengembangan usaha terletak pada praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*). Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran perusahaan terus berupaya dalam membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem, dan perangkat yang ada.

Secara berkala BCAS melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang menyangkut 11 aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Dan sesuai hasil *self assessment* PT BCAS terhadap pelaksanaan GCG di BCAS selama periode tahun 2013 tercatat berpredikat "Baik". Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui pertemuan rutin antara Komisaris, pertemuan dengan komite sesuai bidang yang menjadi pokok bahasan, pertemuan gabungan dengan

Direksi, dan juga pertemuan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2013 Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan potensi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Sedangkan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan prinsip Syariah di dalam operasional BCAS, sesuai hasil koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan konsultasi, diskusi, dan uji petik sehingga semua produk dan layanan yang dikeluarkan oleh BCAS telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah melalui penerbitan opini.

### Rencana di Masa yang Akan Datang

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, dan sejalan dengan itu demikian juga halnya dengan kinerja perbankan syariah. Tingginya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* kepada perbankan syariah membawa konsekuensi perlunya terus dilakukan peningkatan kualitas kinerja, layanan, dan pengawasan agar semakin baik. Dalam usaha menyelaraskan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris akan terus berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Konsisten untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS dan memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan prinsip-prinsip perbankan Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lainnya.

Selain itu, Dewan Komisaris juga akan terus memberikan perhatian lebih pada perumusan strategi pertumbuhan yang berkualitas dan langkah optimalisasi operasional Bank, utamanya untuk :

1. Mempertahankan dan meningkatkan bisnis yang sudah dijalankan.
2. Menambah jumlah jaringan melalui Kantor Cabang, KCP BUR dan Unit Layanan Syariah.
3. Pembangunan sarana dan prasarana serta konsolidasi manajemen risiko dan infrastruktur pendukung lainnya.
4. Persiapan untuk pertumbuhan yang dinamis.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, dan semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, agar BCAS semakin maju dan jaya di tahun yang akan datang, Amin.

*Wabillahit Taufiq Wal Hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh*

Presiden Komisaris

**Iwan Kusumobagio**



Presiden Direktur  
**Yana Rosiana**

## Laporan Presiden Direktur

BCA Syariah terus memperkuat pondasi bisnis, dengan memperluas jaringan kantor diantaranya dengan melakukan pendirian Unit Layanan Syariah di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dan terus memperbaiki proyek bisnis UMKM "Bina Usaha Rakyat".

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melewati tahun 2013 dengan hasil sesuai yang diharapkan. Berkat kerja keras yang dilandasi keikhlasan dalam mewujudkan harapan bersama, *Alhamdulillah*, target bisnis BCAS tahun 2013 dapat dicapai dengan baik ditengah kondisi perekonomian Indonesia maupun kondisi perekonomian dunia yang masih belum pulih dan stabil. Pada tahun 2013, BCAS terus memperkuat pondasi bisnis dengan memperluas jaringan kantor diantaranya dengan melakukan pendirian Unit Layanan Syariah di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dan terus memperbaiki proyek bisnis UMKM "Bina Usaha Rakyat". Hal ini merupakan bagian dari kelanjutan transformasi untuk menciptakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang sehingga tercapai visi dan misi perusahaan.

### Kondisi Makro Ekonomi

Tahun 2013 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global yang tidak berjalan sesuai dengan harapan ditandai oleh ketidakpastian kinerja perekonomian di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2013 masih menghadapi risiko terkait kebijakan pengurangan stimulus *The Fed (tapering)*, perdebatan *debt ceiling* dan penghentian sementara layanan pemerintah AS (*government shutdown*). Disamping itu, perekonomian Eropa juga masih menyimpan risiko ketidakpastian yang tinggi terkait lambatnya implementasi pengurangan belanja pemerintah (*austerity program*) di beberapa negara.

Menurunnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi global tidak dapat dihindari akan memberikan tekanan kepada ekonomi Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial. Untuk kinerja pasar keuangan, permasalahan struktural ditandai oleh pasar keuangan Indonesia yang didominasi oleh dana asing.

Kerentanan di sektor keuangan muncul ketika terjadi aliran masuk likuiditas global dengan deras ke dalam perekonomian domestik, sejalan dengan kebijakan stimulus moneter di negara maju. Kepemilikan asing pada surat berharga negara meningkat cepat menjadi sekitar 31,0% pada akhir tahun 2012 dibandingkan dengan 18,0% pada tahun 2009. Likuiditas yang melimpah ini mendorong penurunan suku bunga yang pada gilirannya mendorong kredit dan kenaikan harga aset. Tingginya kepemilikan asing di dalam pasar keuangan yang masih tipis menyebabkan tingginya *volatilitas* harga ketika terjadi pergerakan dana asing. Kenaikan pertumbuhan kredit yang ditopang oleh peningkatan harga aset sebagai kolateral juga berpotensi menimbulkan risiko di sektor perbankan.

### Perkembangan Perbankan Indonesia di Tahun 2013

Upaya perbankan untuk mempertahankan kinerja positif selama tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gejala perekonomian global yang masih berlanjut serta upaya pemulihan yang berjalan lambat berdampak terhadap kinerja perekonomian domestik. Meskipun demikian, perbankan nasional masih mampu mempertahankan kinerja positif, yang antara lain dapat dilihat dari aspek kelembagaan, fungsi intermediasi, profitabilitas, struktur permodalan, dan pendanaan. Dari sisi permodalan perbankan domestik, rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) tercatat jauh di atas batas minimum 8,0% yaitu sebesar 18,1% per Desember 2013. Dengan struktur modal yang didominasi oleh modal inti, diharapkan ketahanan perbankan dapat menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha atau perubahan lingkungan bisnis bank. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) *gross* juga masih cukup baik sebesar 1,8% per Desember 2013 atau merupakan rasio NPL terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit industri perbankan juga masih cukup baik pada 2013. Per Desember 2013, DPK

mengalami pertumbuhan sebesar 13,6% (YoY) menjadi Rp3.563,4 triliun. Walaupun demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada akhir tahun 2012 sebesar 15,8% (YoY). Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian juga terus meningkat, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 21,8% (YoY) per Desember 2013 menjadi Rp3.319,8 triliun dengan pertumbuhan kredit investasi sebesar 35,0% (YoY) dan kredit modal kerja sebesar 20,4% (YoY) serta kredit konsumsi sebesar 13,7% (YoY).

### Perkembangan Perbankan Syariah di Tahun 2013

Perbankan Syariah selama tahun 2013 mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya walaupun secara prosentase tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Aset perbankan syariah di tahun 2013 tumbuh Rp38,1 triliun atau tumbuh 19,5% (YoY) dari Rp195,0 triliun di tahun 2012 menjadi Rp233,1 triliun di tahun 2013. Dengan pertumbuhan aset tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat dari 4,6% di tahun 2012 menjadi 4,7% di tahun 2013. DPK perbankan syariah tahun 2013 naik sebesar Rp28,8 triliun atau 19,5% (YoY), dari Rp147,5 triliun menjadi Rp176,3 triliun di tahun 2013. Pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan DPK pada tahun 2012 sebelumnya yaitu sebesar 27,8% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap perbankan umum di tahun 2013 adalah 4,8%, naik 0,2% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di tahun 2013 sebesar 22,6% (YoY), lebih rendah dari pertumbuhan pembiayaan di tahun 2012 yaitu sebesar 43,7%. Sementara itu rasio *Non Performing Financing (NPF)* pada tahun 2013 naik dari 2,3% di tahun sebelumnya menjadi 3,0% pada 2013.

### Kinerja Bank BCAS

Alhamdulillah BCAS selama tahun 2013 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan Syariah secara keseluruhan. *Total asset* BCAS tercatat sebesar Rp2.041,4 miliar meningkat 27,4% atau Rp439,2 miliar dibandingkan tahun 2012, penghimpunan DPK sebesar Rp1.703,1 miliar tumbuh 35,0% atau Rp441,2 miliar dibanding tahun 2012. Pembiayaan pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.421,6 miliar, meningkat sebesar 41,1% atau Rp414,0 miliar dibanding tahun 2012. Dari sisi kualitas pembiayaan, *NPF gross* BCAS pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar 0,1% dengan *NPF net* pada angka 0,0%.

### Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor kunci dalam mencapai terwujudnya perkembangan usaha. Sasaran pengembangan SDM difokuskan pada pemenuhan SDM pada kegiatan bisnis dan *frontliner* bank, dan peningkatan kualitas SDM secara aktif untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dengan penetapan sasaran tersebut disertai mulai terbentuknya budaya kerja oleh seluruh karyawan dan manajemen dengan diterapkannya tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara konsisten maka akan mendukung BCAS dalam mencapai Visi dan Misi perusahaan.

**Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG)**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable values*. Aktualisasi Tata Kelola Perusahaan sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal berupa pelaksanaan *Self-Assessment* secara berkala.

Kami percaya bahwa praktek Tata Kelola Perusahaan adalah pendukung utama terciptanya pertumbuhan yang berkesinambungan di BCAS, tidak hanya dengan mematuhi peraturan yang ada, namun juga didukung oleh komitmen, struktur, dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan dengan mengedepankan mekanisme *check and balances* sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ dapat dijalankan secara efektif.

**Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)**

BCAS senantiasa menjaga kesinambungan komitmen untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana bank berada. Selama tahun 2013, BCAS telah menjalankan berbagai program *corporate social responsibility (CSR)* terkait pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, antara lain:

**I. Bidang Kesehatan :**

Pemberian bantuan dana CSR dalam bidang kesehatan adalah sebagai upaya meringankan penderitaan dan mendukung peningkatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat lingkungan terdekat setelah terkena musibah. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya adalah memberikan bantuan kepada warga RW 02 Kelurahan Kampung Melayu yang terkena musibah banjir dalam bentuk pemberian obat-obatan, bahan makanan & minuman.

**II. Bidang Sosial :**

Sebagai bentuk kepedulian BCAS terhadap kesejahteraan masyarakat lingkungan terdekatnya, terutama menjelang Hari Keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri 1434 H dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2013, BCAS mencoba berbagi kebahagiaan melalui acara :

- Pemberian santunan, bingkisan, dan bantuan dana kepada:
  - Anak Yatim dari Panti Asuhan Yatim Muslimin Jaya, dan mesjid Al-Ikhlas Duta Indah Pondok Gede.
  - Pegawai harian lepas (PHL) dari Kelurahan Balimester.
- Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha Tahun 2013 kepada :
  - Kelurahan Balimester.
  - Mesjid Jami' Al Ihsaniyah Jatinegara.
- Ikut serta berpartisipasi dalam Program Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (Acara IB Vaganza) untuk penyaluran dana CSR.

**III. Bidang Pendidikan :**

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan dalam

**BCA Syariah senantiasa menjaga kesinambungan komitmen untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana bank berada.**

melahirkan SDM yang memadai dan handal. Faktor ketersediaan sarana dan prasarannya juga menjadi syarat mutlak berikutnya yang harus diperhatikan. Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap cita-cita tersebut, BCAS melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- Pemberian Bantuan kepada Pondok Pesantren "Darul Hidayah" di Kampung Pabuaran Dukuh Sirna Asih, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, untuk pengembangan Pondok Pesantren.
- Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah "Al-Tsaniyyah" di Jalan Puspitex Raya Gang H. Djaman RT 03/RW 05, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Banten) untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan seperti komputer, meja, dan kursi sekolah.

**Penghargaan 2013**

Alhamdulillah, selama tahun 2013 BCAS telah memperoleh 14 penghargaan di berbagai kategori, antara lain :

- The Best of Indonesia Service to Care Champion*, yang diselenggarakan oleh MarkPlus.
- Indonesian Bank Loyalty Champion*, yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight & Infobank.
- Brand Champion of Brand Equity*, yang diselenggarakan oleh MarkPlus.
- Exceptional Service Performance*, diselenggarakan oleh *Carre & Service Excellence*.
- The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank*, diselenggarakan oleh Karim *Business Consulting*.
- 1st Best ATM*, yang diselenggarakan oleh MRI & Infobank.
- 1st Best Satpam*, yang diselenggarakan oleh MRI & Infobank.
- 3rd Best Customer Service*, yang diselenggarakan oleh MRI & Infobank.
- 3rd Best Overall Performance*, yang diselenggarakan oleh MRI & Infobank.
- 3rd Best Phone Handling*, yang diselenggarakan oleh MRI & Infobank.
- InfoBank Awards 2013* dengan Predikat "Sangat Bagus", yang diselenggarakan oleh Infobank.
- 3rd Best Information Technology*, yang diselenggarakan oleh *Economic Review & Perbanas Institute*.
- InfoBank Sharia Finance Awards 2013* dengan Predikat "Sangat Bagus", yang diselenggarakan oleh Infobank.
- IT Banking Excellence Award*, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

**Strategi 2014**

Menghadapi tantangan bisnis yang ada di tahun 2014 seperti masih berlangsungnya ketidakpastian perekonomian global serta semakin ketatnya persaingan perbankan Indonesia, BCAS telah menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2014 yang selaras dengan Visi dan Misi BCAS, antara lain :

- Strategi pengembangan *delivery channels*
  - Menambah kantor cabang utama di Solo dan Yogyakarta guna memperluas jangkauan bisnis.
  - Melakukan penambahan Unit Layanan Syariah di Jakarta dan Jawa Barat sebagai strategi dalam meningkatkan dana pihak ketiga.
  - Melakukan pengembangan bisnis UMKM melalui penambahan jaringan kantor fungsional di wilayah Jabotabek.
  - Melakukan pengembangan di bidang informasi dan teknologi dengan melakukan *review* terhadap *core banking system*, membuat aplikasi-aplikasi penunjang *core banking system* guna mendukung proses bisnis dan penambahan fitur transaksi bagi nasabah dengan membangun *electronic channel*.
- Strategi pengembangan bisnis baru
  - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses, kebijakan, fitur produk serta strategi terhadap bisnis UMKM.
  - Mengimplementasikan produk murabahah emas melalui berbagai *alternative channel*.
- Meningkatkan sinergi dengan PT BCA Tbk dalam beberapa hal, antara lain :
  - Meningkatkan kerjasama dalam bidang penggunaan fasilitas *BCA Contact Centre* (Halo BCA) diantaranya dengan informasi produk baru dan inisiatif baru bisnis lainnya.
  - Meningkatkan sinergi dalam *Compliance & Risk Management*, Audit dan pengembangan SDM.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia, infrastruktur serta sarana penunjang lainnya.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan menerapkan manajemen risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional yang *prudent* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pertumbuhan BCAS yang berkesinambungan dengan prinsip kehati-hatian maka di dalam implementasinya BCAS menitikberatkan pada hal-hal pokok sebagai berikut:

- Memastikan berjalannya prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yang meliputi azas : Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran;
- Memastikan berjalannya Manajemen Risiko, termasuk penerapan Basel II;
- Memastikan berjalannya prinsip Mengenal Nasabah (APU & PPT) sesuai dengan ketentuan Perbankan, Peraturan Pemerintah, dan Prinsip Syariah;
- Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras dengan kebutuhan dunia jasa Perbankan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan yang terjamin.

**Apresiasi**

Akhirnya perkenankan saya atas nama Direksi BCAS menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada segenap nasabah, karyawan, pemegang saham, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberadaan BCAS. Dengan semangat, komitmen dan kerja sama, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka Insya Allah BCAS dapat terus berkiprah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita bersama untuk membangun BCAS yang berkualitas dan menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

*Wabillahit Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Presiden Direktur



Yana Rosiana



Ketua Dewan Pengawas Syariah  
**Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.**

## Laporan Ketua Dewan Pengawas Syariah

BCA Syariah memasuki tahun ketiga dalam operasinya. Banyak kemajuan dan perkembangan yang positif yang berhasil dicapai.

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan nikmat Nya sehingga BCAS memasuki tahun ketiga dalam operasinya. Banyak kemajuan dan perkembangan yang positif yang berhasil dicapai. Berdasarkan Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2013, dapat dilihat beberapa indikator yang menunjukkan adanya pertumbuhan diantaranya jumlah Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) yang meningkat, terjadinya pertumbuhan *asset* yang signifikan, dan berkembangnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerjasama dari seluruh pihak di BCAS dan kemudian ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja BCAS. Amanah yang diberikan oleh masyarakat dan nasabah, sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Untuk memperkuat dan mempertahankan agar amanah dapat dijalankan dengan baik, terutama kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan Prinsip Syariah di dalam setiap kegiatan operasional BCAS, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengawasi dan memastikan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah didalam kegiatannya.

Di dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan, dalam rangka tetap menjaga, memenuhi, dan mematuhi pelaksanaan Prinsip Syariah di dalam kegiatan operasional perbankan BCAS, DPS menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Lebih lanjut diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, secara konsisten tetap terjaga.

Pada akhirnya kami berharap dan berdoa, semoga usaha untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas, akan selalu mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT.

*Wabillahittaufiq Wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua Dewan Pengawas Syariah

**Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.**

bab.  
**02**

# Tinjauan Bisnis

18 Tinjauan Bisnis



Untuk dapat memenuhi permintaan nasabah yang terus meningkat dan untuk memperluas cakupan layanan, BCA Syariah secara konsisten terus melakukan ekspansi jaringan.

Langkah ini didukung pula dengan upaya menumbuhkan dana pihak ketiga dan peningkatan kualitas portfolio pembiayaan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan pertumbuhan usaha di masa depan.

## Tinjauan Bisnis

Gejolak makro ekonomi dunia berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia, peningkatan BI *rate* menyebabkan likuiditas semakin ketat dan mahal, sehingga seluruh pelaku industri perbankan harus jeli memilih strategi dalam mengelola keuangan untuk mempertahankan pertumbuhan yang baik. *Market share* perbankan syariah mencapai 4,7% dimana total aset mengalami peningkatan sebesar 19,5% pada akhir tahun 2013 menjadi Rp233,1 triliun atau mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi likuiditas perbankan syariah juga mendapatkan tekanan sehingga rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* semakin meningkat menjadi 102,6% pada Desember 2013. Sementara kualitas pembiayaan atau *Non Performing Financing (NPF)* mengalami peningkatan dari 2,3% pada Desember 2012 menjadi 3,0% pada Desember 2013. Namun demikian dengan kebijakan pengelolaan yang baik, BCA Syariah secara konsisten tetap dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkualitas.



Sepanjang tahun 2013, BCAS tetap konsisten dalam melakukan perluasan jaringan. Hal ini merupakan upaya untuk memenuhi permintaan nasabah serta melayani nasabah dengan lebih luas. Pada tahun 2013, perluasan jaringan dilakukan dengan membuka Unit Layanan Syariah (ULS) yaitu di wilayah Bekasi, Sidoarjo, Gresik dan Semarang. Lokasi-lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan adanya potensi bisnis perbankan syariah dan kebutuhan masyarakat atas produk dan layanan syariah.

### Jumlah Jaringan Cabang (Unit)

	Desember 2012	Desember 2013
Kantor Cabang (KC)	6	6
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	6	6
Kantor Kas / Unit Layanan Syariah (ULS)	18	22
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>34</b>

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kondisi makro ekonomi yang terjadi pada tahun 2013 terutama dengan kenaikan BI *rate* pada semester kedua, memicu para pelaku perbankan untuk memilih kebijakan meningkatkan imbal hasil deposito guna mempertahankan likuiditas. Sepanjang tahun 2013, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh para pelaku perbankan syariah mampu membukukan pertumbuhan dana secara industri pada angka Rp176,3 triliun pada akhir tahun 2013 atau meningkat 19,5% dari periode tahun 2012 yaitu sebesar Rp147,5 triliun.

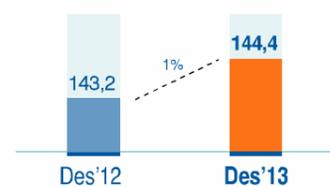
Di tengah kondisi ketatnya likuiditas, portofolio dana pihak ketiga BCAS mampu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri.

Pertumbuhan dana pihak ketiga selama tahun 2013 tercatat pada angka 35,0% dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,7 triliun dengan rasio FDR terjaga pada 83,5% pada akhir Desember 2013. Peningkatan dana pihak ketiga terjadi pada produk tabungan dari Rp133 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp149,5 miliar pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 12,0%. Peningkatan terbesar terjadi pada produk deposito yang tumbuh 43,0% dari Rp985,5 miliar di akhir Desember 2012 menjadi Rp1,4 triliun pada akhir tahun 2013. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini menjadi hal yang penting karena struktur dana yang kuat diperlukan untuk mendukung ekspansi bisnis BCAS yang semakin pesat.

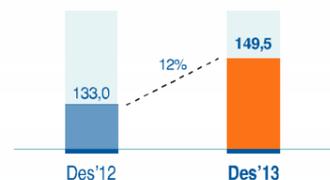
### Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Produk

(dalam miliar Rupiah)

#### ■ Giro



#### ■ Tabungan



#### ■ Deposito



Dalam rangka mencapai pertumbuhan DPK tersebut di atas, sepanjang tahun 2013, berbagai aktivitas pemasaran telah dilakukan, antara lain melalui kegiatan pameran di berbagai kota untuk menjangkau nasabah-nasabah baru dan *loyalty program* bagi nasabah *existing*. Strategi pemasaran yang dilaksanakan turut berperan dalam peningkatan *customer base* khususnya produk giro dan tabungan (CASA). *Number of account (NOA)* CASA menempati porsi yang dominan terhadap DPK secara keseluruhan dengan jumlah 28.240 NOA atau 93,0% dari NOA DPK.

Selain kegiatan pameran dan *loyalty program*, BCAS aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah baik kepada nasabah BCA maupun masyarakat pada umumnya. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk dan layanan. BCAS dari waktu ke waktu berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan *experience* yang baik bagi nasabah.

### Jumlah Account Dana Pihak Ketiga

(dalam ribuan)

#### ■ Dana Pihak Ketiga



### Penyaluran Pembiayaan

Kehadiran industri perbankan syariah memiliki peranan yang cukup besar dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditunjukkan dengan FDR perbankan syariah mencapai 102,6%. Walaupun penyaluran pembiayaan perbankan syariah secara industri tumbuh 22,6% dari Rp147,5 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp180,8 triliun pada akhir tahun 2013 namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2013, kinerja penyaluran pembiayaan semakin membaik dan mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari portofolio pembiayaan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan industri. Pada tahun 2013 pembiayaan berada pada angka Rp1,4 triliun meningkat 41,0% dari Rp1,0 triliun pada akhir tahun 2012. Dalam menyalurkan pembiayaan BCAS secara konsisten menerapkan prinsip *prudent banking practice*, sehingga rasio NPF berhasil dipertahankan pada posisi 0,1% per Desember 2013.

### Pertumbuhan Pembiayaan

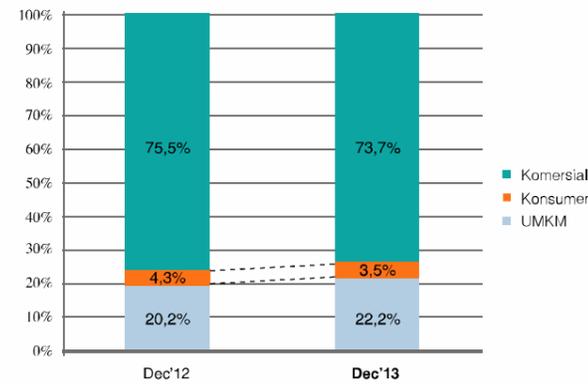
(dalam miliar Rupiah)

#### ■ Pembiayaan



Sepanjang tahun 2013, kinerja penyaluran pembiayaan BCAS semakin membaik dan mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari portofolio pembiayaan

yang tumbuh lebih cepat dibandingkan industri. Pada tahun 2013 pembiayaan berada pada angka Rp1,4 triliun meningkat 41,0% dari Rp1,0 triliun pada akhir tahun 2012. Dalam menyalurkan pembiayaan secara konsisten menerapkan prinsip *prudent banking practice*, sehingga rasio NPF berhasil dipertahankan pada posisi 0,1% per Desember 2013. Penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM mengalami peningkatan dari 20,2% pada tahun 2012 menjadi 22,8% pada akhir tahun 2013 atau sebesar Rp324,6 miliar, sementara penyaluran pembiayaan pada segmen komersial mencapai Rp1,0 triliun atau mengalami penurunan dari 75,5% menjadi 73,7 %.



Dalam penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM, BCAS mengembangkan usahanya antara lain melalui layanan Bina Usaha Rakyat (BUR). Layanan BUR adalah wujud nyata komitmen untuk mengembangkan segmen UMK melalui pola pembinaan terpadu. Dengan adanya BUR diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan untuk pengembangan usaha serta akses pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku UMK.

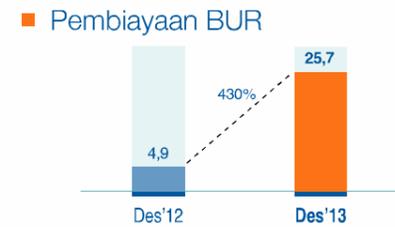
Sampai dengan akhir tahun 2013, BCAS telah mengoperasikan jumlah Kantor Layanan BUR menjadi 4 kantor layanan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya rencana penambahan jaringan kantor layanan BUR untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan bertransaksi kepada nasabah.

Layanan BUR menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah, yaitu proses cepat, persyaratan mudah dan margin yang kompetitif, sehingga kehadiran layanan BUR semakin diterima oleh masyarakat dan pertumbuhannya meningkat dengan pesat yaitu 430,0% dari Rp4,9 miliar pada akhir tahun 2012 menjadi Rp25,7 miliar pada akhir tahun 2013.

Dengan menerapkan pola pembinaan secara terpadu, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan baik yang tercermin dari *repayment rate* 100,0% pada akhir tahun 2013.

**Pertumbuhan Layanan Pembiayaan BUR**

(dalam miliar Rupiah)



Dalam rangka mengembangkan pembiayaan segmen konsumen, dan memenuhi kebutuhan nasabah untuk kepemilikan emas, maka pada tahun 2013 BCAS meluncurkan produk pembiayaan Emas BCAS iB (EMAS iB) yang hadir sebagai alternatif investasi bagi nasabah dengan aman, mudah dan angsuran ringan dalam bentuk logam mulia, dengan nominal pembiayaan mulai dari 4 juta sampai dengan 150 juta. Kami optimis dengan adanya produk dan layanan yang semakin lengkap akan memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

**Prestasi BCAS**

BCAS senantiasa memberikan perhatian penuh kepada kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Sepanjang tahun 2013, BCAS berhasil meraih 14 penghargaan dengan berbagai kategori, mulai dari kualitas layanan, loyalitas nasabah, kinerja keuangan hingga teknologi informasi.



*The Best of Indonesia Service to Care Champion - Service to Care Awards 2013 - Markplus*



*Indonesian Bank Loyalty Champion - Indonesian Bank Loyalty Award 2013 - MarkPlus Insight & Infobank*



*Brand Champion of Brand Equity - Indonesia Brand Champion 2013 - MarkPlus*



*The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank - Islamic Finance Award & Cup 2013 - Karim Business Consulting*



*1st Best ATM - Banking Service Excellence 2013 - MRI&Infobank*



*1st Best Satpam - Banking Service Excellence 2013 - MRI& Infobank*



*3rd Best Customer Service - Banking Service Excellence 2013- MRI&Infobank*



*3rd Best Overall Performance - Banking Service Excellence 2013- MRI&Infobank*



*3rd Best Phone Handling - Banking Service Excellence 2013 - MRI&Infobank*



*Predikat "Sangat Bagus" - Infobank Awards 2013 - Infobank*



*3rd Best Information Technology - Anugerah Perbankan Indonesia 2013 - Economic Review & Perbanas Institute*



Predikat "Sangat Bagus" - Infobank Sharia Finance Award 2013- Infobank



IT Banking Excellence Award - IT Banking Excellence Award 2013 - Warta Ekonomi

#### Melangkah ke Depan

Dalam mengembangkan usaha, ke depan BCAS akan melakukan ekspansi bisnis sesuai dengan tahapan rencana strategis untuk menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat dimana akan fokus kepada pengembangan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah serta membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah perorangan, mikro, kecil dan menengah.

Untuk menambah jangkauan layanan kepada nasabah, BCAS akan melakukan ekspansi jaringan di 3 kota besar yaitu Bandung, Solo dan Yogyakarta. Hal ini merupakan upaya untuk memperluas pangsa pasar yang sebelumnya hanya di wilayah Jabodetabek, Surabaya dan Semarang. Untuk memaksimalkan kualitas layanan, tidak hanya Kantor Cabang yang diperluas namun juga ULS karena ULS terbukti efektif dalam menjangkau *customer base* dan menghimpun dana masyarakat. Di tahun 2014, BCAS akan menambah jaringan ULS yang tersebar di beberapa wilayah yang potensial. Sebagai wujud komitmen dalam melayani segmen UMKM maka jaringan layanan BUR juga akan ditambah lagi sebanyak 8 kantor layanan fungsional sehingga total akan mencapai 15 jaringan kantor layanan BUR pada akhir tahun 2014.

Untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, selain menambah jaringan kantor BCAS juga akan melakukan *enhancement* pada produk yang sudah ada,

memperkaya *fitur electronic channel* pada ATM, menyediakan fasilitas transaksi yaitu *mobile banking*. Hal ini dimaksudkan agar BCAS dapat menjadi *one stop solution* bagi nasabah dan meningkatkan aktivitas transaksi nasabah.

Kerjasama pemasaran dengan Grup BCA akan terus dilakukan karena produk dan layanan BCAS hadir sebagai solusi dan pelengkap bagi produk dan layanan yang telah ada di Grup BCA lainnya. Aktivitas pemasaran melalui kegiatan-kegiatan *below the line* akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap *brand* BCAS, menghimpun dana nasabah serta meningkatkan *customer base*. BCAS juga akan berpartisipasi dalam program Gebyar Tahapan BCA.

Dengan strategi-strategi yang akan dilakukan, ke depan BCAS akan menjadi semakin dekat dengan nasabah dan mampu menghadirkan ragam produk, layanan dan fasilitas yang berkualitas dan terpercaya bagi nasabah.



selain menambah jaringan kantor  
BCA Syariah juga akan melakukan  
*enhancement* pada produk yang sudah ada,  
memperkaya *fitur electronic channel*  
pada ATM, menyediakan fasilitas transaksi  
*mobile banking*.  
agar BCA Syariah dapat menjadi *one stop*  
*solution* bagi Nasabah dan meningkatkan  
aktivitas transaksi Nasabah.

bab.  
**03**

# Pendukung Bisnis

26 Manajemen Risiko

31 Pengembangan SDM

33 Teknologi Informasi



BCA Syariah mampu mempertahankan laju pertumbuhan pembiayaan yang *relative* tinggi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan menjaga rasio penyediaan modal minimum dan rasio pembiayaan bermasalah pada tingkat yang disyaratkan, antara lain dengan penerapan manajemen risiko yang berhati-hati dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi secara terus menerus.

## Manajemen Risiko

### Penerapan Manajemen Risiko Secara Terpadu dan Proaktif untuk Mengelola Risiko dalam Bisnis Bank

Globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan integrasi pasar keuangan menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Dalam hal ini perbankan syariah tidak hanya menghadapi tantangan untuk menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah menjaga tingkat kepercayaan dan kredibilitas operasional kerjanya dalam rangka menciptakan kesinambungan dan pertumbuhan di masa yang akan datang.



Penerapan kerangka manajemen risiko dilakukan secara terpadu melalui organisasi yang terstruktur serta serangkaian prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Bank.

Struktur Manajemen Risiko BCAS memberikan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai untuk mengatasi risiko-risiko dalam bisnis perbankan. Secara periodik BCAS memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur, dan menyesuaikan batas toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha, serta menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis BCAS. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik dan menyeluruh, maka diharapkan Bank dapat terus berkembang dengan kinerja keuangan yang baik dan risiko yang terkendali.

#### Likuiditas, Kualitas Pembiayaan dan Kecukupan Modal

Posisi likuiditas yang memadai, kualitas pembiayaan yang terjaga dengan baik dan modal yang kuat merupakan faktor utama bagi BCAS untuk menciptakan kesinambungan dan pertumbuhan di masa yang akan datang.

Pada akhir tahun 2013, posisi likuiditas berada pada level yang memadai sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5,0% dan *Financing Deposit Ratio (FDR)* sebesar 83,5%.

Bank membukukan pertumbuhan pembiayaan yang signifikan pada tahun 2013 dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Kewaspadaan dalam mengamati kondisi perkembangan dunia usaha adalah faktor penting bagi BCAS dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan di tahun 2013. BCAS berhasil menjaga rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing - NPF*) pada tingkat yang rendah sebesar 0,1%.

Struktur permodalan yang kuat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkesinambungan maupun sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Pengelolaan modal (*capital management*) BCAS diselaraskan dengan rencana bisnis bank dimana BCAS menargetkan pertumbuhan aset dan pembiayaan yang berkesinambungan. Pada akhir tahun 2013 posisi kecukupan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) adalah sebesar 22,4%, diatas ketentuan minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu 8,0%.

BCAS terus mengembangkan pendekatan dalam mengelola risiko yang muncul dari berbagai ketidakpastian, dan secara berkala melakukan penyesuaian terhadap berbagai parameter risiko sebagai antisipasi terhadap dinamika bisnis dan kondisi ekonomi. BCAS telah mengembangkan beberapa skenario *stress test* untuk mengukur berbagai dampak dari peristiwa eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja BCA. Agar tetap relevan, skenario *stress test* ini disesuaikan secara berkala mengikuti perkembangan terkini termasuk berbagai skenario makro dan mikro.

#### Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan delapan jenis risiko yang melekat (*inherent*) dalam kegiatan usaha bank, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko hukum. Sedangkan untuk dua risiko tambahan yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi belum wajib untuk diperhitungkan dalam penilaian risiko Bank di tahun 2013.

Kerangka terpadu pengelolaan risiko BCAS didukung oleh penerapan empat pilar pengelolaan risiko yang terdiri dari:

#### A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab, antara lain mencakup :
  - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, antara lain mencakup:
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan
  - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
  - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
  - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
  - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen

## Manajemen Risiko

- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
  - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko;
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain mencakup :
  - a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

### B. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko

1. BCAS telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan *risk appetite*.
2. BCAS telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal).

### C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

1. BCAS telah memiliki prosedur pemberian pembiayaan dan prosedur kegiatan operasional lainnya yang telah diatur secara jelas dalam Manual Ketentuan, Panduan Kerja, maupun Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi.
2. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
3. Laporan mengenai perkembangan risiko, antara lain berupa: Laporan Profil Risiko, Laporan Portofolio Pembiayaan disampaikan kepada Direksi secara akurat, tepat waktu dan rutin.

### D. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

1. BCAS telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup lima komponen:
  - a. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
  - b. Identifikasi dan penilaian risiko
  - c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
  - d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
  - e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan kebijakan.

2. BCAS telah memiliki *business continuity plan, disaster & recovery plan* dan *sistem backup*
3. Setiap kegiatan proses operasional unit kerja di BCAS berpedoman pada standar manual kerja yang didalamnya telah melekat sistem pengendalian internal yang memadai.
4. Seluruh manajemen dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.

### Struktur Manajemen Risiko

Selain berpedoman pada empat pilar kerangka tersebut, BCAS mempunyai struktur pengelolaan risiko berupa komite/unit kerja/fungsi yang dibentuk khusus, yaitu :

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank. Keanggotaan KMR terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek manajemen risiko.
2. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), dibentuk untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan sesuai prinsip syariah. Keanggotaan KKP terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek kebijakan pembiayaan.
3. Komite Pembiayaan (KP), dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
4. *Asset Liability Committee (ALCO)*, dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management (ALMA)*, terutama dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk serta menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. Keanggotaan ALCO terdiri dari mayoritas Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja/Departemen yang bidang kerjanya terkait dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.

### Jenis-Jenis Risiko

Berikut adalah pengelolaan atas delapan risiko yang wajib dilakukan penilaian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia:

#### Risiko Kredit

BCAS memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/risk appetite*) dan telah dilakukan pengukuran dan pemantauan sejak tahap awal yaitu penerimaan permohonan dari nasabah, proses analisa pembiayaan sampai dengan proses *monitoring* pembiayaan setelah dilakukan pencairan. Hal tersebut dilakukan untuk

memitigasi kemungkinan timbulnya kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan bank, sehingga memerlukan komitmen semua pihak dari level manajemen tertinggi hingga *officer* pembiayaan sampai dengan *staff* operasional yang berada pada jajaran terdepan dalam mengelola risiko. Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur menentukan tingkat risiko secara kasus per kasus atas pemberian pembiayaan.

Profil risiko pembiayaan pada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan konsumen dikelola melalui pelaksanaan program-program dan produk-produk tertentu dengan *scoring system* yang tersentralisasi. Secara berkala Departemen Manajemen Risiko melakukan *monitoring* dan melaporkan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditetapkan. Dalam rangka memonitor posisi risiko pembiayaan dan dampaknya terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio - CAR*), Departemen Manajemen Risiko melakukan *stress testing* untuk kondisi normal maupun kondisi krisis.

#### Risiko Likuiditas

BCAS mengelola Risiko Likuiditas antara lain melalui analisa arus kas, *maturity gap* antara posisi aktiva dan pasiva dan analisa deposit inti serta melakukan *stress testing* dalam rangka menjaga kemampuan likuiditas bank. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan utama dari penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yaitu untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

#### Risiko Pasar

BCAS belum memiliki eksposur risiko yang signifikan, karena belum menjadi bank devisa, sehingga belum terkait dengan aktivitas mata uang asing. Perilaku nasabah di BCAS sangat dipengaruhi oleh tingkat imbal hasil yang diperoleh, meskipun Bank tidak menggunakan suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, namun dalam penentuan tingkat imbal hasil Bank juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- *Direct Competitor Market Rate (DCMR)* yaitu tingkat imbalan (*return*) yang diberikan oleh bank-bank syariah lainnya
- *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)* yaitu tingkat bunga dari bank-bank konvensional
- *Expected Competitive return for Investor (ECRI)* yaitu tingkat hasil yang diharapkan oleh *investor*.

Hal tersebut dilakukan karena target nasabah BCAS tidak hanya terbatas pada nasabah-nasabah yang loyal terhadap syariah namun juga nasabah-nasabah rasional yang masih membutuhkan bagi hasil yang kompetitif.

#### Risiko Operasional

Seiring dengan bertambahnya jaringan kantor mengakibatkan meningkatnya volume transaksi yang ada, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan kompleksitas operasional Bank sebagai akibat dari adanya pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Namun untuk mengantisipasi potensi tersebut, bank melakukan pengelolaan terhadap risiko operasional yang mungkin terjadi, salah satunya melalui implementasi metode *Risk and Control Self Assessment (RCSA)* di seluruh unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Dengan metode RCSA, unit kerja Cabang dan Kantor Pusat melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada unit kerjanya. Berdasarkan proses tersebut, unit kerja akan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya risiko. Di samping itu juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di unit kerja operasional mengenai *risk awareness* dan pengenalan manajemen risiko operasional. BCAS juga telah melakukan penyempurnaan terhadap *Standar Operating Procedure (SOP)* yang digunakan oleh unit kerja operasional dan melakukan proses *review* terhadap temuan-temuan dari audit internal dan audit eksternal untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap mekanisme kerja. Dalam hal peluncuran produk baru, Departemen Manajemen Risiko melakukan *risk assessment* dengan menyesuaikan *risk appetite, risk tolerance* bank dan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka manajemen risiko operasional dan sebagai bagian dari *Business Continuity Management (BCM)*, Departemen Manajemen Risiko telah melakukan *Business Impact Analysis (BIA)* dan melaporkannya kepada Direksi.

#### Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan dapat terjadi akibat bank tidak mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan bank pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Fatwa MUI-DSN dapat berdampak pada reputasi bank. Untuk itu BCAS berkomitmen penuh untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meminimalkan potensi risiko kepatuhan, BCAS telah menunjuk salah satu anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Departemen Kepatuhan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penadanaan Terorisme (APU dan PPT) di BCAS. Terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Direktur Kepatuhan telah melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan telah dilaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Unit Kerja Kepatuhan melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan aktivitas baru, usulan kebijakan dan prosedur internal, kajian terhadap permohonan pembiayaan dan secara berkala

## Manajemen Risiko



**4** Pilar  
Pengelolaan  
Risiko BCA  
Syariah

- Pengawasan aktif Manajemen
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

melakukan sosialisasi mengenai ketentuan perundang-undangan yang baru kepada seluruh karyawan. BCAS juga berkomitmen untuk mematuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan penerapan kebijakan *Customer Due Diligent (CDD)* untuk memitigasi risiko penyalahgunaan rekening nasabah.

### Risiko Reputasi

Risiko Reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif mengenai BCAS. Untuk melindungi dari pemberitaan dan persepsi negatif, secara rutin memantau berita yang berhubungan dengan BCAS diberbagai media massa. Selain itu, BCAS juga melakukan kerjasama dengan BCA sebagai induk perusahaan, dalam menangani keluhan yang masuk atas produk dan layanan bank melalui sarana layanan *Call Center* Halo BCA. Penggunaan sarana layanan ini terbukti secara efektif dapat meningkatkan kemampuan BCAS dalam memonitor keluhan dari nasabah secara profesional sehingga meminimalkan potensi risiko reputasi. Bank juga menyusun *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam menangani keluhan nasabah di unit kerja operasional agar *service level* penanganan keluhan sebagaimana yang telah ditetapkan senantiasa dapat terjaga dengan baik.

### Risiko Strategik

Risiko Strategik disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategik mewajibkan BCAS untuk melakukan identifikasi, mengukur dan memitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang kurang efektif serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal.

BCAS melakukan pemantauan terhadap pencapaian anggaran dibandingkan dengan target atau rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, baik untuk target jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan melakukan *monitoring* terhadap *Key Performance Indicator (KPI)* Unit Bisnis dan *Unit Support* lainnya agar fokus terhadap pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan. Bank juga senantiasa melakukan kaji ulang terhadap target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal.

### Risiko Hukum

Merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan. Risiko hukum dikelola dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan BCAS dari segi hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Departemen Hukum di bawah Satuan Kerja Hukum dan SDM, yang juga berperan dalam pengembangan dan pemantauan mengenai standarisasi dokumen-dokumen hukum di semua aktivitas bisnis Bank sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku.

## Sumber Daya Manusia



BCA Syariah sangat menyadari bahwa dalam usahanya untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan akan menghadapi persaingan ketat baik dalam Industri Perbankan Syariah sendiri maupun dengan Industri perbankan secara umum.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan dibutuhkan SDM yang andal dan memiliki tata nilai berdasarkan *Teamwork, Responsibility, Integrity, dan Profesionalism (TRIP)*. Oleh karena itu, strategi yang tepat untuk mengelola SDM secara terpadu dan berkesinambungan dari awal proses seleksi, pelatihan dan pengembangan hingga program-program retensi, mutlak dibutuhkan dan menjadi prioritas utama.

### A. SELEKSI & REKRUTMEN

Seiring dengan berkembangnya BCAS, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan serta tata nilai Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, selain bekerjasama dengan BCA untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, juga berpartisipasi pada acara *job fair* dan *job posting* di media.

Pada tahun 2013 jumlah karyawan yang telah direkrut oleh BCAS sebanyak 141 orang, sehingga jumlah karyawan ditahun 2013 meningkat sekitar 19,7 % dimana perekrutan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan *frontliner* sekaligus memperkuat pengendalian internal, dengan tetap memperhatikan komposisi yang seimbang antara *frontliner* dan *supporting*.

### B. PELATIHAN & PENGEMBANGAN

BCAS merasakan pentingnya kualitas SDM untuk mendukung pengembangan usaha secara berkualitas dan berkesinambungan, oleh karena itu BCAS menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai kompetensi yang dibutuhkan terutama di bidang *Risk Management, Leadership* dan program yang mendukung tugas dan tanggung jawab.

BCAS juga menggalakkan metode pelatihan melalui *e-learning*, metode tatap muka atasan dan bawahan (*coaching*), *morning briefing*, dan *quality meeting* di masing - masing unit kerja. Di samping itu BCAS juga mengembangkan metode *on the job training, benchmarking* dan menanamkan *performance driven culture*.

## Sumber Daya Manusia

### C. PROGRAM MEMPERTAHAKAN (RETENTION) KARYAWAN

Mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berprestasi merupakan tantangan bagi perusahaan. Oleh karena itu BCAS berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif untuk mendukung produktifitas kerja.

Program retensi yang telah dilakukan BCAS meliputi :

- Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.
- Program pengembangan karyawan berpotensi melalui perencanaan karir.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan.
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang seni, olahraga dan kerohanian.



Training Motivational Selling Skill



Training dan Sosialisasi Penjualan Produk Murabahah Emas



Training Motivational Selling Skill

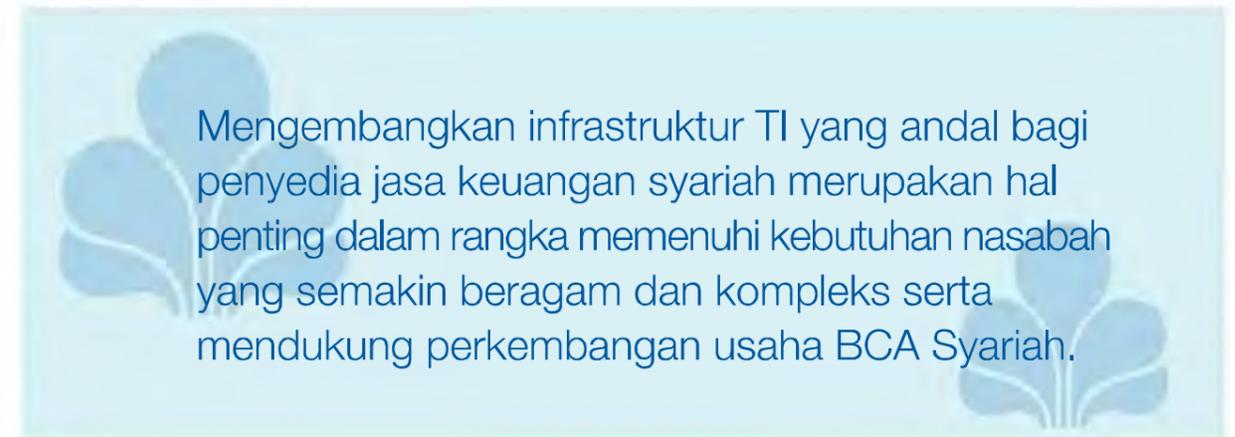


Pemberian Reward kepada Karyawan



Study Banding Karyawan pilihan ke Singapura

## Teknologi Informasi



Dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis yang akan datang maka BCAS melakukan investasi terhadap penggantian *core banking* dengan teknologi terkini dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam dan kompleks.

Dalam kebijakan TI, BCAS meletakkan tiga hal pokok: pengembangan sistem dan aplikasi; memperkuat kinerja *hardware* dan infrastruktur TI; serta memelihara dan meningkatkan kemajuan tata kelola TI.

### Pengembangan Sistem dan Aplikasi

#### 1. Pengembangan layanan UMKM

Guna menunjang perkembangan bisnis di tahun 2013, pada bulan Juni 2013 telah dilakukan implementasi pelayanan transaksi UMKM pada Kantor Cabang Utama (KCU) Jatinegara yang selanjutnya diikuti oleh KCU lain seperti Mangga Dua, Sunter dan Samanudi pada bulan Desember 2013.

#### 2. Menyiapkan layanan Mobile Banking

Sesuai dengan kebutuhan bisnis, Sistem Teknologi Informasi telah menyiapkan aplikasi *Mobile Banking* yang dilengkapi dengan *Fitur Inquiry Portfolio* Nasabah, *Inquiry Saldo* Dan Transaksi, Transfer Dana Antar BCAS, Transfer Dana Dari BCAS Ke Bank lain Melalui Jaringan Prima, Transfer Dana Ke Bank Lain Melalui SKN, dan juga Transfer Dana Ke Bank Lain Melalui RTGS.

Aplikasi *Mobile Banking* ini dapat digunakan pada *platform* yang menggunakan *Operating System* baik *Black Berry*, *Android*, maupun *i-OS* (Apple).

Dengan menggunakan jaringan Prima secara *real-time online* nasabah dapat melakukan *transfer* dana baik antar rekening BCA Syariah maupun ke Bank Lain sesama anggota jaringan PRIMA maupun ke anggota jaringan ATM Bersama.

#### 3. Perubahan Aplikasi dari Regulator

Sistem Teknologi Informasi juga terus melakukan penyesuaian sistem yang berkaitan dengan perubahan dari *Regulator* yaitu :

- Mengembangkan Aplikasi RTGS/SKN Generasi II
- Mengembangkan Aplikasi LBUS dengan format XBRL
- Mengembangkan Aplikasi GRIPS untuk pelaporan ke PPAK

#### 4. Mengembangkan aplikasi untuk segmen UMKM

Dalam rangka mendukung ragam produk pembiayaan kepada segmen UMKM, maka BCAS telah mengembangkan aplikasi sesuai dengan karakter bisnis UMKM antara lain koperasi simpan pinjam. Aplikasi tersebut dirancang untuk dapat mengakomodasi proses dari awal pembukaan rekening, pembayaran angsuran, hingga pelunasan secara otomatis melalui *batch processing* untuk meminimalisasi *human error*.

### Memperkuat Kinerja Hardware dan Infrastruktur TI

TI senantiasa mengembangkan kemampuan *hardware* dan infrastruktur, untuk memfasilitasi peningkatan jumlah transaksi baik melalui jaringan *e-channel* maupun kantor cabang. Secara berkesinambungan TI meningkatkan kapasitas penyimpanan data dan *processor*, disamping itu TI memastikan implementasi fungsi DRC dan *Business Continuity Plan* berjalan dengan baik.

TI juga akan memfokuskan pengembangan jaringan sebagai alternatif *channel* bagi kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dan sebagai *back up* jaringan. Selain hal tersebut guna mempercepat proses transaksi maka dilakukan pelebaran kapasitas *bandwidth* baik di kantor pusat maupun di cabang, dan memperkuat keamanan TI secara keseluruhan.

## Teknologi Informasi

**Memelihara dan Meningkatkan Kemajuan  
Tata Kelola TI.**

Dalam mengembangkan TI, BCAS telah membangun sistem dan prosedur yang secara konsisten diterapkan untuk memastikan setiap tahap pengembangan dilakukan dengan baik. Disamping itu secara periodik juga dilakukan *Quality Assurance* baik oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola TI telah berjalan sebagaimana mestinya.

BCAS dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama dengan BCA selaku Bank induk.

Komite Teknologi Informasi dibentuk untuk memonitor dan memastikan secara berkala dari waktu ke waktu bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan yang diharapkan.

Pada tahun 2013, BCAS memperoleh penghargaan sebagai *3rd Best Information Technology* dari Anugerah Perbankan Indonesia 2013 - *Economic Review & Perbanas Institute* dan *IT Banking Excellence Award* dari majalah *Warta Ekonomi*.

**Rencana Kedepan**

Memasuki tahun 2014, TI BCAS akan memfokuskan kepada tiga hal sebagaimana tersebut di atas melalui berbagai inisiatif guna mendukung kenyamanan, keamanan dan keandalan nasabah dalam bertransaksi.

TI BCAS akan melakukan penggantian *Core Banking System* yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan produk dan layanan nasabah saat ini dan dapat mengantisipasi berbagai perubahan dimasa yang akan datang yang semakin dinamis dan kompleks.

TI BCAS juga mempersiapkan perubahan sistem *backup* dari metode *warm backup* menjadi metode *hot backup (Full Mirroring)*, sehingga diharapkan dapat mempersempit *downtime system* dan meminimalisasi ketidaknyamanan nasabah dalam bertransaksi.

Dalam rangka meningkatkan keamanan nasabah dalam bertransaksi dan sesuai dengan jadwal implementasi penggunaan kartu ATM Chip dari bank Indonesia, BCAS akan mempersiapkan pengembangan *National Standard for Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)*.



TI BCA Syariah akan melakukan penggantian *Core Banking System* yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan produk dan layanan nasabah saat ini dan dapat mengantisipasi berbagai perubahan dimasa yang akan datang yang semakin dinamis dan kompleks.

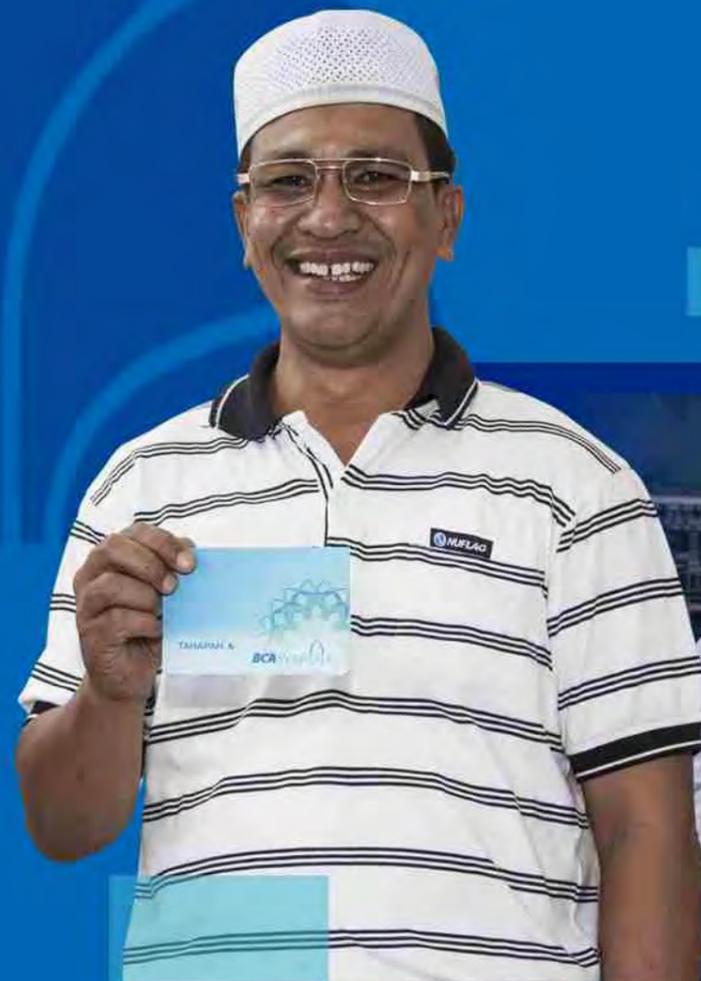
TI BCAS juga mempersiapkan perubahan sistem *backup* dari metode *warm backup* menjadi metode *hot backup (Full Mirroring)*, sehingga diharapkan dapat mempersempit *downtime system* dan meminimalisasi ketidaknyamanan nasabah dalam bertransaksi.

bab.  
**04**

# Tinjauan Tata Kelola Perusahaan

38 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

39 Laporan Pelaksanaan GCG



Bagi BCA Syariah, praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana pelaksanaan operasionalnya menuntut komitmen penuh dari seluruh karyawan.

Dari tahun ke tahun, BCA Syariah terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG secara terukur, antara lain melalui *self assessment*, yang tahun ini kembali menunjukkan predikat Baik.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BCAS menyadari pentingnya partisipasi dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kantor melalui berbagai program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.



Pemberian Bantuan kepada Korban Banjir di Bidaracina - Kampung Melayu



Pemotongan hewan qurban di Masjid Al Ihsaniyah Jakarta Timur



Santunan kepada Anak-anak Panti Asuhan Yatim Muslimin Jaya



Pemberian bantuan Saranan Pendidikan pesantren Al Tsaniyah



Kegiatan Buka Bersama anak-anak Panti Asuhan Yatim Muslimin Jaya dan khataman qur'an



bantuan Meja dan Kursi untuk pesantren Al Tsaniyah



Pemberian bantuan kepada pekerja harian lepas di lingkungan kantor BCAS



Bantuan Komputer untuk pesantren Al Tsaniyah

## Good Corporate Governance PT BCA Syariah

### I. GAMBARAN UMUM

Praktek tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik terbaik yang berlaku dengan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi demi membangun PT BCA Syariah (BCAS) sebagai pelaku industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh sehingga dapat memenuhi misinya untuk menjadi Bank Syariah andalan dan Pilihan Masyarakat. Bagi BCAS, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholders* dengan tetap konsisten menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang

organisasi mengacu kepada ketentuan /peraturan berlaku serta memenuhi prinsip syariah yang diwujudkan dalam bentuk :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan terhadap benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BCAS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

### II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCAS

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2011 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG BCAS untuk tahun 2013 sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	12,5%	0,3	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DeKom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	17,5%	0,4	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10,0%	0,2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG.
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) GCG	1	10,0%	0,1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sangat sesuai ketentuan berlaku & prinsip prinsip termasuk <i>Sharia Aspect</i> .
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,0%	0,1	Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCAS telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip-prinsip GCG termasuk <i>Sharia Aspect</i> .

Good Corporate Governance PT BCA Syariah

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10,0%	0,1	Benturan kepentingan dapat di-kelola dengan sangat baik, mengacu kebijakan internal BCAS.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan BCAS	2	5,0%	0,1	Fungsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta di lengkapi dengan kebijakan intern.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5,0 %	0,1	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku.
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5,0 %	0,1	Akt. Publik & KAP yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan sangat independen.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5,0 %	0,1	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sangat baik.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCAS, Lap Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	1	15,0%	0,2	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
<b>Nilai Komposit</b>			<b>100%</b>	<b>1,6</b>	<b>BAIK</b>

Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 < Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 < Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 < Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 < Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Dari hasil *Self Assessment* tersebut diatas, nilai komposit yang diperoleh oleh BCAS adalah 1,6 dengan predikat komposit tergolong Baik.

**III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**1. Dewan Komisaris**

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindaklanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarah dan nasehat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis Bank.

Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris dengan beranggotakan 2 (dua) orang Komisaris Independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BCAS telah melakukan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Komisaris yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

**1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCAS serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan sejalan maksud dan tujuan Bank sesuai Anggaran Dasar.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- Dewan Komisaris mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (bila ada) sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
- Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

**1. Anggota Dewan Komisaris**

Susunan anggota Dewan Komisaris BCAS, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
2.	Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen*)
3.	Surya Widjaja	Komisaris Independen**)

Catatan :

\*) Masa jabatan Suyanto Sutjiadi berlaku efektif sesuai surat Bank Indonesia No.15/1642/DPBS perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Pengurus BCAS

\*\*) Masa jabatan Surya Widjaja berlaku sampai dengan calon Komisaris independen pengganti yaitu Joni Hendriyanto efektif selaku Komisaris berdasarkan hasil *Fit and Proper Test* dari Bank Indonesia. Dari komposisi anggota Dewan Komisaris, sebagaimana tabel diatas maka jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen sesuai ketentuan berlaku.

**2. Aspek Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris**

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim lingkungan kerja yang objektif serta menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Terkait independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

*Good Corporate Governance PT BCA Syariah*

- a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Presiden Komisaris.
- c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCAS.
- d. Seluruh Komisaris tidak memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor baik jenis atau lembar saham pada BCAS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCAS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

**3. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2013, dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan BCAS serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain :

- a. Dewan Komisaris merekomendasikan agar terhadap hasil *review* atas Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), yang telah dibahas oleh Direksi agar dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan Laporan Portofolio pembiayaan yang disampaikan, Dewan Komisaris mengingatkan manajemen untuk memperhatikan adanya risiko konsentrasi pembiayaan.
- c. Terkait berlakunya Peraturan Bank Indonesia :
  - PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Dewan Komisaris mengingatkan agar manajemen BCAS membuat rencana tindak (*action plan*)
  - PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dewan Komisaris mengajukan usulan perubahan periode pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memantau dan mengendalikan risiko.

- d. Dewan Komisaris sependapat dengan usulan Direksi mengenai penunjukkan kembali KAP Abubakar Usman & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2013. Selama tahun 2013, tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.

**2. Direksi**

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja Perseroan sesuai dengan visi dan misi. Direksi juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan *sharia aspect*. Direksi bertanggung jawab pula atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan praktik pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berhak mewakili BCAS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCAS dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCAS serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu. BCAS telah melakukan pengangkatan kembali Direksi, yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

**2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Mengelola sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Unit Kerja Kepatuhan.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi.
- n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

**2.2 Anggota Direksi**

Jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yana Rosiana	Presiden Direktur
2	John Kosasih	Wakil Presiden Direktur
3	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

**2.3 Aspek Independensi dan Transparansi Direksi**

Jumlah anggota Direksi diatas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCAS. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2013, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain:

- a. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus.
- b. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada BCAS dan/atau Perusahaan lain.
- d. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5,0% (lima persen) atau lebih baik pada BCAS maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- e. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya.
- f. Tidak memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCAS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2012, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
<b>Komisaris:</b>			
1. Iwan Kusumobagio	14 x		4 x
2. Surja Widjaja	13 x		4 x
3. Suhartono	10 x		3 x
4. Suyanto Sutjiadi*)	3 x		1 x
<b>Direksi :</b>			
1. Yana Rosiana		103 x	4 x
2. John Kosasih		108 x	3 x
3. Tantri Indrawati		98 x	2 x

\*) Mulai aktif mengikuti rapat Komisaris sejak November 2013

*Good Corporate Governance PT BCA Syariah*

**B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE**

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta *check and balance*.

**1. Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- 1.1 Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- 1.2 Dalam kaitan fungsi Komite selaku sub organ dari Komisaris, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
  - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- 1.3 Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaiki pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- 1.4 Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

**2. Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Presiden Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi divisi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCAS. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCAS dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

**3. Komite Audit**

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
  - 1) Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - 2) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
  - 3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
  - 4) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern

- d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- e. Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

**3. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komposisi anggota Komite tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Surja Widjaja	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Suyanto Sutjiadi *)	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota (Komisaris Independen)	-
Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Iwan Kusumobagio	-	Anggota (Presiden Komisaris)	-
Ridwan Masui	-	-	Anggota (Independen)
Sutedjo Prihartono	Anggota (Independen)	-	Anggota (Independen)
Rio S. Wisaksono	Anggota (Independen)	-	-
Endang Ruslina	-	Anggota	-

\*) Suyanto Sutjiadi menggantikan Suhartono sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif per tanggal 14 November 2013.

**4. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi**

Rapat Komite (Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi Nominasi) diselenggarakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal 4 (empat) kali dalam setahun kecuali untuk Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dengan frekuensi rapat sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko Nominasi	Rapat Komite Remunerasi &	Rapat Komite Audit
Surya Widjaja	-	4x	10x
Suhartono	10x	3x	-
Suyanto Sutjiadi	3x	-	-
Iwan Kusumobagio	-	4x	-
Ridwan Masui	-	-	9x
Sutedjo Prihatono	13x	-	10x
Rio S Wisaksono	12x	-	-
Endang Ruslina	-	4x	-

Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

**5. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit**

Selama tahun 2013 Komite telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan beberapa aktivitas penting sebagai berikut :

*Good Corporate Governance PT BCA Syariah*

**6.1 Komite Pemantau Risiko**

TANGGAL	AKTIVITAS
15 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>review</i> terhadap :                             <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi Desember 2012.</li> <li><i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas (<i>General Market Stress Scenario</i>).                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah &amp; Unit Usaha Syariah.</li> <li>Skenario yang digunakan.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Melakukan evaluasi terhadap                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Portofolio Pembiayaan posisi Desember 2012.</li> <li>Penyaluran pembiayaan terbesar BCAS.</li> </ol> </li> <li>Melakukan pembahasan terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</li> </ol>
20 Februari 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan rencana tindak (<i>action plan</i>) terkait dengan PBI tentang Kegiatan Usaha &amp; Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti.</li> <li>Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta melakukan <i>review</i> terhadap Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR).</li> </ol>
18 Maret 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko bulan Februari 2013.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsentrasi grup/debitur inti (di luar BTB dan pihak terkait).</li> <li>Konsentrasi deposito inti (di luar BTB)</li> </ul> </li> <li>Laporan Hasil Audit BCA terhadap Departemen Risiko.</li> </ol>
23 April 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko untuk Triwulan I 2013.</li> <li>Laporan Portofolio Pembiayaan bulan Maret 2013.</li> </ol>
28 Mei 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi April 2013.</li> <li>Laporan Profil Risiko per April 2013.</li> <li>Laporan Portofolio per Maret 2013.</li> </ol>
25 Juni 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi Mei 2013.</li> <li>Materi pembuatan video promosi Bina Usaha Rakyat.</li> </ol>
26 Juni 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko per Mei 2013.</li> <li>Laporan Portofolio per Mei 2013.</li> <li>Pelaksanaan <i>Business Impact Analysis dan Risk Assessment</i>.</li> </ol>
23 Juli 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko Triwulan II tahun 2013.</li> <li>Validasi Model Internal BCAS.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang memadai dalam menilai kualitas nasabah.</li> <li>Model diharapkan mampu mempercepat service level dalam pengambilan keputusan pembiayaan dengan tetap menerapkan four eyes principle.</li> </ul> </li> </ol>
29 Agustus 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi Juli 2013.</li> <li>Laporan Profil Risiko per Juli 2013.</li> <li>Laporan Portofolio per Juli 2013.</li> </ol>
17 September 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi Agustus 2013.</li> <li>Laporan Profil Risiko per Agustus 2013.</li> <li>Uji Sensitivitas Penurunan Marjin.</li> </ol>

TANGGAL	AKTIVITAS
11 November 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko per September 2013.</li> <li>Laporan Portofolio per September 2013.</li> </ol>
28 November 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> posisi Oktober 2013.</li> <li>Laporan Profil Risiko per Oktober 2013.</li> <li>Laporan Portofolio per Oktober 2013.</li> </ol>
19 Desember 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial Highlight</i> Kompetitor                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan perbandingan dengan beberapa Bank Syariah lain (<i>peers</i>).</li> </ul> </li> <li>Kebijakan Limit Penyaluran Pembiayaan</li> <li>Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam</li> <li>memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada Pihak Terkait, penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).</li> <li>Pelaksanaan <i>Risk &amp; Control Self Assessment (RCSA)</i>.</li> <li>Laporan Profil Risiko per November 2013</li> </ol>

**6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi**

TANGGAL	AKTIVITAS
19 Maret 2013	Melakukan evaluasi terhadap kompensasi Karyawan dan usulan Pengurus periode 2013 - 2016.
20 Maret 2013	Membahas usulan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko periode 1 Mei 2013 - 30 April 2014.
24 April 2013	Membahas hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2013
8 November 2013	Rapat pembahasan penetapan Ketua Komite Pemantau Risiko

**6.3 Komite Audit**

TANGGAL	AKTIVITAS
19 Februari 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Audit BCA.</li> <li>Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit.</li> <li>Koordinasi Komite Audit dengan SKAI.</li> </ol>
23 April 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Audit Departemen Keuangan &amp; Akuntansi</li> <li>Hasil Audit Kantor Cabang Semarang</li> <li>Hasil Audit Bina Usaha Rakyat (BUR)</li> </ol>
29 Mei 2013	Melakukan pembahasan mengenai <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit BI</li> <li>Realisasi Kerja SKAI sampai April 2013</li> </ol>
23 Juli 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Realisasi Kerja SKAI :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana dan realisasi kerja yang telah dilaksanakan SKAI.</li> </ul> </li> <li>Laporan Hasil Audit KC Sunter :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai penilaian prestasi untuk Kepala Cabang, KOC, dan tenaga pelaksana di cabang yang bersangkutan.</li> </ul> </li> </ol>

*Good Corporate Governance PT BCA Syariah*

TANGGAL	AKTIVITAS
24 Juli 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Penetapan KAP untuk tahun buku 2013. b. Rekomendasi kembali KAP Abubakar Usman & Rekan sebagai auditor untuk tahun buku 2013.
29 Agustus 2013	Dilakukan pembahasan mengenai pra <i>exit meeting</i> hasil audit BI a. RBB tahun 2013 dianggap belum sejalan dengan arah kebijakan BCAS untuk melakukan pertumbuhan yang agresif. b. Laporan keuangan BCAS telah disajikan secara wajar. c. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dinilai belum ditangani dengan baik terkait dengan belum sepenuhnya mempersiapkan infrastruktur (SDM, IT dan jaringan kantor) yang memadai.
18 September 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Laporan Hasil Audit BI & BCA. b. Rencana Kerja SKAI.
11 November 2013	Dilakukan pembahasan mengenai : a. Rencana kerja SKAI tahun 2014. b. Kebijakan Anti <i>Fraud</i> .
20 Desember 2013	Dilakukan pembahasan mengenai : a. Realisasi Kerja SKAI tahun 2013. b. Status LT LHA <i>Open</i> (Internal, BCA, dan BI). c. Audit BCA.

**C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Organ utama GCG lain yang dimiliki BCAS adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang dibentuk untuk memenuhi amanah PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. DPS merupakan perwakilan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah dan memiliki independensi yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCAS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BCAS telah melakukan pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013, dengan susunan anggota sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA	Anggota

Sesuai dengan lampiran SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang

dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya, sedangkan DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya.

**1. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab DPS**

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah.

- Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap BCAS mengenai ketaatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan diterbitkan.
- Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia.

**2. Pelaksanaan Tugas DPS**

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2013 DPS telah melakukan rapat sebanyak 17 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

TANGGAL	AKTIVITAS
15 Januari 2013	1. Melakukan pembahasan terhadap uji petik yang dilakukan DPS terhadap Dokumen transaksi Musyarakah dan Laporan Hasil Usaha nasabah serta perpanjangan <i>Line Facility Musyarakah</i> .
22 Januari 2013	2. Pembahasan terhadap aktivitas terkait tanggung jawab DPS di semester II tahun 2012, antara lain konfirmasi pegawai BCAS dan/atau nasabah terkait hasil uji petik. Membahas mengenai kategori yang tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan syariah terkait perpanjangan <i>line Facility Musyarakah</i> .
29 Januari 2013	Pembahasan mengenai adanya permohonan opini DPS terkait perlakuan terhadap <i>refinancing</i> pembiayaan.
05 Februari 2013	Melakukan beberapa pembahasan terkait hal-hal dibawah ini: a. Pembahasan titipan dana sosial atau dana kebajikan di BCAS. b. Isu transaksi murabahah di Unit Mikro terkait kelengkapan dokumen saat akad dan lain-lain.
26 Februari 2013	Pembahasan temuan Audit BI antara lain mengenai akad Bank Garansi, pembiayaan multi finance dengan pola <i>executing</i> serta <i>mereview</i> praktek penggunaan asuransi non syariah.
26 Maret 2013	Pembahasan lanjutan atas temuan Bank Indonesia sebagaimana pada rapat tanggal 26 Februari diatas.
16 April 2013	Minta penjelasan kepada Unit Kerja terkait Uji Petik yang dilakukan DPS dalam rangka untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional BCAS terkait pembiayaan.
13 Mei 2013	Melakukan diskusi seputar akad musyarakah antara lain terkait penentuan nisbah Musyarakah angsuran ( <i>installment</i> ) dan kebutuhan catatan khusus pada <i>musyarakah</i> untuk <i>monitoring</i> proyek yang dibiayai.
11 Juni 2013	Membahas taklimat DSN yang baru terbit sebagai rujukan dalam penggunaan asuransi dan penjaminan syariah dalam pembiayaan serta mendiskusikan adanya nasabah dengan kebutuhan khusus bila ditinjau dari aspek syariah, yaitu menggunakan asuransi non syariah serta biaya administrasi & asuransi termasuk dalam pembiayaan yang diberikan.
25 Juni 2013	Melakukan pembahasan terhadap draft SK Program KPR/KKPA iB pola kerja sama dengan Developer dengan prioritas pembiayaan terhadap rumah yang <i>ready stock</i> .
02 July 2013	Melakukan pembahasan terkait fasilitas <i>channeling</i> kepada Koperasi yang bergerak dibidang penyaluran pembiayaan kepada pensiunan (PNS, TNI, POLRI) serta mempelajari permintaan opini Unit Bisnis terkait draft Akad <i>Istishna</i> .
22 Juli 2013	1. Mengikuti presentasi mengenai <i>Financial Highlight</i> BCAS untuk posisi bulan Juni 2013. 2. Membahas akad IMBT terkait adanya pelunasan dipercepat dikarenakan adanya take over dari BCAS lain. 3. <i>Mereview</i> perlakuan pembebanan biaya administrasi pada fasilitas Bank Garansi dengan merujuk pada fatwa DSN mengenai <i>Wakalah bil Ujrah</i> .
20 Agustus 2013	Pembahasan menurut tinjauan syariah seperti antara lain adanya peluang nasabah BCAS berpartisipasi dalam Gebyar Tahapan BCA 2014 dengan terdapat hadiah promosi.

Good Corporate Governance PT BCA Syariah

TANGGAL	AKTIVITAS
09 September 2013	Pembahasan perihal sanksi keterlambatan angsuran nasabah, baik berupa <i>ta'zir</i> maupun <i>ta'widh</i> . Untuk <i>ta'widh</i> DPS menekankan pendekatannya harus <i>based on real cost</i> bukan karena adanya <i>opportunity lost</i> atau <i>al-fushah al-dha-i'ah</i>
01 Oktober 2013	A. Pembahasan terhadap nasabah terkait <i>akad murabahah</i> antara lain: a. Adanya nasabah berkebutuhan khusus terkait <i>nature business</i> nasabah, dimana pembelian barang dibeli terlebih dahulu sebelum <i>akad murabahah</i> dilakukan. b. Transfer dana ke nasabah tidak dapat dilakukan saat <i>akad murabahah</i> dilaksanakan karena masalah BCAS <i>Technics</i> . B. Melakukan pembahasan mengenai <i>akad ijarah multijasa</i> terkait rencana BCAS untuk bekerjasama dengan PJTKI.
12 November 2013	1. Melakukan evaluasi terhadap adanya program hadiah / promosi dengan fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 mengingat sebagian besar tabungan berakad <i>wadiah</i> . 2. Membahas rencana konversi KPR umum menjadi KPR pekerja, khusus KPR umum yang debiturnya karyawan. 3. Mempelajari Fatwa DSN mengenai Pengalihan Utang terkait rencana <i>take over</i> dari Bank Syariah lain.
17 Desember 2013	Melakukan pembahasan terkoordinasi dengan pihak pemeriksa, hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan diskusi dengan auditor Kantor Akuntan Publik mengenai pemenuhan aspek syariah dari produk penyaluran dan penghimpunan dana serta layanan jasa. b. Melakukan diskusi dengan SKAI mengenai temuan hasil audit terkait aspek syariah berikut tindak lanjutnya.

**D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

**1. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi. Untuk memitigasi risiko tersebut maka disamping melakukan upaya secara *curative (ex-post)* juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat *preventif (ex-ante)*. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamanahkan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha
- Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang tugasnya juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain :

- a. Memastikan bahwa dalam setiap kebijakan strategis yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
  - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Penyediaan dana di atas jumlah tertentu, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- c. Melakukan kajian dan memberikan opini atas proposal produk dan aktivitas baru untuk memastikan agar produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab

- e. Menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) disesuaikan PBI serta SE BI terbaru
- f. Memastikan pelaksanaan penerapan kebijakan APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain.
- g. Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- h. Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap profil risiko kepatuhan dan *Risk Control System* secara periodik. Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan secara semesteran kepada Bank Indonesia.

**2. Fungsi Audit Intern**

BCAS menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999 BCAS telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit sehingga bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCAS melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCAS, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

**2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum)**

Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
  - 1) Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
  - 2) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
  - 3) Menyusun Panduan Audit Intern.
- b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BCAS dan masyarakat.
- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- d. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

**2.2 Efektivitas dan Cakupan Audit Intern**

BCAS menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi *Audit Intern* dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari PBI No. 1/6/PBI/1999, untuk memastikan terwujudnya BCAS yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
  - 1) Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
  - 2) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
  - 3) Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

**3. Fungsi Audit Ekstern**

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan

*Good Corporate Governance PT BCA Syariah*

berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan.

**3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern**

Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BCAS telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak BCAS dan Akuntan Publik.
- b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh BCAS telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
  - 1) Nama Kantor Akuntan Publik.
  - 2) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
  - 3) Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*).
  - 4) Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
  - 5) Legalitas perjanjian kerja.
  - 6) Ruang lingkup audit.
  - 7) Jangka waktu penyelesaian audit.
  - 8) Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
- c. Ruang lingkup audit telah mencakup :
  - 1) Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk BCAS.
  - 2) Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh BCAS.
  - 3) Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
  - 4) Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
  - 5) Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
  - 6) Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
  - 7) Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.

- 8) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- 9) Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik.
- 10) Keandalan sistem pelaporan kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BCAS kepada Bank Indonesia.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

**3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik**

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman & Rekan yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdaftar di buku *Directory* 2012 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP-335/KM.1/2009
- b. Terdaftar di Bank Indonesia dengan lisensi No 067, melalui Surat Bank Indonesia No.11/727/DPIP/DtB tanggal 21 Agustus 2009, perihal Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta baik dari Jasa *General Audit, Special Audit, Compilation, Review* maupun *Approve Procedure*.

**E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)**

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

1. BCAS telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. BCAS melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
3. BCAS secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.

4. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan serta diversifikasi portofolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.

**F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

**1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya**

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No.10 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Remunerasi	3	1.237,5	3	5.927,5	2	709,3
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	115,8	3	699,5	-	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengurus Syariah
Diatas Rp 2 Milyar	-	2	-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	-	1	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	-	0	-
Rp 500 juta ke bawah	3	-	2

**Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb :

NO.	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	25,2 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,5 x
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,2 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,4 x

**2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Selama tahun 2013 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

**3. Penyimpangan Internal**

Selama 2013 tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan.

**4. Permasalahan Hukum**

Pada tahun 2013 dua gugatan Perdata yang ditujukan kepada BCAS telah diputus oleh Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- a. Gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.PWK dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atas obyek sengketa (bangunan) kios yang terletak di Mall Sadang Terminal Square Lantai Dasar Nomor 9 dan 10, dimana obyek sengketa tersebut disewakan oleh PT Sadang Terminal Square kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan inti putusannya : "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., diberikan hak untuk menikmati dan memanfaatkan secara maksimal obyek sengketa sampai habis masa sewa yaitu tanggal 28 November 2013".
- b. Gugatan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.Bks., dari Azhari Abadi, atas obyek sengketa (rumah tinggal) yang terletak di Villa Galaxi Blok D5 No. 8, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan inti putusannya : "Menolak seluruh gugatan penggugat", namun Pihak Penggugat pada hari Senin, tanggal 18-02-2013 telah mengajukan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan sampai saat ini masih dalam proses Perkara BANDING di Pengadilan Tinggi.



#### 5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCAS telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2013, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan.

#### 6. Shares Buy Back

BCAS masih belum *go public* dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan.

#### 7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial, berdasarkan Laporan Keuangan hasil audit (*audited*) tahun 2013 telah disalurkan dana sebesar Rp116.907.701,-

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundangundangan serta praktik-praktik terbaik yang berlaku dengan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi demi membangun PT BCA Syariah sebagai pelaku industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh

bab.  
**05**

# Tinjauan Keuangan



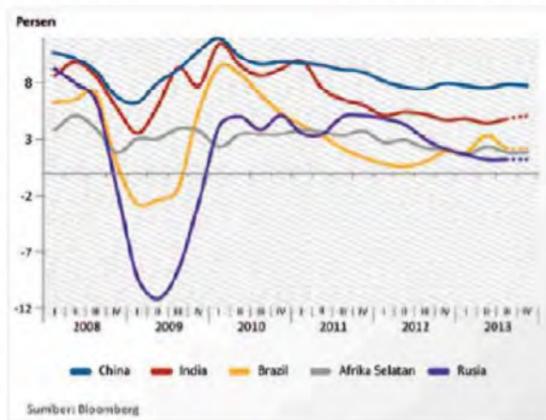
Di tengah situasi perekonomian dunia yang terus berubah dan perbankan nasional yang belum stabil, BCA Syariah mampu mencatat kinerja yang menggembirakan. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan BCA Syariah masih menunjukkan angka-angka yang relatif tinggi, dengan kualitas yang tetap terjaga, sehingga fundamental keuangan secara umum masih kuat.

## Pembahasan Hasil Kerja Keuangan

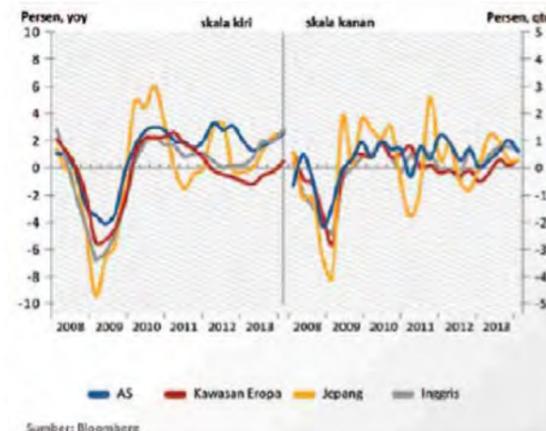
### TINJAUAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2013

Tahun 2013 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global yang tidak berjalan sesuai dengan harapan ditandai oleh ketidakpastian kinerja perekonomian di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2013 masih menghadapi risiko terkait kebijakan pengurangan stimulus *The Fed (tapering)*,

perdebatan *debt ceiling* dan penghentian sementara layanan pemerintah AS (*government shutdown*). Disamping itu, perekonomian Eropa juga masih menyimpan risiko ketidakpastian yang tinggi terkait lambatnya implementasi pengurangan belanja pemerintah (*austerity program*) di beberapa negara.



Grafik 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Negara Emerging market



Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

	2010	2011	2012	2013*				
				Jan'13	Apr'13	Jul'13	Oct'13	Jan'13
PDB Dunia	5,2	3,9	3,1	3,5	3,3	3,1	2,9	3,0
Negara Maju	3,0	1,7	1,4	1,4	1,2	,2	1,2	1,3
Amerika Serikat	2,5	1,8	2,8	2,0	1,9	1,7	1,6	1,9
Kawasan Eropa	2,0	1,5	-0,7	-0,2	-0,3	-0,6	-0,4	0,4
Jepang	4,7	-0,6	1,4	1,2	1,6	2,0	2,0	1,7
Negara Emerging Market	7,5	6,2	4,9	5,5	5,3	5,0	4,5	4,7
Asia	9,8	7,8	6,4	7,1	7,1	6,9	6,3	6,5
China	10,4	9,3	7,7	8,2	8,0	7,8	7,6	7,7
India	10,5	6,3	3,2	5,9	5,7	5,6	3,8	4,4
India, at factor cost	9,7	7,5	5,1					4,6
ASEAN-5	7,0	4,5	6,2	5,5	5,9	5,6	5,0	5,0
Volume Perdagangan Dunia Barang dan Jasa	12,8	6,1	2,7	3,8	3,6	3,1	2,9	2,7
Inflansi IHK								
Negara Maju	1,5	2,7	2,0	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4
Negara Emerging Market	5,9	7,1	6,0	6,1	5,9	6,0	6,2	6,1

Ket: PDB India berdasarkan tahun fiskal; analisis menggunakan PDB at factor cost. Sumber: World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)  
\* Proyeksi IMF berdasarkan publikasi WEO di bulan bersangkutan

Untuk kinerja pasar keuangan, permasalahan struktural ditandai oleh pasar keuangan Indonesia yang didominasi oleh dana asing. Kerentanan di sektor keuangan muncul ketika terjadi aliran masuk likuiditas global dengan deras ke dalam perekonomian domestik, sejalan dengan kebijakan stimulus moneter di negara maju. Kepemilikan asing pada surat berharga negara meningkat cepat menjadi sekitar 31,0% pada akhir tahun 2012 dibandingkan dengan 18,0% pada tahun 2009. Likuiditas yang melimpah ini mendorong penurunan suku bunga yang pada gilirannya mendorong kredit dan kenaikan harga aset. Tingginya kepemilikan asing di dalam pasar keuangan yang masih tipis menyebabkan tingginya volatilitas harga ketika terjadi pergerakan dana asing. Kenaikan pertumbuhan kredit yang ditopang oleh peningkatan harga aset sebagai kolateral juga berpotensi menimbulkan risiko di sektor perbankan. Defisit transaksi berjalan yang semakin melebar tidak terhindarkan dan mendorong nilai tukar rupiah bergerak dalam tren melemah. Eskalasi pelemahan rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan Mei 2013 sampai menjelang akhir September 2013, saat terjadi

Dinamika perekonomian global juga berpengaruh pada kinerja perekonomian berupa tren pertumbuhan ekonomi yang melambat sejak triwulan awal, sehingga untuk keseluruhan tahun tercatat 5,8%, melambat dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,2%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari investasi yang melambat sejak awal tahun akibat menurunnya persepsi keyakinan pelaku bisnis terhadap perlambatan ekonomi. Sementara ekspor masih tumbuh terbatas sejalan dengan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas global. Sebaliknya, konsumsi masih tumbuh stabil dan tidak banyak terpengaruh oleh kondisi global, serta masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tren perlambatan ekonomi domestik, inflasi meningkat tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Sementara itu, inflasi inti 2013 masih terkendali tertolong oleh permintaan domestik yang melambat, dampak lanjutan pelemahan nilai tukar yang belum terlalu kuat, serta harga komoditas global yang menurun. Inflasi pada tahun

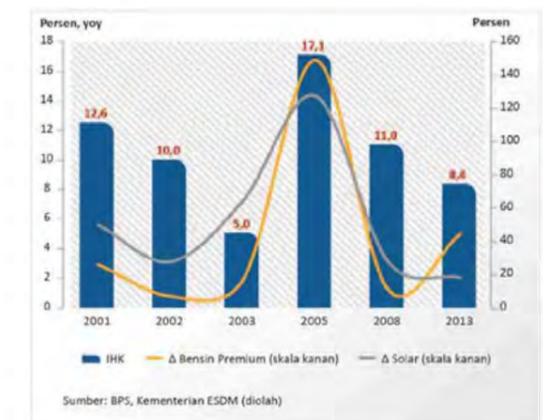
Tabel 7.1. Perkembangan Asumsi Makro Tahun 2013

Asumsi Makro	2012			2013		
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN-P	APBN	Realisasi
Pertumbuhan ekonomi yoy (%)	6,7	6,5	6,2	6,8	6,3	5,8
Inflasi yoy (%)	5,3	6,8	4,3	4,9	7,2	8,4
Nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS)	8.800	9.000	9.638	9.300	9.600	10.452
Rata-rata suku bunga SPN 3 bln (%)	6,0	5,0	3,2	5,0	5,0	4,5
Harga minyak internasional (dolar AS per barel)	90	105	113	100	108	06
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	950	930	860	900	840	825
Lifting gas Indonesia (juta barel setara minyak per hari)	-	-	1260	1360	1240	1213

Sumber KESDM dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, Siaran Pers kementerian Keuangan Tanggal 5 Januari 2014

aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang meningkat akibat rencana pengurangan stimulus moneter di Amerika Serikat dan persepsi negatif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Sebagai akibatnya rupiah pada tahun 2013 terdepresiasi cukup tajam dibandingkan tahun 2012, baik secara *point to point* ataupun secara rata-rata.

2013 mencapai 8,4%, lebih tinggi dari inflasi 2012 sebesar 4,3%, dan jauh di atas kisaran sasaran inflasi 4,5%±1%. Berdasarkan regional, kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat tertinggi di kawasan Sumatera dipengaruhi tingginya *inflasi volatile food* dan inflasi administered price, sedangkan inflasi inti tercatat rendah



Volatilitas Nilai Tukar Rupiah (Sumber Bank Indonesia) Inflasi Pada Periode Kenaikan Harga BBM

## Pembahasan Hasil Kerja Keuangan

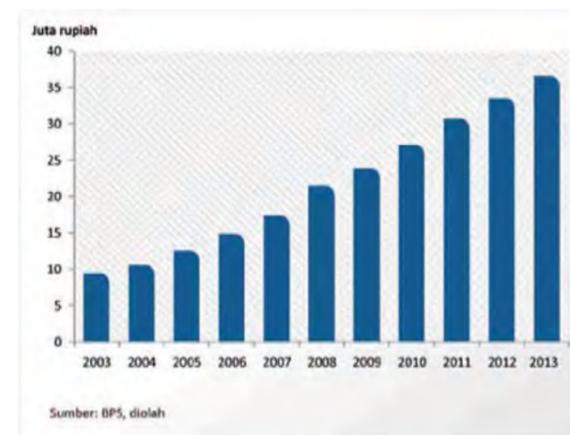
**Volatilitas Nilai Tukar Rupiah (Sumber Bank Indonesia) Inflasi Pada Periode Kenaikan Harga BBM**

Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi yang terjadi berdampak pada tertahannya tren perbaikan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2013 tercatat sedikit meningkat dari tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2012. Sementara, tingkat kemiskinan juga sedikit meningkat pada September 2013 dibandingkan Maret 2013. Pada kuartal ketiga inflasi kembali kepada pola normalnya, bahkan berada di bawah perilaku historisnya. Respon kebijakan yang ditempuh mengarahkan inflasi tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti pada 2005 dan 2008 yang mencatat *inflasi double digit*.



Respon kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah juga mampu membawa perekonomian tetap terkendali menuju arah yang lebih seimbang. Defisit transaksi berjalan menurun secara signifikan pada triwulan IV 2013. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mencatat surplus dan diikuti meredanya pelemahan nilai tukar rupiah. Konsumsi rumah tangga tetap terkendali yang diikuti oleh kontraksi impor secara riil. Secara keseluruhan, proses penyesuaian ekonomi tetap terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, bahkan relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan peer countries. Di samping itu, penyesuaian ekonomi yang tetap terkendali tersebut juga ditopang oleh ketahanan fiskal yang kuat sebagaimana tercermin pada defisit APBN-P 2013 yang dapat dikendalikan menjadi 2,3% dari PDB, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013.

Proses penyesuaian ekonomi domestik yang tetap terkendali juga ditopang stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga, terutama ketahanan perbankan yang tetap kuat. Ketahanan perbankan yang tetap kuat tercermin pada CAR yang tinggi dan NPL yang rendah. Ketahanan perbankan yang masih kuat tersebut cukup positif di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan kredit yang melambat pada 2013. Sementara itu, pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, meskipun terdapat kecenderungan mulai melambat sejak September 2013. Pertumbuhan kredit UMKM yang masih tinggi mengindikasikan besarnya peran UMKM dalam menopang perekonomian domestik di tengah kuatnya pengaruh perlambatan ekonomi global. Di lain pihak, kinerja



pasar obligasi dan pasar saham dalam tren menurun dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi domestik. Di samping itu, proses penyesuaian ekonomi yang terkendali juga ditopang sistem pembayaran yang tetap berjalan secara efisien, aman dan lancar. Keandalan sistem pembayaran non tunai sebagai infrastruktur sistem keuangan ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan (*availability*) sistem pembayaran sesuai tingkat layanan (*service level*) yang telah ditetapkan selama tahun 2013. Sementara itu, kinerja yang positif dari pengelolaan uang pada 2013 terlihat dari kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kartal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar, ditengah meningkatnya kebutuhan akan uang kartal.

## Tinjauan Kinerja Perbankan Indonesia Tahun 2013

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbankan Indonesia masih mampu mempertahankan kinerja yang positif. Aset industri perbankan tumbuh 16,2% sepanjang tahun yang didukung oleh pertumbuhan permodalan yang sehat. Di pertengahan tahun 2013, Bank Indonesia secara proaktif dan berhati-hati mengarahkan pertumbuhan aset industri perbankan ke tingkat yang realistis dan berkelanjutan dengan menerapkan berbagai kebijakan kredit yang lebih konservatif. Bank Indonesia mempertahankan kualitas fungsi pengawasannya dan melanjutkan dialog yang konstruktif dengan komunitas perbankan nasional. Aset perbankan Indonesia meningkat sebesar 16,2% menjadi Rp4.954 triliun per 31 Desember 2013 dengan tingkat

Pada akhir tahun 2013, total portofolio kredit sektor perbankan tercatat sebesar Rp3.293 triliun, meningkat 21,6% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Kredit modal kerja tumbuh 20,4% menjadi Rp1.586 triliun dari akhir tahun 2012. Kredit investasi naik sebesar 35,0% menjadi Rp798 triliun. Kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing berkontribusi sebesar 48,2% dan 24,2% terhadap total kredit. Kredit konsumsi naik sebesar 13,6% menjadi Rp909 triliun per 31 Desember 2013, yang mewakili 27,6% dari total kredit. Dari segi penghimpunan dana, pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat sebesar 13,6% dan mencapai Rp3.664 triliun per 31 Desember 2013 dari Rp3.225 triliun per 31 Desember 2012. Kenaikan dana pihak ketiga ditopang oleh peningkatan semua

	2013	2012	Naik/(Turun)	
			Nominal	Persentase
Total Aset	4.954	4.263	691	16,2%
Kredit	3.293	2.708	585	21,6%
Modal Kerja	1.586	1.317	269	20,4%
Investasi	798	591	207	35,0%
Konsumsi	909	800	109	13,6%
Dana Pihak ketiga	3.664	3.225	439	13,6%
Giro	847	767	80	10,4%
Tabungan	213	1.077	136	12,6%
Deposito	1.604	1.381	223	16,1%
Pendapatan Bunga Bersih	243	208	35	16,8%
Pendapatan Operasional selain bunga	140	126	14	1,1%
Beban Operasional	(251)	(218)	(33)	15,1%
Laba Sebelum Pajak	190	120	70	58,3%
Laba Bersih	107	93	14	15,1%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	4,9%	5,5%	N.A	N.A
Tingkat Pengembalian Atas Aset (ROA)	3,1%	3,1%	N.A	N.A
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74,1%	74,1%	N.A	N.A
Kredit Terhadap Dana Pihak ketiga (LDR)	89,7%	83,6%	N.A	N.A
Kredit bermasalah (NPL)	1,8%	,9%	N.A	N.A
Tingkat Kecukupan Modal (CAR)	18,1%	17,4%	N.A	N.A
Jumlah Bank (Unit)	120%	120%	N.A	N.A

Sumber Bank Indonesia

atas aset (*Return on Assets - ROA*) tercatat sebesar 3,1%. Pertumbuhan aset perbankan ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp439 triliun atau 13,6%, menjadi Rp3.664 triliun per 31 Desember 2013. Sektor perbankan membukukan *profitabilitas solid* yang mendukung pertumbuhan ekuitas perbankan nasional. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans - NPL*) sektor perbankan Indonesia berada pada level 1,8% per 31 Desember 2013 dibandingkan 1,9% pada tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*) industri perbankan pada akhir tahun 2013 tercatat pada tingkat yang *solid* sebesar 18,1% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yang sebesar 17,4%.

jenis produk dana. Giro dan tabungan masing - masing tumbuh 10,4% dan 12,6% mencapai Rp847 triliun dan Rp1.213 triliun. Sedangkan deposito naik 16,1% menjadi Rp1.604 triliun per 31 Desember 2013. Pertumbuhan kredit yang melebihi pertumbuhan penghimpunan dana di 2013 dan di tahun - tahun sebelumnya, menyebabkan lebih ketatnya keseluruhan struktur likuiditas perbankan Indonesia. Hal ini tercermin pada pesatnya kenaikan LDR perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2013, lebih ketatnya kondisi likuiditas ditandai dengan meningkatnya kompetisi tingkat suku bunga deposito perbankan nasional. Bank Indonesia melaporkan kenaikan rata-rata tertimbang suku bunga deposito Rupiah berjangka waktu satu bulan sebesar

## Tinjauan Kinerja Perbankan Indonesia Tahun 2013

213 bps sepanjang tahun menjadi 7,7% di sepanjang tahun 2013. Tingkat LDR yang sebesar 89,7% di Desember 2013 lebih tinggi dibandingkan 83,6% di Desember 2012.

Untuk mendukung kebutuhan akan pendanaan, beberapa bank dan anak-anak perusahaannya aktif dalam menghimpun dana dari pasar modal. Likuiditas yang semakin ketat dan peningkatan suku bunga pendanaan mendorong tingginya suku bunga kredit sektor perbankan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja sebesar 64 bps mencapai 12,14% dan peningkatan suku bunga kredit investasi sebesar 55 bps mencapai 11,83% selama tahun 2013.

Profitabilitas sektor perbankan Indonesia pada tahun 2013 terus bertumbuh dengan kuat. Laba bersih sektor perbankan meningkat menjadi Rp107 triliun, naik 15,1% dari Rp93 triliun pada tahun 2012. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih, sejalan dengan pertumbuhan portofolio kredit yang solid. Rasio NIM tercatat pada level 4,9% di tahun 2013, lebih rendah dari 5,5% di tahun 2012. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tetap stabil pada kisaran 74,1%.

pertumbuhan DPK pada tahun 2012 sebelumnya yaitu sebesar 27,8% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap perbankan umum di tahun 2013 adalah 4,8%, naik 0,2% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di tahun 2013 sebesar 22,6% (YoY), lebih rendah dari pertumbuhan pembiayaan di tahun 2012 yaitu sebesar 43,7%. Sementara itu rasio *Non Performing Financing (NPF)* pada tahun 2013 naik dari 2,3% di tahun sebelumnya menjadi 3,0% pada 2013.

Untuk pertumbuhan jumlah jaringan kantor syariah, sampai dengan tahun 2013 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah. Sejalan dengan hal tersebut jaringan kantor BUS telah mencapai 2.496 kantor meningkat 12,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara itu untuk jaringan kantor UUS meningkat 12,4% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### Kinerja Keuangan BCAS di Tahun 2013

Seiring dengan kondisi perbankan Indonesia di tahun 2013 yang masih belum stabil, BCAS mencatat pertumbuhan yang cukup

(dalam triliun rupiah)	2011	2012	2013	Pertumbuhan 2013		Pertumbuhan 2012	
				Nominal	%	Nominal	%
<b>Total Aset</b>	145,5	195,0	233,1	38,1	9,5%	49,6	34,1%
<b>Pembiayaan</b>	102,7	147,5	180,8	33,3	22,6%	44,8	43,7%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	115,4	147,5	176,3	28,8	9,5%	32,1	27,8%
<b>Laba Rugi</b>	1,5	2,5	3,4	0,9	35,6%	1,1	72,3%

### Perkembangan Perbankan Syariah di Tahun 2013

Perbankan Syariah selama tahun 2013 mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya walaupun secara prosentase tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Aset perbankan

kuat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan. Selama tahun 2013 aset tumbuh sebesar 27,4% dari Rp1.602,2 miliar menjadi Rp2.041,4 miliar, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 35,0% dari Rp1.261,8 miliar menjadi Rp1.703,1 miliar dan pembiayaan tumbuh sebesar 41,1% dari Rp1.007,7

### Pertumbuhan Jumlah Jaringan Kantor Syariah

	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%YoY)	
				2012	2013
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	0,0%	0,0%
Jumlah Unit usaha Syariah (UUS)	23	24	23	4,3%	-4,2%
Kantor Bank Umum Syariah (BUS)	1,390	1,734	1,942	24,7%	2,0%
Kantor Unit Usaha Syariah (UUS)	312	493	554	58,0%	12,4%

syariah di tahun 2013 tumbuh Rp38,1 triliun atau tumbuh 19,5% (YoY) dari Rp195,0 triliun di tahun 2012 menjadi Rp233,1 triliun di tahun 2013. Dengan pertumbuhan aset tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat dari 4,6% di tahun 2012 menjadi 4,7% di tahun 2013. DPK perbankan syariah tahun 2013 naik sebesar Rp28,8 triliun atau 19,5% (YoY), dari Rp147,5 triliun menjadi Rp176,3 triliun di tahun 2013. Pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan

miliar menjadi Rp1.421,6 miliar. Prosentase pertumbuhan baik *total asset*, dana pihak ketiga maupun pembiayaan masih berada di atas pertumbuhan industri perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan juga diiringi dengan tetap berkualitasnya pembiayaan yang ada, terlihat dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2013 sebesar 0,1% yang masih jauh di bawah ketentuan BI.

### LABA RUGI

#### Pendapatan Bagi Hasil Bersih

Pertumbuhan dari sisi pembiayaan memberikan dampak kenaikan pendapatan bagi hasil bagi Bank. Dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan bagi hasil meningkat 21,0% dari Rp66,6 miliar menjadi Rp80,6 miliar. Total pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 43,6% dari Rp87,7 miliar menjadi Rp125,9 miliar. Berdasarkan kelompok produk, pendapatan margin *murabahah* meningkat 29,5% dari Rp41,8 miliar menjadi Rp54,1 miliar, pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat 79,3% dari Rp9,0 miliar menjadi Rp16,1 miliar, pendapatan bagi hasil *musyarakah* meningkat 110,8% dari Rp22,7 miliar menjadi Rp47,9 miliar, namun sebaliknya

#### Beban Operasional

Beban Operasional tercatat sebesar Rp61,1 miliar atau meningkat 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban operasional selain disebabkan oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja dan meningkatnya biaya IT & Komunikasi seiring dengan bertambahnya kantor cabang.

#### Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Selama tahun 2013 penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dibentuk sebesar Rp6,5 miliar atau 119,8% dari PPA yang wajib dibentuk, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu seiring dengan pertumbuhan pembiayaan.

(dalam jutaan rupiah)	2013 Rp	2012 Rp
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Provisi dan Komisi selain dari Pemberian Kredit/Pembiayaan	1,141	4,349
Pendapatan Operasional Lainnya	4,945	3,134
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	6,086	7,483

pendapatan *ijarah* menurun 45,3% dari Rp14,2 miliar menjadi Rp7,8 miliar seiring dengan terus menurunnya *outstanding* pembiayaan tersebut. Seiring dengan meningkatnya *outstanding*

#### Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih

Pada tahun 2013 BCAS membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp16,8 miliar, meningkat 52,9% dari tahun sebelumnya.

(dalam jutaan rupiah)	2013 Rp	2012 Rp
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Tenaga Kerja	40,683	39,039
Umum dan Administrasi	17,506	18,142
Beban Usaha Lain	2,938	2,428
Jumlah Beban Operasional	61,127	59,609

dana pihak ketiga selama tahun 2013, beban bagi hasil kepada pihak ketiga meningkat sebesar 47,9% dari Rp50,4 miliar menjadi Rp74,5 miliar.

Sementara itu laba bersih setelah pajak sebesar Rp12,7 miliar, meningkat 51,9% dari tahun sebelumnya.

#### Pendapatan Operasional Lainnya

Total pendapatan operasional lainnya di tahun 2013, menurun sebesar 18,7% dari Rp7,5 miliar menjadi Rp6,1 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## Tinjauan Kinerja Perbankan Indonesia Tahun 2013

### NERACA

#### Aset

Total aset BCAS tumbuh 27,4% dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat dari Rp1.602,2 miliar menjadi Rp2.041,4 miliar di akhir tahun 2013. Peningkatan nilai aset didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga.

(dalam jutaan rupiah)	2013 Rp	2012 Rp
<b>TOTAL ASET PRODUKTIF</b>	<b>1,932,956</b>	<b>1,532,591</b>
Giro Pada Bank Lain	151,568	50,968
Penempatan Pada Bank Lain	252,700	258,000
Surat-surat Berharga	107,063	206,886
Pembiayaan Kredit	1,421,624	1,007,737
	-	-
<b>TOTAL ASET PRODUKTIF</b>	<b>108,463</b>	<b>78,590</b>
Kas	7,161	5,896
Giro Pada Bank Indonesia	81,396	58,780
Aset Tetap	18,558	6,766
Aset Lain	1,345	7,147
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2,041,419</b>	<b>1,602,181</b>

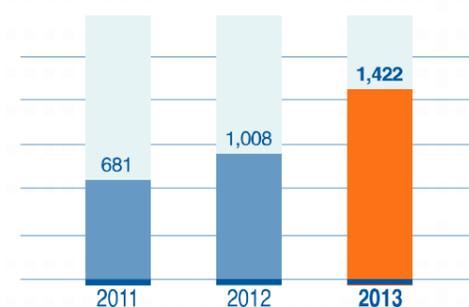
#### Penyaluran Pembiayaan

Pada akhir tahun 2013 BCAS telah membukukan pembiayaan sebesar Rp1.421,6 miliar, tumbuh 41,1% atau sebesar Rp413,9 miliar dari akhir tahun sebelumnya.

#### Pertumbuhan Pembiayaan

### Pembiayaan

(dalam miliar rupiah)



BCA Syariah telah membukukan pembiayaan sebesar:

**Rp1.421,6 miliar**

#### Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Dec-12	Dec-13
Pertanian dan Perkebunan	102.5	130.9
Pertambangan	0,3	-
Industri	173.1	218.4
Konstruksi	21.4	70.3
Perdagangan, Hotel dan Restoran	109.9	215.7
Pengangkutan, Pergudangan, dan Transportasi	94.5	157.0
Jasa-jasa Dunia Usaha	426.0	552.0
Lain-lain	80.8	77.4
<b>Total</b>	<b>1,008.4</b>	<b>1,421.6</b>

Komposisi pembiayaan BCAS berdasarkan sektor ekonomi yang terbesar adalah pada sektor Jasa-jasa Dunia Usaha, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp552,0 miliar dan kedua terbesar adalah pada sektor industri dengan nilai *outstanding* sebesar Rp218,4 miliar, sedangkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan posisi akhir Desember 2012 adalah pada sektor Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 229,1% dan pertumbuhan kedua tertinggi adalah pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan pertumbuhan sebesar 96,3%.

#### Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas

Keterangan	31 Desember 2012 % terhadap		31 Desember 2013 % terhadap	
	Nominal (Miliar Rp.)	Total Pembiayaan	Nominal (Miliar Rp.)	Total Pembiayaan
Lancar	998.9	99.1%	1,401.6	98.6%
Dibawah Perhatian Khusus	8.5	0.8%	18.8	1.3%
Performing Loan/Financing	1,007.4	99.9%	1,420.4	99.9%
Kurang Lancar	0.1	0.0%	-	0.0%
Diragukan	-	0.0%	0.5	0.0%
Macet	0.9	0.1%	0.9	0.1%
NPF/NPL	1.0	0.1%	1.4	0.1%
Total kredit (Pembiayaan)	1,008.4	100%	1,421.7	100%
Rasio NPL/NPF Gros*	0.1%		0.1%	
Rasio NPL/ NPF Nett	0.0%		0.0%	

Pada akhir tahun 2013, rasio NPF pembiayaan masih tetap terjaga pada posisi 0,1%, dan sampai dengan akhir tahun 2013 Bank telah membentuk PPA dengan rasio sebesar 119,8%.

## TANGGUNG JAWAB ATAS PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan ini serta Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen BCAS dan telah disetujui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.



### Surat Berharga

- Tersedia untuk dijual - Pemerintah
- Tersedia untuk dijual - Swasta
- Dimiliki hingga jatuh tempo - Pemerintah
- Dimiliki hingga jatuh tempo - Swasta

### Surat-Surat Berharga

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh BCAS pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp107,1 miliar, menurun sebesar Rp99,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan jenis surat berharga, jenis dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) Swasta tercatat sebesar Rp40,0 miliar, tersedia untuk dijual (AFS) Pemerintah sebesar Rp47,9 miliar, HTM Pemerintah sebesar Rp8,0 miliar dan AFS Swasta sebesar Rp11,2 miliar.

### Surat-surat Berharga Berdasarkan Jatuh Tempo

(dalam miliar rupiah)	Total	2012	2013	2014	2015
Tersedia untuk dijual - Pemerintah	47.9	-	-	-	47.9
Tersedia untuk dijual - Swasta	11.2	0.8	-	10.5	-
Dimiliki hingga jatuh tempo - Pemerintah	8.0	-	-	-	8.0
Dimiliki hingga jatuh tempo - Swasta	40.0	-	-	40.0	-
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>107.1</b>	<b>0.8</b>	<b>-</b>	<b>50.5</b>	<b>55.8</b>

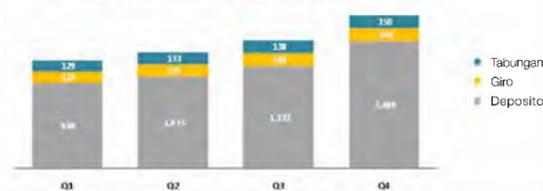
### PASIVA

#### Dana Pihak Ketiga

Total dana pihak ketiga pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.703,1 miliar, terdiri dari produk tabungan sebesar Rp149,6 miliar, produk giro sebesar Rp144,4 miliar dan produk deposito sebesar Rp1.409,1 miliar. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu meningkat sebesar 35,0% atau Rp441,2 miliar. Produk giro naik sebesar 0,8%, produk tabungan meningkat 12,4% dan produk deposito meningkat sebesar 43,0%. Upaya BCAS dalam meningkatkan dana murah dilakukan melalui pendirian Unit Layanan Syariah di cabang-cabang BCA yang memiliki potensi tinggi atas produk dan layanan syariah. Pendirian Unit Layanan Syariah di cabang BCA terbukti efektif dalam menjaring nasabah baru dan penggalangan CASA. Saat ini jumlah *account* ULS mencapai 16.639 atau 54,69% dari *total account* BCAS.

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang sedikit dibawah pertumbuhan pembiayaan menyebabkan meningkatnya rasio pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga (FDR) sebesar 3,6% menjadi 83,5% pada akhir tahun 2013.

#### Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2013



### Ekuitas

Total ekuitas meningkat sebesar 3,0% atau Rp9,1 miliar dari Rp304,4 miliar menjadi Rp313,5 miliar pada akhir tahun 2013, sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2013. Hampir seluruh permodalan Bank adalah terdiri dari modal inti (95,2%). Permodalan bank berada pada level yang sangat sehat dengan rasio kecukupan modal (CAR), dengan memperhitungkan risiko kredit, tercatat sebesar 22,4%, jauh melampaui persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8,0%.

### Ratio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(dalam miliar rupiah)	2012	2013
Modal Inti	299.1	306.0
Modal Pelengkap	9.4	15.4
<b>Jumlah Modal Inti dan Pelengkap</b>	<b>308.6</b>	<b>321.4</b>
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>982.3</b>	<b>1,438.0</b>
<b>Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum</b>	<b>31.5%</b>	<b>22.4%</b>

### Likuiditas

Posisi likuiditas pada akhir tahun 2013 terjaga dengan baik, dimana *secondary reserved* berada pada posisi Rp311,8 miliar, yang terdiri dari *Fasbis* sebesar Rp252,7 miliar, surat berharga tersedia untuk dijual (AFS) Pemerintah sebesar Rp47,9 miliar dan surat berharga tersedia untuk dijual (AFS) Swasta sebesar Rp11,2 miliar. Sumber utama likuiditas berupa dana pihak ketiga yang berasal dari giro, tabungan dan deposito yang berjangka waktu pendek dan secara historikal memiliki pengendapan yang cukup stabil.

### Dewan Komisaris

**Surja Widjaja**  
Komisaris Independen

**Iwan Kusumobagio**  
Presiden Komisaris

**Suyanto Sutjiadi**  
Komisaris Independen

### Dewan Direksi

**Yana Rosiana**  
Presiden Direktur

**John Kosasih**  
Wakil Presiden Direktur

**Tantri Indrawati**  
Direktur Kepatuhan

## bab. 06

# Data Perusahaan

70	Struktur Organisasi	84	Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
72	Profil Dewan Komisaris	86	Peristiwa Penting
74	Profil Direksi	88	Informasi Pemegang Saham
76	Profil Dewan Pengawas Syariah	88	Informasi Kepemilikan Saham
78	Profil Komite Audit	89	Produk dan Layanan
80	Profil Komite Pemantau Risiko	90	Kantor Cabang
82	Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi	95	Laporan Keuangan



Memperkuat struktur organisasi perusahaan dan memperluas jaringan layanan dengan membuka cabang-cabang baru merupakan bagian dari upaya menyeluruh BCA Syariah dalam meningkatkan kualitas layanannya bagi pelanggan dan masyarakat lainnya secara umum.

Struktur Organisasi



## Profil Dewan Komisaris



## Profil Dewan Komisaris



### **Iwan Kusumobagio**

menjabat sebagai Komisaris Utama BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk mulai sebagai Pimpinan Kantor Cabang, Kepala Kantor Wilayah XIII, VIII dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik Kantor Pusat. Beliau adalah lulusan Sarjana Akutansi *University Of San Francisco* (1980-1984) dan gelar S2 di *Golden Gate University*.



### **Surja Widjaja**

Surja Widjaja menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah II (2001-2005). Beliau adalah lulusan Universitas Gajayana Malang fakultas Ekonomi Manajemen.



### **Suyanto Sutjiadi**

Suyanto Sutjiadi menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 30 September 2013 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Pemimpin Wilayah V Medan (2004-2010). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983.

## Profil Direksi



## Profil Direksi

### Yana Rosiana

Yana Rosiana menjabat sebagai Presiden Direktur BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS Beliau bertanggung jawab atas Audit, Operasional, Sumber Daya Manusia dan Hukum serta Analisa Risiko Pembiayaan. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di PT Bank BCA Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah IX Bank BCA (2000-2008). Beliau adalah lulusan STIE Perbanas Surabaya.



### Tantri Indrawati

Tantri Indrawati menjabat sebagai Direktur BCAS sejak tanggal 25 Maret 2010 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT BCAS nomor 60 dan 61 tertanggal 30 Maret 2010. Beliau bertanggung jawab atas Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di Bank Bukopin dan jabatan terakhir sebagai *Head Group Liabilities Commercial* (2004-2008), kemudian beliau memangku jabatan sebagai Direktur Kepatuhan di Bukopin Syariah (2008-2009) dan sebagai Direktur Pelayanan dan Pendanaan pada bank yang sama (2009-2010). Beliau memperoleh gelar Msi dalam bidang FISIP/PSDM di Universitas Indonesia.



### John Kosasih

John Kosasih menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCAS sejak tanggal 30 September 2013 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/101/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Selaku Calon Wakil Presiden Direktur Pada PT Bank BCA. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan cabang dan bisnis, perencanaan keuangan dan akuntansi serta pengembangan teknologi informasi dan logistik. Sebelum bergabung di BCAS beliau memangku berbagai jabatan manajerial di PT Bank BCA (2005-2008) sebagai Senior Advisor, Ketua Tim Personal Banking dan sebelumnya sebagai Konsultan Strategi Pemasaran. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau pernah bekerja di bank Danamon (2000-2005) memangku beberapa jabatan manajerial puncak dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Consumer Mass Market (DSP)*. Beliau pernah bekerja di PT Bank Risjad Salim International sebagai ketua Koordinator Pusat dan anggota Tim Pengelola (pada tahun 2000) pada saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN dan pada tahun yang sama menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad Finance. Memulai karier di perbankan, menangani keuangan dan administrasi kredit di PT Bank Risjad Salim International (1997-1999). Beliau memperoleh gelar bachelor di *Murdoch University, Perth West Australia* dan MBA di *Newport University, LA USA*



## Profil Dewan Pengawas Syariah



## Profil Dewan Pengawas Syariah

### Fathurrahman Djamil

Fathurrahman Djamil menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank BCAS. Sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) periode 2010 - 2015, dosen di beberapa universitas negeri dan swasta serta menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga/institusi, yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah di CIMB Niaga, anggota Dewan Pengawas Syariah di AIA Financial dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Maskapai Reasuransi Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang ilmu Syariah dan mendapat gelar Profesor di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.



### Muhammad Masyhuri Na'im

Muhammad Masyhuri Na'im menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS. Sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat periode 2010 - 2015, dosen di beberapa universitas negeri dan swasta serta sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Syariah Harta Insan Karimah. Beliau memperoleh gelar MA dan Doktor dari Universitas Umm Al-Quro Makkah, Saudi Arabia.



## Profil Komite Audit



## Profil Komite Audit



### Surja Widjaja, Ketua

Surja Widjaja menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah II (2001-2005). Beliau adalah lulusan Universitas Gajayana Malang fakultas Ekonomi Manajemen.



### Ridwan Masui

Ridwan masui menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak beroperasinya BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di Bank Indonesia dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Staf ahli Deputy Gubernur Bidang Perbankan BI, sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan. Beliau memperoleh gelar S1 dari STIE Swadaya Jakarta.



### Sutedjo Prihatono

Sutedjo Prihatono menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite pemantau Risiko BCAS sejak awal bulan Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di Bank Muamalat Indonesia dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai *Senior Corporate AO* (2001-2004), kemudian beliau menjabat sebagai *Senior Management* (2004-2011) di *Karim Business Consulting*. Beliau memperoleh gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen.

## Profil Komite Pemantau Risiko



## Profil Komite Pemantau Risiko



### Suyanto Sutjiadi

Suyanto Sutjiadi menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 30 September 2013 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT BCAS. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Pemimpin Wilayah V Medan (2004-2010). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983.



### Rio Sigid Wisaksono

Rio Sigid Wisaksono menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak beroperasinya BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di beberapa Bank Swasta dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Senior Konsultan di Cadipa Konsultan Jakarta. Beliau memperoleh gelar doctorandus ekonomi (drs.) dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada Fakultas Ekonomi Perusahaan.



### Sutedjo Prihatono

Sutedjo Prihatono menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite pemantau Risiko BCAS sejak awal bulan Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di Bank Muamalat Indonesia dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Senior Corporate AO (2001-2004), kemudian beliau menjabat sebagai Senior Management (2004-2011) di Karim Business Consulting. Beliau memperoleh gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen.

## Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi



## Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi



### Surja Widjaja, Ketua

Surja Widjaja menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah II (2001-2005). Beliau adalah lulusan Universitas Gajayana Malang fakultas Ekonomi Manajemen.



### Iwan Kusumobagio, Anggota

menjabat sebagai Komisaris Utama BCAS sejak tanggal 2 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/2010, Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk mulai sebagai Pimpinan Kantor Cabang, Kepala Kantor Wilayah XIII, VIII dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik Kantor Pusat. Beliau adalah lulusan Sarjana Akutansi University Of San Francisco (1980-1984) dan gelar S2 di Golden Gate University



### Suyanto Sutjiadi

Suyanto Sutjiadi menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS sejak tanggal 30 September 2013 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/100/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarier di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Pemimpin Wilayah V Medan (2004-2010). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983.

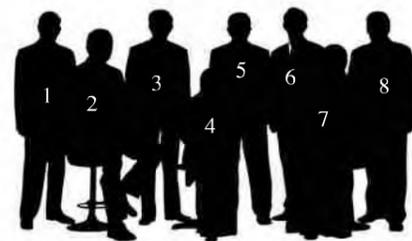


### Endang Ruslina, Anggota

Endang Ruslina menjabat sebagai anggota komite Remunerasi dan Nominasi BCAS sejak beroperasinya BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS beliau berkarir di PT Bank BCA, Tbk dan jabatan terakhir beliau adalah Senior Officer di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM di PT BCAS. Beliau memperoleh gelar Insinyur di Institut Pertanian Bogor pada Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian program studi Agri Bisnis.

## Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

## Pejabat Eksekutif



- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Muhammad Masyhuri Na'im | 5. Iwan Kusumobagio    |
| 2. John Kosasih            | 6. Suyanto Sutjiadi    |
| 3. Surja Widjaja           | 7. Tantri Indrawati    |
| 4. Yana Rosiana            | 8. Fathurrahman Djamil |

Pejabat Eksekutif Per 31 Desember 2013

NO.	NAMA	CABANG	JABATAN
1.	YANTO TANAYA	KANTOR PUSAT	KEPALA UNIT BISNIS
2.	PRANATA NAZAMUDDIN	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA PERENCANAAN, KONTROL KEUANGAN DAN AKUNTASI PERUSAHAAN
3.	YOHANES OETOMO SOEBOER	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA TI & LOGISTIK
4.	ABANG JUFERDI	KANTOR PUSAT	KEPALA DIVISI OPERASI
5.	AMMY H. SUSANTO	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL
6.	ENDANG RUSLINA	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM
7.	ADETYAS WENDIANA	KANTOR PUSAT	KEPALA SATUAN KERJA ANALISA RISIKO PEMBIAYAAN
8.	SETYO BUDI RAHARDJO	KANTOR PUSAT	KEPALA DEPARTEMEN KEPATUHAN
9.	KARNO	KANTOR PUSAT	KEPALA DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO
10.	MERLING THIOSANTO	JATINEGARA	KEPALA CABANG KCU JATINEGARA
11.	FERIANTO	SUNTER	KEPALA CABANG KCU SUNTER
12.	THE ADRIAN PRABOWO	SAMANHUDI	KEPALA CABANG KCU SAMANHUDI
13.	WHIRA RAHMAN	MANGGA DUA	KEPALA CABANG KCU MANGGA DUA
14.	LIEM SIAN HWAY	SURABAYA	KEPALA CABANG KCU SURABAYA
15.	SAGIMAN	SEMARANG	KEPALA CABANG KCU SEMARANG

## Peristiwa Penting



Januari 2013 - Indonesia Brand Champion Award



Februari 2013 - Islamic Finance Award



Juni 2013 - Banking Service Excellence 2013- MRI&Infobank



Juli 2013 - Infobank Award



Maret 2013 - Contact Center Award



Maret 2013 - Service to Care Award - MarkPlus



September 2013 - Anugerah Perbankan Indonesia



Oktober 2013 - Penandatanganan Channeling Koprus Bca Syariah



April 2013 - Ulang Tahun BCA Syariah ke 3



April 2013 - Ulang Tahun BCA Syariah ke 3



April 2013 - Ulang Tahun BCA Syariah ke 3



April 2013 - Ulang Tahun BCA Syariah ke 3



November 2013 - IT Banking Excellence 1



November 2013 - Infobank Sharia Finance Award



Mei 2013 - Penandatanganan Kerjasama Pembiayaan dengan BMT Sidogiri



Juni 2013 - Bobo Fair



November 2013 - GRES Bank Indonesia



November 2013 - GRES Bank Indonesia

## Informasi Pemegang Saham

### Informasi Kepengurusan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BCAS tanggal 17 April 2013, yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BCAS nomor 10 tertanggal 2 Mei 2013, dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmata SH, M.Kn dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-18713, tertanggal 16 Mei 2013, serta berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia, Susunan Pengurus PT BCAS adalah sebagai berikut :

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tuan Iwan Kusumobagio.  
Komisaris Independen : Tuan Surja Widjaja.  
Komisaris Independen : Tuan Suyanto Sutjiadi.

#### DIREKSI

Presiden Direktur : Nyonya Hajjah Yana Rosiana.  
Wakil Presiden Direktur : Tuan John Kosasih.  
Direktur Kepatuhan : Nyonya Tantri Indrawati.

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua DPS : Tuan Prof. DR. Fathurrahman Djamil, Master of Arts.  
Anggota DPS : Tuan DR. Haji Muhammad Masyuri Naim, Master of Arts.

### INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan akta Nomor 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati SH dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-30741, tertanggal 01 Desember 2010, komposisi Kepemilikan Saham PT BCAS adalah sebagai berikut:

Nama Instansi	Lembar Saham	%	Nominal Rp
PT BCA.Tbk	296.299	99,9997	296.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0003	1.000.000
Jumlah	296.300	100%	296.300.000.000

### INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM

No.	Nama Perusahaan	% Saham
1.	PT BCA Syariah	
	Pemegang Saham :	
	1. PT Bank BCA, Tbk	99,9997%
	2. PT BCA Finance	0,0003%
2.	PT BCA, Tbk	
	Pemegang Saham :	
	1. Farlindo Investment ( Mauritius) Ltd qq Sdr.Bambang Hartono dan Sdr. Robert Budi Hartono	47,15%
	2. Masyarakat	49,91%
	3. Anthony Salim	1,76%
	4. Treasury Stock	1,18%
	Perusahaan Pengendali PT BCA	
	1. Farlindo Investment (Maritius)	
	Pemegang Saham	
	Treasury Stock	7,82%
	Alerka Investment Limited	92,18%
	2. Alarka Investment Limited	
	Pemegang Saham	
	Brolona Investment Limited	100%
3.	Brolonna Investment	

## Produk Dan Layanan

Produk	Keterangan
Produk Simpanan	Tahapan iB Giro iB Deposito iB Tahapan Rencana iB
Produk Pembiayaan	Pembiayaan Modal Kerja iB Pembiayaan Investasi iB KPR iB KKB iB Emas iB
Perbankan Elektronik	ATM BCA Debit BCA Jaringan ATM Prima
Jasa	Bank Garansi Kiriman Uang (Retail dan RTGS) Kliring ( <i>Lokal dan Intercity Clearing</i> ) Inkaso Safe Deposit Box (SDB) Pembayaran Gaji (payroll) Referensi Bank

## Kantor Cabang

### Lokasi Cabang Wilayah Jakarta

No.	Kantor	Alamat	Telp
1.	KC Jatinegara	Jl. Jatinegara Timur No. 72 - Jakarta Timur 13310	(021) 850 5030, 850 5035, 819 0072, Fax. (021) 859 01568 850 9959, 8590 3050
2.	KC Mangga Dua	Ruko Agung Sedayu (Harco Mg. Dua) Blok E No. 26, Jl. Mangga Dua Raya-Jakarta 10730	(021) 612 3758-9, 612 3761-2, Fax. (021) 612 3763
3.	KC Samanhudi	Komp. Perkantoran Mitra Krekot, Jl. KH Samanhudi No. 21 - Jakarta 10710	(021) 386 6457-9, 380 7770-1, Fax. (021) 384 5802
4.	KC Sunter	Komp. Ruko Jl. Mitra Sunter Boulevard, Blok A Kav.10 Sunter - Jakarta 14350	(021) 658 37724, 658 37725, 658 37726, Fax. (021) 658 37727
5.	KCP Kenari	Komp. Pasar Kenari Baru Ex. Pegadaian Kios A 18-19, Jl. Salemba Raya No. 02 - Jakarta 10430	(021) 391 4404-5, Fax. (021) 391 4475
6.	KCP Kelapa Gading	Jl. Boulevard Raya Blok WD 2/3, Kelapa Gading -Jakarta 14240	(021) 4587 9429, 4587 9430, Fax. (021) 4587 9433
7.	ULS Pasar Tanah Abang - BCA KCP Pasar Tanah Abang	BCA KCP Tanah Abang Blok B Gedung Pasar Tanah Abang Blok B Lt 5, Kios No. 3, 5, 6 Jl. Fachrudin No. 78, 80, 82 Jakarta Pusat	(021) 2357 1292
8.	ULS Metro Pondok Indah - BCA KCP Metro Pondok Indah	Jl. Metro Pondok Indah UA No. 60-61 - Jakarta 12310	(021) 769 3823
9.	ULS Pasar Minggu BCA KCP Pasar Minggu	Jl. Raya Pasar Minggu No.6 Jakarta Selatan 12740	(021) 791 8 8703
10.	ULS Tanjung Priok BCA KCU Tanjung Priok	Jl. Enggano 22-23, Jakarta Utara 14310	(021) 4393 7937

11.	ULS Gudang Peluru BCA KCP Gudang Peluru	Komp. Gudang Peluru Blok A No. 23 Jl. Kampung Melayu Besar Jakarta 12830	(021) 8370 6303
12.	ULS Melawai BCA KCP Melawai	Jl. Melawai Raya 165 Blok C1-3- Jakarta 12160	(021)7278 0409
13.	ULS Kemang Mansion- BCA KCP Kemang Mansion	Shopping Arcade The Mansion At Kemang, Jl. Kemang Raya No.3-5 Jakarta Selatan	(021) 290 55560

### Lokasi Cabang Wilayah Bekasi

No.	Kantor	Alamat	Telp.
14.	KCP Bekasi	Komp. Pertokoan Pratama Plaza, Blok A 4/12, Jl. Ir. H. Juanda No. 151 Bekasi - Jawa Barat 17111	(021) 880 3011-2, 881 1973, Fax. (021) 881 1972
15.	KCP BUR Pasar Kranji	JL. Raya Pemuda Rt 005/Rw 004, Kecamatan Bekasi Barat 17135	(021) 8866932, 88952463, 88953003, Fax. (021)-8866932
16.	ULS Juanda Bekasi	BCA KCP Juanda Bekasi Jl. Ir. H. Juanda no. 54, Bekasi 17113	(021) 8834 3599

### Lokasi Cabang Wilayah Bogor

No.	Kantor	Alamat	Telp.
17.	ULS Bogor - BCA KCU Bogor	Jl. Ir H. Juanda No. 28 Bogor - Jawa Barat 16122	(0251) 832 7255
18.	KCP BUR Pasar Anyar - Bogor	Ruko Taman Topi Square Jl.Kapten Muslimat RT 03/Rw 01 Kelurahan Paledang , Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122	(0251) 8392942, 8338377, Fax. (0251) 8338377

## Kantor Cabang

### Lokasi Cabang Wilayah Depok

No.	Kantor	Alamat	Telp
19.	ULS Depok - BCA KCU Margonda	Jl. Margonda Raya No.182 Depok - Jawa Barat 16423	(021) 7721 8192
20.	ULS Cimanggis - BCA KCU Cimanggis	Jl. Raya Bogor Km.29 Cimanggis -Cibinong 16951	(021) 87719758

### Lokasi Cabang Wilayah Tangerang

No.	Kantor	Alamat	Telp
21.	ULS Tangerang - BCA KCU Tangerang	Jl. Kisamaun No. 57 Tangerang - Banten 15118	(021) 5577 0024
22.	KCP BUR Ciledug - Tangerang	Ruko Dian Plaza Jl. Raden Patah No. 8A Ruko No. 12A, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang 15151	(021) 73451916, 73451976, Fax. (021) 73451976

### Lokasi Cabang Wilayah Surabaya

No.	Kantor	Alamat	Telp
23.	KC Surabaya	Jl. Mayjend. Sungkono, Komplek Pertokoan Darmo Park I Blok 2-A/1, Surabaya 60256	(031) 505 3716, 505 3717, 505 3731, Fax. (031) 505 3738
24.	ULS Darmo - BCA KCU Darmo	Jl. Raya Darmo 5, Surabaya -Jawa Timur 60265	(031) 567 8137
25.	ULS Veteran - BCA KCU Veteran	Jl. Veteran No. 18-24, Surabaya - Jawa Timur 60175	(031) 357 2956
26.	ULS Sidoarjo- BCA KCU Sidoarjo	Jl. Ahmad Yani 39 A, Sidoarjo 61212	(031) 896 8805
27.	ULS Kapas Krampung - BCA KCP Kapas Krampung	Jl. Kapas Krampung 126,126 A-B	(031) 504 7946

28.	ULS Pondok Tjandra BCA KCP Pondok Chandra	Komp. Pertokoan Pondok Chandra, Jl. Palem TC-9, Surabaya	(031) 867 5613
29.	ULS Sepanjang BCA KCP Sepanjang	Taman Sepanjang, Jl. Raya Wonocolo No.46 A, Sidoarjo	(031) 788 7183
30.	ULS Perak Barat BCA KCP Perak Barat	Jl Perak Barat 267, Surabaya 60165	(031) 32823333
31.	ULS Gedangan BCA KCP Gedangan	Jl. Raya 18 Gedangan, Sidoarjo 61254	(031) 855 6993
32.	ULS Gresik BCA KCP Gresik	Jl. R.A. Kartini 98 B 100, Gresik 61122	(031) 397 6869

### Lokasi Cabang Wilayah Semarang

No.	Kantor	Alamat	Telp
33.	KC Semarang	Jl Pemuda 90 - 92 Semarang	(024) 70852985, 70852941, 3580530, 3557444, 3557234, 3557918, 3559779, Fax. (024) 3580391
34.	ULS Majapahit	Jl. Majapahit 112, Semarang 50161	(024) 765 84661

# Laporan Keuangan





Intiland Tower Annex 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 32  
Jakarta 10220  
INDONESIA

Telephone : 021 5708084, 57851420  
Facsimile : 021 5708085, 57851452  
E-mail : [au@abubakar-usman.com](mailto:au@abubakar-usman.com)  
[info@abubakar-usman.com](mailto:info@abubakar-usman.com)

Jl. Abdurahman Saleh No. 40, 2<sup>nd</sup> Fl  
Bandung 40174  
Tel/Fax : 022 6004663



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PT BANK BCA SYARIAH  
31 DESEMBER 2013 dan 2012**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yana Rosiana  
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310  
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : John Kosasih  
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310  
Jabatan : Wakil Presiden Direktur

Laporan Keuangan

**PT. BANK BCA SYARIAH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2013 dan 2012

Beserta Laporan Auditor Independen

menyatakan bahwa :

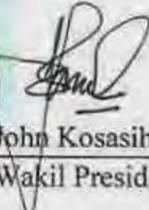
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah ;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2014

PT. Bank BCA Syariah

  
Yana Rosiana  
Presiden Direktur

  
John Kosasih  
Wakil Presiden Direktur





Intiland Tower Annexe 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 32  
Jakarta 10220  
INDONESIA

Tel : (021) 3156385, 5708084  
Fax : (021) 3156384, 5708085  
E-mail : [au@abubakar-usman.com](mailto:au@abubakar-usman.com)  
[info@abubakar-usman.com](mailto:info@abubakar-usman.com)

Jl. Abdurahman Saleh No. 40, 2<sup>nd</sup> Floor  
Bandung 40174  
Tel / Fax : (022) 6004663



Intiland Tower Annexe 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 32  
Jakarta 10220  
INDONESIA

Tel : (021) 3156385, 5708084  
Fax : (021) 3156384, 5708085  
E-mail : [au@abubakar-usman.com](mailto:au@abubakar-usman.com)  
[info@abubakar-usman.com](mailto:info@abubakar-usman.com)

Jl. Abdurahman Saleh No. 40, 2<sup>nd</sup> Floor  
Bandung 40174  
Tel / Fax : (022) 6004663

No. CUR - 006

## Laporan Auditor Independen

Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham  
PT Bank BCA Syariah

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan terlampir PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan, berdasarkan Surat Dewan Pengawas (DPS) kepada Direktur Utama Bank No. 002/DPS/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dan No. 001/DPS/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014, DPS menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kantor Akuntan Publik  
Abubakar Usman dan Rekan

Drs. Chris Utomo, CPA  
AP. 0530

Jakarta, 17 Januari 2014

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>Surat Pernyataan Direksi</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 3
Laporan Laba Rugi Komprehensif .....	4 - 5
Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
Laporan Arus Kas .....	7 - 8
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil .....	9
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat .....	10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	11
<b>Catatan atas Laporan Keuangan</b> .....	12 - 66

<b>ASET</b>	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>KAS</b>	4	7.161.439.050	5.895.781.300
<b>GIRO DAN PENEMPATAN</b>			
<b>PADA BANK INDONESIA</b>	2e, 5	334.098.477.408	316.780.352.755
<b>PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>	2b, 2f, 6		
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.530.991.804 dan Rp 514.825.934 pada 31 Desember 2013 dan 2012)</i>		151.568.188.598	50.967.767.480
<b>INVESTASI PADA SURAT BERHARGA</b>	2c, 2d, 2g, 7	107.063.255.286	206.886.469.358
Penyisihan Kerugian		(1.502.388.000)	(2.159.110.897)
<b>Bersih</b>		<b>105.560.867.286</b>	<b>204.727.358.461</b>
<b>PIUTANG</b>	2b, 2c, 2h, 8, 33		
<b>Murabahah</b>			
<i>(setelah dikurangi pendapatan margin yang ditanggihkan sebesar Rp 174.603.951.145 dan Rp 93.827.560.784 pada 31 Desember 2013 dan 2012)</i>		606.671.033.444	439.943.114.621
Penyisihan Kerugian		(9.248.767.079)	(4.889.395.229)
<b>Jumlah Piutang Murabahah</b>		<b>597.422.266.365</b>	<b>435.053.719.392</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Mudharabah	2b, 2c, 2i, 9, 33	203.905.722.441	126.023.572.198
Penyisihan Kerugian		(2.039.057.224)	(1.260.235.722)
<b>Jumlah Pembiayaan Mudharabah Bersih</b>		<b>201.866.665.217</b>	<b>124.763.336.476</b>
Musyarakah	2b, 2c, 2i, 10, 33	537.035.868.009	341.829.115.238
Penyisihan Kerugian		(4.493.608.680)	(2.211.741.152)
<b>Jumlah Pembiayaan Musyarakah Bersih</b>		<b>532.542.259.329</b>	<b>339.617.374.086</b>
Qardh		235.476.877	45.691.662
Penyisihan Kerugian		(8.874.769)	(456.917)
<b>Jumlah Pembiayaan Qardh Bersih</b>		<b>226.602.108</b>	<b>45.234.745</b>
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b>741.177.067.327</b>	<b>467.898.379.098</b>
<b>Jumlah Penyisihan Kerugian</b>		<b>(6.541.540.673)</b>	<b>(3.472.433.791)</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Bersih</b>		<b>734.635.526.654</b>	<b>464.425.945.307</b>
<b>ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH</b>	2j, 11		
Nilai Perolehan		111.819.450.518	162.149.634.961
Akumulasi Penyusutan		(38.043.331.706)	(62.254.060.654)
<b>Nilai Aset Ijarah Bersih</b>		<b>73.776.118.812</b>	<b>99.895.574.307</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

<b>ASET</b>	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>ASET TETAP</b>	2k, 12		
Nilai Perolehan		29.424.980.658	20.893.828.286
Akumulasi Penyusutan		(10.866.676.931)	(14.127.451.200)
<b>Nilai Buku</b>		<b>18.558.303.727</b>	<b>6.766.377.086</b>
<b>ASET LAIN</b>			
Aset Tak Berwujud		10.519.655	-
Aset Pajak Tangguhan	2t, 16d	7.497.301.649	6.551.711.281
Aset Lain-lain	2l, 2t, 13	11.129.838.069	11.116.402.336
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.041.418.847.273</b>	<b>1.602.180.989.705</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN SEGERA</b>	14	5.823.672.012	1.161.069.647
<b>SIMPANAN</b>	2b, 2m, 15, 33		
Giro Wadiah		144.689.142.605	145.372.224.544
Tabungan Wadiah		105.766.726.553	89.585.487.657
<b>Jumlah Simpanan</b>		<b>250.455.869.158</b>	<b>234.957.712.201</b>
<b>PEMBIAYAAN DITERIMA</b>		1.033.666.664	104.103.750
<b>HUTANG PAJAK</b>	2t, 16a	3.248.368.159	2.587.189.906
<b>ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI</b>	2c, 17	-	-
<b>KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>	2t, 2u, 18	14.438.426.378	17.983.801.887
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>275.000.002.371</b>	<b>256.793.877.391</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2b, 2n, 19, 33		
Investasi Tidak Terikat			
Dari Bukan Bank			
Tabungan Mudharabah		43.779.574.003	43.464.280.823
Deposito Mudharabah		1.409.122.329.322	985.546.973.893
Dari Bank			
Deposito Mudharabah		-	12.000.000.000
Investasi Terikat			
Dari Bukan Bank			
Deposito Mudharabah		-	-
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		<b>1.452.901.903.325</b>	<b>1.041.011.254.716</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Saham - nilai nominal			
Rp 1.000.000 per saham	20		
Modal Dasar - 950.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 296.300 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012		296.300.000.000	296.300.000.000
Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga tersedia untuk dijual		(14.442.338.585)	(10.882.399.684)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	21	750.000.000	450.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya		30.909.280.162	18.508.257.282
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>313.516.941.577</b>	<b>304.375.857.598</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>		<b>2.041.418.847.273</b>	<b>1.602.180.989.705</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA</b>			
<b>OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>			
Pendapatan dari Jual Beli:			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	2o, 22	54.141.514.888	41.809.282.107
Pendapatan dari Sewa:			
Pendapatan Bersih <i>Ijarah</i>		7.769.285.321	14.204.578.437
Pendapatan dari Bagi Hasil:			
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		16.080.323.315	8.970.110.038
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		47.934.431.412	22.734.805.867
Jumlah Pendapatan		125.925.554.936	87.718.776.449
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	2p, 22	29.161.500.750	29.267.193.649
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>		<b>155.087.055.686</b>	<b>116.985.970.098</b>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2q, 23	(74.471.907.789)	(50.363.263.100)
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>		<b>80.615.147.897</b>	<b>66.622.706.998</b>
<b>KEGIATAN KONVENSIONAL</b>			
Pendapatan Bunga	2r	-	-
Pendapatan Provisi dan Komisi		-	-
		-	-
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>			
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	2s, 24	15.211.733.187	14.463.656.383
Pendapatan Imbalan Investasi Terikat		-	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		15.211.733.187	14.463.656.383

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Tenaga Kerja	25	40.682.976.814	39.038.795.029
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	26	15.551.142.023	8.498.273.512
Beban Umum dan Administrasi	27	17.505.946.980	18.141.535.336
Beban Usaha Lain:			
Beban Bonus Simpanan Wadiah		2.938.230.158	2.428.453.528
Premi Penjaminan Pemerintah	32	2.587.180.473	1.935.039.975
Jumlah Beban Usaha		79.265.476.448	70.042.097.380
<b>LABA USAHA</b>		<b>16.561.404.636</b>	<b>11.044.266.001</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>	28		
Pendapatan Non Usaha		410.174.446	39.119.587
Beban Non Usaha		(210.678.021)	(122.607.573)
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Usaha		199.496.425	(83.487.986)
<b>LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>16.760.901.061</b>	<b>10.960.778.015</b>
<b>ZAKAT</b>		-	-
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>16.760.901.061</b>	<b>10.960.778.015</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	2s, 16b		
Kini		(3.818.822.250)	(2.821.957.500)
Tangguhan		(241.055.931)	221.105.014
<b>LABA BERSIH</b>		<b>12.701.022.880</b>	<b>8.359.925.529</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh		Keuntungan Bersih yang Belum Dircalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual		Saldo laba dari Kegiatan Syariah		Jumlah Ekuitas
	Rp		Rp		Rp		
			Belum Ditetapkan Penggunaannya	Sudah Ditetapkan Penggunaannya			
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2011</b>	296.300.000.000	4.476.156.319	10.348.331.753	250.000.000	311.374.488.072		
Penambahan Modal Disetor	-	-	(200.000.000)	200.000.000	-		
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	-	-	8.359.925.529	-	8.359.925.529		
Keuntungan Bersih yang Belum Dircalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	-	(15.358.556.003)	-	-	(15.358.556.003)		
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2012</b>	296.300.000.000	(10.882.399.684)	18.508.257.282	450.000.000	304.375.857.598		
Penambahan Modal Disetor	-	-	(300.000.000)	300.000.000	-		
Laba Bersih Selama Tahun Berjalan	-	-	12.701.022.880	-	12.701.022.880		
Keuntungan Bersih yang Belum Dircalisasi atas Surat-surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual	-	(3.559.938.901)	-	-	(3.559.938.901)		
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2013</b>	296.300.000.000	(14.442.338.585)	30.909.280.162	750.000.000	313.516.941.577		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH**

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil,		
Jual Beli, Sewa dan Usaha Utama Lainnya	126.584.385.440	87.718.776.446
Pembayaran Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(71.991.721.998)	(52.298.303.074)
Penerimaan Pendapatan Usaha Lainnya	28.987.765.884	36.750.690.713
Pembayaran Beban Karyawan	(37.776.172.690)	(39.038.795.029)
Pembayaran Beban Usaha selain		
Beban Karyawan	(16.531.808.419)	(37.390.374.709)
Pembayaran Pajak	(3.227.154.955)	(2.821.957.500)
Pembayaran Zakat	(10.000.000)	-
Penyaluran Dana Kebajikan	(116.907.701)	(1.133.780)
Penerimaan Pendapatan Non-Usaha	239.877.553	(83.487.984)
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia	5.300.000.000	(20.200.000.000)
Surat Berharga	-	20.696.967.801
Piutang	(166.865.543.798)	(98.326.562.187)
Pembiayaan Mudharabah	(77.882.150.243)	(111.853.158.733)
Pembiayaan Musyarakah	(195.206.752.771)	(145.841.173.898)
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah	26.236.673.577	32.539.155.298
Pinjaman Qardh	(189.785.215)	(18.933.746)
Aset Lain-lain	(1.180.648.665)	4.624.160.515
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi:		
Kewajiban Segera	6.497.938.187	(3.039.060.655)
Simpanan	3.498.156.958	85.565.493.376
Hutang Pajak	(36.801.245)	(4.456.179.861)
Estimasi Kerugian	-	(692.496)
Kewajiban Lain-lain	(7.223.229.539)	3.805.632.536
Kenaikan (Penurunan) Dana Syirkah Temporer		
Investasi Terikat	-	(10.238.000.000)
Investasi Tidak Terikat	423.890.648.610	315.742.186.148
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>42.996.768.970</b>	<b>61.835.249.181</b>
<b>ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pencairan (Pembelian) Efek Tersedia untuk Dijual dan		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	95.018.660.168	-
Investasi pada Bank Indonesia	-	-
Penambahan/Reklasifikasi Aset Tetap	(13.614.919.553)	(2.442.312.741)
Hasil Penjualan Aset Tetap	170.296.892	2.796.167.908
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>81.574.037.507</b>	<b>353.855.167</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	<u>31 Desember 2013</u> Rp	<u>31 Desember 2012</u> Rp
<b>ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembiayaan yang Diterima	929.562.914	(416.415.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<b>929.562.914</b>	<b>(416.415.000)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>125.500.369.391</b>	<b>61.772.689.348</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN</b>	<b>116.158.727.469</b>	<b>54.386.038.121</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN</b>	<b><u>241.659.096.860</u></b>	<b><u>116.158.727.469</u></b>
<b>Kas dan Setara Kas Terdiri dari:</b>		
Kas	7.161.439.050	5.895.781.300
Giro pada Bank Indonesia	81.398.477.408	58.780.352.755
Penempatan Pada Bank Lain	153.099.180.402	51.482.593.414
<b>Jumlah</b>	<b><u>241.659.096.860</u></b>	<b><u>116.158.727.469</u></b>
<b>Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas</b>		
Cadangan Umum	300.000.000	200.000.000

**PT BANK BCA SYARIAH****LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	<u>31 Desember 2013</u> Rp	<u>31 Desember 2012</u> Rp
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)</b>	22	155.087.055.686	116.985.970.098
<b>PENGURANG :</b>			
<b>Pendapatan Tahun Berjalan yang Kas atau Setara Kasnya belum Diterima:</b>			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		(793.560.826)	(557.890.271)
Pendapatan Sewa		71.805.771	7.491.693
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS		(2.001.928.132)	(3.834.740.681)
<b>Jumlah Pengurang</b>		<b><u>(2.723.683.187)</u></b>	<b><u>(4.385.139.259)</u></b>
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK DIBAGI HASIL</b>		<b><u>152.363.372.499</u></b>	<b><u>112.600.830.839</u></b>
<b>BAGI HASIL YANG MENJADI HAK BANK</b>		<b>77.891.464.710</b>	<b>62.237.567.739</b>
<b>BAGI HASIL YANG MENJADI HAK PEMILIK DANA</b>		<b><u>74.471.907.789</u></b>	<b><u>50.363.263.100</u></b>
<b>Dirinci atas:</b>			
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang sudah di Disitribusikan		71.596.838.305	48.578.729.998
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang belum di Disitribusikan		2.875.069.484	1.784.533.102

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**PT BANK BCA SYARIAH****LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari Bank Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	25.626.416	26.470.596
Jumlah Sumber Dana Zakat	25.626.416	26.470.596
<b>PENGGUNAAN DANA ZAKAT</b>		
Fakir	10.000.000	9.433.286
Miskin	-	-
Amil	-	-
Muallaf	-	-
Orang yang Terlilit Hutang (Gharim)	-	-
Riqab	-	-
Fisabilillah	-	-
Orang yang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil)	-	-
Jumlah Penggunaan Dana	10.000.000	9.433.286
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA ZAKAT</b>	15.626.416	17.037.310
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	26.470.597	9.433.287
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	42.097.013	26.470.597

**PT BANK BCA SYARIAH****LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Infak Zakat dari dalam Bank Syariah	3.912.979	819.946
Sedekah	35.235	-
Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
Denda	413.524.067	478.694.077
Pendapatan Non-halal	881.705	1.423.884
Lainnya	-	-
	418.353.986	480.937.907
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Dana Kebajikan Produktif	-	-
Sumbangan	(116.907.701)	-
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	-	(79.629.976)
	(116.907.701)	(79.629.976)
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN</b>	301.446.285	401.307.931
<b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	736.785.443	335.477.512
<b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	1.038.231.728	736.785.443

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

## 1. Umum

### 1.a. Pendirian Bank

PT Bank BCA Syariah ("Bank") didirikan dengan nama PT Utama International Bank berdasarkan Akta No. 91 tanggal 21 Mei 1991 dari Notaris Buniarti Tjandra, SH. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 tanggal 31 Juli 1991. Melalui akta perubahan No. 96 tanggal 22 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH, telah dilakukan perubahan nama PT Utama International Bank menjadi PT Bank UIB. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1497.HT.01.04.97 juncto Berita Negara No. 61 tanggal 1 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Komposisi kepemilikan Bank setelah akuisisi telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH.,M.Si., Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 16 Desember 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan terakhir komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No.223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Bank UIB, sesuai dengan Akta Notaris Pudji Redjeki Irawati, SH No. 49 tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP/GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Pudji Redjeki Irawati, SH., No. 73 tanggal 21 Oktober 2010, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-30741 tanggal 10 Desember 2010.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Raya Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur. Pada tahun 2013, Bank beroperasi melalui 6 Kantor Cabang Utama (KCU), 6 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 22 Unit Layanan Syariah (ULS) dan 5 Bina Usaha Rakyat (BUR).

## 1. Umum - lanjutan

### 1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Mei 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/100/Kep.GBI/DpG/2013/Rahasia, susunan dewan komisaris dan direksi bank pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, adalah sebagai berikut :

31 Desember 2013

#### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Iwan Kusumobagio  
Komisaris Independen : Surja Widjaja  
Komisaris Independen : Suyanto Sutjiadi

#### Direksi

Presiden Direktur : Hj. Yana Rosiana  
Wakil Presiden Direktur : John Kosasih  
Direktur Kepatuhan : Tantri Indrawati

#### Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil  
Anggota DPS : Dr. H. Muhammad Masyhuri Naim

31 Desember 2012

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Iwan Kusumobagio  
Komisaris : Surja Widjaja  
Komisaris : Drs. H. Suhartono, MM

#### Direksi

Direktur Utama : Hj. Yana Rosiana  
Direktur : John Kosasih  
Direktur Kepatuhan : Tantri Indrawati

#### Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil  
Anggota DPS : Dr. H. Muhammad Masyhuri Naim

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013

#### Komite Audit

Ketua : Surja Widjaja  
Anggota : Ridwan Masui  
Anggota : Sutedjo Prihatono

**1. Umum - lanjutan**

**1.b. Dewan Komisaris dan Direksi**

**Komite Pemantau Risiko**

Ketua : Suyanto Sutjiadi  
 Anggota : Riyo Sigid Wisaksono  
 Anggota : Sutedjo Prihatono

**Komite Remunerasi**

Ketua : Surja Widjaja  
 Anggota : Iwan Kusumobagio  
 Anggota : Suyanto Sutjiadi  
 Anggota : Endang Ruslina

31 Desember 2012

**Komite Audit**

Ketua : Surja Widjaja  
 Anggota : Ridwan Masui  
 Anggota : Sutedjo Prihatono

**Komite Pemantau Risiko**

Ketua : H. Suhartono  
 Anggota : Rio Sigid Wisaksono  
 Anggota : Sutedjo Prihatono

**Komite Remunerasi**

Ketua : Surja Widjaja  
 Anggota : Iwan Kusumobagio  
 Anggota : Drs. H. Suhartono, MM  
 Anggota : Endang Ruslina

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Direksi	5.927.500.000	5.646.011.476
Dewan Komisaris	1.237.500.000	1.238.844.000
Dewan Pengawas Syariah	709.375.001	431.492.000
	<b>7.874.375.001</b>	<b>7.316.347.476</b>

**1. Umum - lanjutan**

**1.b. Dewan Komisaris dan Direksi**

Bank mempunyai 447 dan 393 karyawan tetap dan kontrak pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 (tidak diaudit).

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

**2.a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali tagihan imbal hasil atas aset produktif yang digolongkan sebagai non-performing dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, serta konsep biaya historis, kecuali efek-efek tertentu disajikan sebesar nilai wajar (2.f), agunan yang diambil alih yang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106, "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107, "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah", dan PSAK No. 110, "Akuntansi Suku" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diterbitkan atas kerjasama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Bank Indonesia. Berdasarkan PSAK No. 101 (revisi 2011), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- (i). Laporan Posisi Keuangan;
- (ii). Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- (iii). Laporan Perubahan Ekuitas;
- (iv). Laporan Arus Kas;
- (v). Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- (vi). Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- (vii). Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- (viii) Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

### **2.a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan**

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Mulai tahun 2012, Bank tidak memiliki pengelolaan investasi terikat. Pada tahun 2011, Bank memulai aktivitas fungsi penyaluran dana zakat, serta dana kebajikan. Oleh karenanya, Bank membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

### **2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Bank menerapkan PSAK No. 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Bank telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi untuk memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi :

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan**

### **2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi - lanjutan**

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) .
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

### **2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sukuk, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), surat berharga, piutang dan pembiayaan yang diberikan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.

Penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah".

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan

### 2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah minimum penyisihan kerugian aset produktif, aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dihitung dengan memperhatikan PBI tersebut tersebut di atas.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi disajikan dalam bagian Kewajiban di laporan posisi keuangan.

Pembentukan penyisihan minimum sesuai dengan PBI tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk aset produktif, penyisihan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, kecuali untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito berjangka, tabungan, setoran jaminan, emas. Penyisihan umum untuk aset produktif syariah sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
2. Penyisihan khusus, sekurang - kurangnya sebesar :

Klasifikasi	Persentase Minimum Penyisihan Kerugian
Dalam Perhatian Khusus	5%
Kurang Lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase penyisihan penghapusan aset produktif di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar, yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting - lanjutan

### 2.c. Penyisihan Penghapusan Aset serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi - lanjutan

Untuk aset produktif syariah, nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi terdiri atas giro dan/atau tabungan *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan dan/atau deposito *mudharabah*, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah paling tinggi sebesar 100%, surat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 50%, persentase tertentu dari tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, dan persediaan yang tidak melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dan penilaian untuk plafond pembiayaan di atas Rp 5 miliar dilakukan oleh penilaian independen.

### 2.d. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 55 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

### 2.e. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

### 2.f. Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai kewajiban Bank (titipan dana non halal).

### 2.g. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### 2.g. Investasi pada Surat Berharga - lanjutan

Investasi pada surat berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" sebagai berikut:

1. Dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak tangguhan, diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada saat realisasi pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan; dan
3. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan. Atas penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, perbedaan antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana surat berharga tersebut dijual.

Nilai wajar investasi ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga.

### 2.h. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna* dan/atau akad *ijarah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditanggihkan" yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad *ijarah* dengan perjanjian adanya pemindahan kepemilikan aset yang di-*ijarah*-kan pada saat tertentu.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.h. Piutang - lanjutan

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (i). hibah;
- (ii). penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii). penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv). penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni sebesar saldo piutang.

### 2.i. Pembiayaan

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Jika pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat rusak, hilang atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank dengan membentuk penyisihan kerugian. Jika pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

*Akad musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

*Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

*Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.j. Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah

Aset yang Diperoleh Untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

### 2.k. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Pada tahun 2008, sesuai dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2009) mengenai Aset Tetap, Bank memilih model biaya perolehan untuk pengukuran aset tetapnya.

Kecuali tanah, semua aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut:

Jenis	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	20
Inventaris Kantor I	4
Inventaris Kantor II	4
Kendaraan Bermotor	4

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-*review*, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Sesuai PSAK No. 48 tentang "Akuntansi Penurunan Nilai Aktiva", Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban periode berjalan.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun aset lain-lain, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

### 2.m. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban pada nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan dana yang dipercayakan nasabah kepada bank, dan tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk apa pun.

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan Bank. Simpanan dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar kewajiban Bank.

### 2.n. Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib/Bank*) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Hubungan antara Bank dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*, dan akun lain yang sejenis.

- Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib/Bank*) dalam pengelolaan investasinya.
- Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.o. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual beli transaksi *murabahah*, pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tengguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan Bank adalah sebagai berikut:

1. Metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad:
  - a) Untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh satu tahun.
  - b) Untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan/atau beban pengelolaan piutang tersebut relatif kecil.
2. Metode proporsional sesuai jangka waktu akad untuk *murabahah* dengan pembayaran tengguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan/atau beban pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif kecil.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *Non Performing*.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

### 2.p. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*).

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.q. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dihitung dari pendapatan bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *Mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

### 2.r. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan atau tidak untuk suatu jangka waktu tertentu, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Terpenting - lanjutan

### 2.s. Taksiran Pajak Penghasilan

Bank menghitung pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu tarif pajak yang telah berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

### 2.t. Imbalan Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mewajibkan Bank untuk membayar imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, bilamana ketentuan dalam undang-undang terpenuhi.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja karyawan.

Penerapan awal PSAK No. 24 Revisi dilakukan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah penyesuaian yang terjadi yang terkait dengan periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba dari periode komparatif terawal yang disajikan.

### 2.u. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, kewajiban, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

## 3. Kebijakan Konversi Produk Bank Konvensional

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Bank memulai kegiatan usaha secara syariah pada tanggal 5 April 2010 dan Bank wajib menyelesaikan seluruh kegiatan seluruh hak dan kewajiban nasabah dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, disebutkan bahwa bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai bank syariah.

Kebijakan konversi produk pembiayaan bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Masa konversi produk pembiayaan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal efektif Bank mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menjadi bank syariah.
2. Memberitahukan rencana konversi secara tertulis kepada seluruh debitur.
3. Kredit yang telah ada, dikonversi menjadi pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil *mudharabah/musyarakah/murabahah/ijarah* tergantung kesesuaian produknya.
4. Pinjaman rekening koran yang tidak dikonversi harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Selama belum dikonversi, kredit yang telah ada akan tetap sebagai kredit konvensional sampai batas waktu transisi maksimum 1 (satu) tahun hari sejak tanggal Bank mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menjadi bank syariah.

Sedangkan kebijakan konversi dana pihak ketiga dari produk bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan rencana konversi dan tahapan-tahapan konversi secara tertulis kepada seluruh nasabah.
2. Giro dikelola berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.
3. Tabungan dan deposito berjangka dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*.
4. Memberikan nisbah/bagi hasil pada masa-masa awal setelah konversi kepada seluruh nasabah.

Konversi mulai dilaksanakan pada tanggal 3 April 2010. Bagi nasabah dan debitur yang tidak setuju dikonversi akan dilakukan penyelesaian seketika atau secara bertahap.

Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah Bank, terhadap aset dan portofolio yang masih menggunakan perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah dan belum dapat dikonversikan karena adanya hal-hal yang tidak dapat dihindari, maka kondisi tersebut dianggap darurat.

Sampai dengan 31 Desember 2011, bank telah berhasil mengkonversi seluruh produk konvensional ke dalam produk bank syariah.

**4. Kas**

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Kas	7.161.439.050	5.895.781.300
<b>Jumlah</b>	<b>7.161.439.050</b>	<b>5.895.781.300</b>

**5. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia**

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Giro		
Giro <i>Wadiah</i>	81.398.477.408	58.780.352.755
Jumlah	81.398.477.408	58.780.352.755
Penempatan pada Bank Indonesia		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	252.700.000.000	258.000.000.000
Jumlah	252.700.000.000	258.000.000.000
<b>Jumlah Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia</b>	<b>334.098.477.408</b>	<b>316.780.352.755</b>

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia berupa GWM Utama dalam Rupiah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/25PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) Utama dalam Rupiah sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah. Sementara menurut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing bahwa GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

**5. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia - lanjutan**

Persentase GWM pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah :

	31 Desember 2013 (%)	31 Desember 2012 (%)
Rupiah		
Primer	5,00%	5,00%
Sekunder	2,50%	2,50%

Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia Syariah (FASBIS) per 31 Desember 2013 memperoleh bonus per tahun berkisar antara 5,75% sampai dengan 4,5%, yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo.

Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia Syariah (FASBIS) per 31 Desember 2012 memperoleh bonus per tahun berkisar antara 3,75% sampai dengan 4,5%, yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo.

**6. Penempatan pada Bank Lain**

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Giro		
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
<u>Bank Non Syariah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	3.099.180.402	1.482.593.414
Penyisihan Kerugian	(30.991.804)	(14.825.934)
	3.068.188.598	1.467.767.480
Deposito		
Pihak Ketiga		
<u>Bank Umum Syariah</u>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000
PT Bank BJB Syariah	50.000.000.000	-
PT Bank Victoria Syariah	30.000.000.000	-
PT Bank Panin Syariah	20.000.000.000	-
Penyisihan Kerugian	(1.500.000.000)	(500.000.000)
	148.500.000.000	49.500.000.000
	<b>151.568.188.598</b>	<b>50.967.767.480</b>

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	514.825.934	49.825.914
(Pemulihan)/ Pembentukan Penyisihan		
Kerugian Selama Satu Tahun	1.016.165.870	465.000.020
<b>Jumlah</b>	<b>1.530.991.804</b>	<b>514.825.934</b>

**7. Investasi Pada Surat Berharga**

a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Rupiah		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
<u>Lancar</u>		
Sukuk Korporasi	40.000.000.000	92.000.000.000
Surat Berharga Syariah Negara	8.000.000.000	32.000.000.000
Selisih nilai perolehan dan nominal yang belum diamortisasi	(49.119.900)	(62.261.030)
	47.950.880.100	123.937.738.970
Penyisihan Kerugian	(400.000.000)	(920.642.857)
Jumlah Surat Berharga yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	47.550.880.100	123.017.096.113
Tersedia Untuk Dijual		
<u>Lancar</u>		
Sukuk Korporasi	10.106.000.000	23.255.000.000
Surat Berharga Syariah Negara	48.262.826.632	54.203.596.632
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	(256.451.446)	4.490.133.756
	58.112.375.186	81.948.730.388
Penyisihan Kerugian	(102.388.000)	(238.468.040)
	58.009.987.186	81.710.262.348
<u>Macet</u>		
Sukuk Korporasi	20.000.000.000	20.000.000.000
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	(19.000.000.000)	(19.000.000.000)
	1.000.000.000	1.000.000.000
Penyisihan Kerugian	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
	-	-
Jumlah Surat Berharga yang Tersedia Untuk Dijual	58.009.987.186	81.710.262.348
<b>Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih</b>	<b>105.560.867.286</b>	<b>204.727.358.461</b>

**7. Investasi Pada Surat Berharga**

b. Berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Rupiah		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Kurang dari 1 Bulan	-	-
Kurang dari 1 Tahun	40.000.000.000	76.014.927.374
Lebih dari 1 Tahun	7.950.880.100	47.922.811.596
Tersedia Untuk Dijual		
Kurang dari 1 Bulan	-	-
Kurang dari 1 Tahun	10.238.800.000	19.369.414.854
Lebih dari 1 Tahun	47.873.575.186	62.829.315.534
Proses Restrukturisasi	1.000.000.000	750.000.000
	107.063.255.286	206.886.469.358
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(1.502.388.000)	(2.159.110.897)
<b>Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih</b>	<b>105.560.867.286</b>	<b>204.727.358.461</b>

c. Berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	Peringkat Rating		Jumlah	
	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Rupiah				
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
SBSN IFR 0003	-	-	7.950.880.100	7.922.811.596
SBSN IFR 0004	-	-	-	23.950.641.654
Sukuk Ijarah Indosat III	-	idAA+(Sy)	-	40.009.999.974
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung	-	idA+ (Sy)	-	12.054.285.746
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim	idAA+ <sub>(Sy)</sub>	idAA (Sy)	16.000.000.000	16.000.000.000
Sukuk Salim Ivomas Pratama	idAA <sub>(Sy)</sub>	idAA (Sy)	24.000.000.000	24.000.000.000
Jumlah Hingga Jatuh Tempo			47.950.880.100	123.937.738.970

**7. Investasi Pada Surat Berharga - lanjutan**

	Peringkat Rating		Jumlah	
	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Rupiah				
Tersedia Untuk Dijual				
SBSN IFR 0003	-	-	47.873.575.186	51.932.771.534
SBSN IFR 0004	-	-	-	6.169.154.854
Sukuk Salim Ivomas Pratama	idAA <sub>(Sy)</sub>	idAA (Sy)	6.150.000.000	6.417.000.000
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim	idAA <sub>(Sy)</sub>	idAA (Sy)	4.088.800.000	4.229.544.000
Sukuk BLTA Seri A	idD <sub>(Sy)</sub>	idD (Sy)	500.000.000	500.000.000
Sukuk BLTA Seri B	idD <sub>(Sy)</sub>	idD (Sy)	250.000.000	250.000.000
Sukuk BLTA Seri Th 2007	idD <sub>(Sy)</sub>	idD (Sy)	250.000.000	250.000.000
Sukuk Ijarah Indosat III	-	idAA+(Sy)	-	10.085.000.000
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung	-	idA+ (Sy)	-	3.115.260.000
Jumlah Tersedia Untuk Dijual			59.112.375.186	82.948.730.388
Jumlah			107.063.255.286	206.886.469.358
Dikurangi: Penyisihan Kerugian			(1.502.388.000)	(2.159.110.897)
<b>Jumlah Investasi Pada Surat Berharga</b>			<b>105.560.867.286</b>	<b>204.727.358.461</b>

Pada akhir Januari 2012, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mendapatkan gugatan pailit melalui Pengadilan Tinggi Niaga oleh para supplier dan pemegang surat berharganya. Dalam rencana/proposal damai yang diajukan oleh BLTA, memberikan opsi restrukturisasi pembayaran kupon obligasi/sukuk dan surat utang lainnya. Bank memiliki surat berharga syariah berjenis sukuk ijarah BLTA dengan total nilai obligasi sebesar Rp 20 Milyar pada akhir tahun 2011. Pada bulan Juni 2012 Bank mereklasifikasi seluruh surat berharga BLTA jenis dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Pada saat yang bersamaan Bank melakukan penilaian ulang atas seluruh portfolio surat berharga BLTA menjadi sebesar Rp 1 Milyar. Pada tanggal 25 Juli 2013, gugatan pailit yang terjadi di tahun 2012 dibatalkan oleh Pengadilan, dan para pemegang sukuk BLTA menyetujui rencana restrukturisasi yang diajukan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk, (BLTA).

Informasi peringkat diperoleh dari PT Peningkat Efek Indonesia (PT Pefindo), lembaga peneringkat yang diakui Bank Indonesia.

d. Perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	2.159.110.897	2.176.594.984
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	8.593.364	2.508.978.456
Pemulihan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	(665.316.261)	(2.526.462.543)
Jumlah	1.502.388.000	2.159.110.897

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

**8. Piutang**

**a. Berdasarkan Jenis**

	31 Desember 2013					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pihak Berelasi						
Murabahah	176.562.515	-	-	-	-	176.562.515
Sub Jumlah	176.562.515	-	-	-	-	176.562.515
Pihak Ketiga						
Murabahah	586.360.361.717	18.767.273.226	-	470.523.953	896.312.033	606.494.470.929
Sub Jumlah	586.360.361.717	18.767.273.226	-	470.523.953	896.312.033	606.494.470.929
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian	(6.858.175.174)	(1.023.755.919)	-	(470.523.953)	(896.312.033)	(9.248.767.079)
<b>Jumlah</b>	<b>579.678.749.058</b>	<b>17.743.517.307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597.422.266.365</b>
	31 Desember 2012					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pihak Berelasi						
Murabahah	28.580.900	-	-	-	-	28.580.900
Sub Jumlah	28.580.900	-	-	-	-	28.580.900
Pihak Ketiga						
Murabahah	430.819.506.628	8.515.933.525	-	-	579.093.567	439.914.533.720
Sub Jumlah	430.819.506.628	8.515.933.525	-	-	579.093.567	439.914.533.720
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian	(4.300.507.594)	(9.794.067)	-	-	(579.093.567)	(4.889.395.228)
<b>Jumlah</b>	<b>426.547.579.934</b>	<b>8.506.139.458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435.053.719.392</b>

8. Piutang - lanjutan

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2013					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdagangan, Restoran dan Hotel	161.213.449.858	-	-	-	-	161.213.449.858
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	107.065.079.819	17.352.867.123	-	-	-	124.417.946.942
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	99.627.088.285	-	-	-	-	99.627.088.285
Industri Pengolahan	36.952.966.999	-	-	-	-	36.952.966.999
Jasa-jasa Dunia Usaha	107.136.552.721	-	-	-	-	107.136.552.721
Konstruksi dan Real Estate	20.271.001.980	-	-	-	-	20.271.001.980
Jasa-jasa Sosial	206.171.835	-	-	-	-	206.171.835
Lain-lain	54.064.612.735	1.414.406.103	-	470.523.953	896.312.033	56.845.854.824
<b>Jumlah</b>	<b>586.536.924.232</b>	<b>18.767.273.226</b>	<b>-</b>	<b>470.523.953</b>	<b>896.312.033</b>	<b>606.671.033.444</b>
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian	(6.858.175.174)	(1.023.755.919)	-	(470.523.953)	(896.312.033)	(9.248.767.079)
<b>Jumlah</b>	<b>579.678.749.058</b>	<b>17.743.517.307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597.422.266.365</b>

	31 Desember 2012					
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	211.172.371.852	-	-	-	-	211.172.371.852
Jasa-jasa Dunia Usaha	69.497.755.010	7.758.313.989	-	-	-	77.256.068.999
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	53.967.832.261	-	-	-	-	53.967.832.261
Industri Pengolahan	24.556.051.841	-	-	-	-	24.556.051.841
Konstruksi dan Real Estate	2.840.000.394	-	-	-	-	2.840.000.394
Perdagangan, Restoran dan Hotel	1.733.274.728	-	-	-	579.093.567	2.312.368.295
Lain-lain	67.080.801.442	757.619.536	-	-	-	67.838.420.978
<b>Jumlah</b>	<b>430.848.087.528</b>	<b>8.515.933.525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>579.093.567</b>	<b>439.943.114.620</b>
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian	(4.300.507.594)	(9.794.067)	-	-	(579.093.567)	(4.889.395.228)
<b>Jumlah</b>	<b>426.547.579.934</b>	<b>8.506.139.458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435.053.719.392</b>

8. Piutang - lanjutan

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
<b>Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit:</b>		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	2.136.808.969	711.334.683
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	52.093.537.271	40.199.558.862
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	464.255.270.916	363.903.104.656
Lebih dari 5 Tahun	88.185.416.288	35.129.116.420
<b>Jumlah</b>	<b>606.671.033.444</b>	<b>439.943.114.621</b>
Penyisihan Kerugian	(9.248.767.079)	(4.889.395.229)
<b>Jumlah</b>	<b>597.422.266.365</b>	<b>435.053.719.392</b>

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
<b>Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo</b>		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	37.075.465.139	15.972.818.320
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	81.296.342.150	88.197.098.341
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	404.854.354.459	313.802.965.625
Lebih dari 5 Tahun	83.444.871.696	21.970.232.335
<b>Jumlah</b>	<b>606.671.033.444</b>	<b>439.943.114.621</b>
Penyisihan Kerugian	(9.248.767.079)	(4.889.395.229)
<b>Jumlah</b>	<b>597.422.266.365</b>	<b>435.053.719.392</b>

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Murabahah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	4.889.395.229	3.877.783.831
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	7.937.243.513	1.923.483.033
Pemulihan Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(3.577.871.663)	(911.871.635)
<b>Jumlah</b>	<b>9.248.767.079</b>	<b>4.889.395.229</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang *murabahah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

f. Informasi Penting Lainnya:

- Piutang *murabahah* kepada pihak berelasi yaitu pejabat eksekutif Bank masing-masing sebesar Rp 176.562.515 dan Rp 28.580.899 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Piutang ini dipergunakan untuk membeli kendaraan dengan jangka waktu antara 5 (lima) tahun diangsur dengan cara pemotongan gaji setiap bulan.
- Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atas surat kuasa memasang hak tanggungan atas surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan pembiayaan disajikan pada catatan 19 b.

8. Piutang - lanjutan

f. Informasi Penting Lainnya - lanjutan:

- (iii). Tingkat margin keuntungan piutang untuk murabahah berkisar antara sebesar 7,75% - 17% dan 10,5% - 16% per tahun pada tahun 2013 dan 2012.  
 (iv). Tidak ada piutang yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.  
 (v). Rasio piutang *non performing - gross* dan net pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 0,10% dan 0,00% dan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 0,10% dan 0,05%.

9. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2013					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan, Restoran dan Hotel	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	203.905.722.441	-	-	-	-	203.905.722.441
Jasa-jasa Sosial / Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	203.905.722.441	-	-	-	-	203.905.722.441
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(2.039.057.224)	-	-	-	-	(2.039.057.224)
<b>Jumlah</b>	<b>201.866.665.217</b>	-	-	-	-	<b>201.866.665.217</b>

	31 Desember 2012					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan, Restoran dan Hotel	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	126.023.572.198	-	-	-	-	126.023.572.198
Jasa-jasa Sosial / Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	126.023.572.198	-	-	-	-	126.023.572.198
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(1.260.235.722)	-	-	-	-	(1.260.235.722)
<b>Jumlah</b>	<b>124.763.336.476</b>	-	-	-	-	<b>124.763.336.476</b>

9. Pembiayaan *Mudharabah* - lanjutan

b. Berdasarkan Jenis

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Pihak Berelasi	-	3.781.149.064
Pihak Ketiga	203.905.722.441	122.242.423.134
Jumlah	203.905.722.441	126.023.572.198
Penyisihan Kerugian	(2.039.057.224)	(1.260.235.722)
<b>Jumlah</b>	<b>201.866.665.217</b>	<b>124.763.336.476</b>

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	-	-
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	14.619.908.037	-
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	185.773.814.404	126.023.572.198
Lebih dari 5 Tahun	3.512.000.000	-
Jumlah	203.905.722.441	126.023.572.198
Penyisihan Kerugian	(2.039.057.224)	(1.260.235.722)
<b>Jumlah</b>	<b>201.866.665.217</b>	<b>124.763.336.476</b>

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	-	-
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	49.658.371.470	-
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	150.735.350.971	126.023.572.198
Lebih dari 5 Tahun	3.512.000.000	-
Jumlah	203.905.722.441	126.023.572.198
Penyisihan Kerugian	(2.039.057.224)	(1.260.235.722)
<b>Jumlah</b>	<b>201.866.665.217</b>	<b>124.763.336.476</b>

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Mudharabah*

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	1.260.235.722	130.405.836
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.403.646.566	1.320.774.614
Reklasifikasi Kredit	(624.825.064)	(190.944.728)
Jumlah	2.039.057.224	1.260.235.722

9. Pembiayaan *Mudharabah* - lanjutan

f. Informasi Penting Lainnya

- (i). Persentase imbal hasil pembiayaan *mudharabah* per tahun berkisar antara 9,50% sampai dengan 12,00% untuk tahun 2013 dan 10,50% sampai dengan 12,00% untuk tahun 2012.
- (ii). Rasio non performing - gross dan net pembiayaan *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 0,00% dan per tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 0,00%.

10. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2013					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	31.250.000.000	-	-	-	-	31.250.000.000
Industri Pengolahan	171.595.000.000	-	-	-	-	171.595.000.000
Konstruksi	50.035.642.909	-	-	-	-	50.035.642.909
Perdagangan, Restoran dan Hotel	43.596.554.035	-	-	-	-	43.596.554.035
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	10.116.840.876	-	-	-	-	10.116.840.876
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	230.441.830.189	-	-	-	-	230.441.830.189
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>537.035.868.009</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537.035.868.009</b>
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(4.493.608.680)	-	-	-	-	(4.493.608.680)
<b>Jumlah</b>	<b>532.542.259.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.542.259.329</b>

	31 Desember 2012					Jumlah Rp
	Lancar Rp	DPK Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	36.250.000.000	-	-	-	-	36.250.000.000
Industri Pengolahan	132.600.000.000	-	-	-	-	132.600.000.000
Konstruksi	19.437.002.800	-	-	-	-	19.437.002.800
Perdagangan, Restoran dan Hotel	10.096.666.670	-	-	-	-	10.096.666.670
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8.459.967.688	-	-	-	-	8.459.967.688
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa	134.985.478.080	-	-	-	-	134.985.478.080
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>341.829.115.238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341.829.115.238</b>
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	(2.211.741.152)	-	-	-	-	(2.211.741.152)
<b>Jumlah</b>	<b>339.617.374.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339.617.374.086</b>

10. Pembiayaan *Musyarakah* - lanjutan

b. Berdasarkan Jenis

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Pihak Berelasi	-	1.085.471.900
Pihak Ketiga	537.035.868.009	340.743.643.338
<b>Jumlah</b>	<b>537.035.868.009</b>	<b>341.829.115.238</b>
Penyisihan Kerugian	(4.493.608.680)	(2.211.741.152)
<b>Jumlah</b>	<b>532.542.259.329</b>	<b>339.617.374.086</b>

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	288.775.793.549	184.379.060.782
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	21.727.130.391	32.739.322.677
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	223.087.944.069	124.710.731.779
Lebih dari 5 Tahun	3.445.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>537.035.868.009</b>	<b>341.829.115.238</b>
Penyisihan Kerugian	(4.493.608.680)	(2.211.741.152)
<b>Jumlah</b>	<b>532.542.259.329</b>	<b>339.617.374.086</b>

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo:		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	295.626.337.560	214.879.060.782
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	55.481.556.949	12.306.762.974
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	182.482.973.500	114.643.291.482
Lebih dari 5 Tahun	3.445.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>537.035.868.009</b>	<b>341.829.115.238</b>
Penyisihan Kerugian	(4.493.608.680)	(2.211.741.152)
<b>Jumlah</b>	<b>532.542.259.329</b>	<b>339.617.374.086</b>

e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	2.211.741.152	981.527.275
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	4.565.822.080	1.940.170.664
Reklasifikasi dari Kredit	(2.283.954.552)	(709.956.787)
<b>Jumlah</b>	<b>4.493.608.680</b>	<b>2.211.741.152</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

10. Pembiayaan *Musyarakah* - lanjutan

e. Informasi Penting Lainnya:

- (i). Persentase bagi hasil pembiayaan *musyarakah* Rupiah berkisar antara 8,25% hingga 13,00% untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2012 adalah sebesar 10,25% hingga 12,00% per tahun.
- (ii). Rasio *non performing - gross* dan pembiayaan-*nett musyarakah* pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 0,00% dan 0,00% dan untuk tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 0,00% dan 0,00%.

11. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Tanah dan Bangunan	74.024.674.249	89.940.417.391
Kendaraan Bermotor	32.976.580.968	62.370.419.677
Mesin	4.818.195.301	9.838.797.893
Jumlah	111.819.450.518	162.149.634.961
Akumulasi Penyusutan	(38.043.331.706)	(62.254.060.654)
Nilai Bersih	73.776.118.812	99.895.574.307

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/9/PBI/2007 pasal 39 ayat 3 dan 4, pembentukan penyisihan kerugian aset tidak berlaku untuk aset produktif dengan transaksi sewa berupa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

12. Aset Tetap

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp 1.809.704.913 dan Rp 1.369.757.866 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012.

Aset tetap kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, pesawat udara, dan huru hara serta bencana alam pada PT Asuransi Central Asia dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 24.005.000.000 dan Rp 18.356.000.000, Manajemen berpendapat bahwa jumlah tanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

12. Aset Tetap

	31 Desember 2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan:</b>				
Pemilikan Langsung				
Tanah	3.393.843.164	7.795.218.404	-	11.189.061.568
Bangunan	4.742.539.766	3.789.674.296	-	8.532.214.062
Inventaris I	2.641.924.171	312.144.436	2.915.845.454	38.223.153
Inventaris II	8.586.471.185	389.066.650	649.555.960	8.325.981.875
Kendaraan Bermotor	59.350.000	-	48.850.000	10.500.000
	19.424.128.286	12.286.103.786	3.614.251.414	28.095.980.658
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	1.469.700.000	1.329.000.000	1.469.700.000	1.329.000.000
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Bangunan	4.056.322.820	145.136.843	-	4.201.459.663
Inventaris I	2.499.096.950	3.208.347	-	2.502.305.297
Inventaris II	6.367.540.180	1.041.467.637	3.551.929.182	3.857.078.635
Kendaraan Bermotor	59.350.000	-	48.850.000	10.500.000
	12.982.309.950	1.189.812.827	3.600.779.182	10.571.343.595
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	1.145.141.250	619.892.086	1.469.700.000	295.333.336
<b>Nilai Buku</b>	<b>6.766.377.086</b>			<b>18.558.303.727</b>

12. Aset Tetap - lanjutan

	31 Desember 2012			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
<b>Harga Perolehan:</b>				
Pemilikan Langsung				
Tanah	4.807.625.000	779.218.164	2.193.000.000	3.393.843.164
Bangunan	4.841.347.563	315.692.203	414.500.000	4.742.539.766
Inventaris I	1.944.660.413	984.329.606	287.065.848	2.641.924.171
Inventaris II	8.223.398.455	363.072.730	-	8.586.471.185
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	27.113.636	59.350.000
	<u>19.903.495.067</u>	<u>2.442.312.703</u>	<u>2.921.679.484</u>	<u>19.424.128.286</u>
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	1.469.700.000	-	-	1.469.700.000
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Bangunan	4.039.087.011	119.133.785	101.897.976	4.056.322.820
Inventaris I	1.712.626.232	834.209.118	47.738.400	2.499.096.950
Inventaris II	6.367.540.180	-	-	6.367.540.180
Kendaraan Bermotor	86.463.636	-	27.113.636	59.350.000
	<u>12.205.717.059</u>	<u>953.342.903</u>	<u>176.750.012</u>	<u>12.982.309.950</u>
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan Bermotor	728.726.250	416.415.000	-	1.145.141.250
<b>Nilai Buku</b>	<u>8.438.751.758</u>			<u>6.766.377.086</u>

13. Aset Lain-lain

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	5.909.755.523	6.928.233.017
Biaya Dibayar Dimuka	3.842.824.967	2.915.159.728
Persediaan Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor	649.969.806	796.888.745
Lain-lain	727.287.773	476.120.846
<b>Jumlah</b>	<u>11.129.838.069</u>	<u>11.116.402.336</u>

14. Kewajiban Segera

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Uang Muka Atas Penjualan Aset Tetap	4.233.570	4.723.570
Kliring Retail	137.917.100	414.095.816
Titipan Setoran	1.416.894.677	602.580.164
Kewajiban Bagi hasil Deposito Berjangka	177.715.489	16.429.341
Lain-lain	4.086.911.176	123.240.756
<b>Jumlah</b>	<u>5.823.672.012</u>	<u>1.161.069.647</u>

15. Simpanan Nasabah

a. Berdasarkan jenis dan simpanan nasabah terdiri dari :

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
<b>Giro Wadiah</b>		
Dari Bukan bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	144.379.895.549	143.226.994.287
Dari Bank		
Pihak Berelasi		
PT Bank Central Asia Tbk	100.219.494	2.074.924.456
Pihak Ketiga	209.027.562	70.305.801
Sub Jumlah Giro Wadiah	<u>144.689.142.605</u>	<u>145.372.224.544</u>
<b>Tabungan Wadiah</b>		
Dari bukan bank		
Pihak Berelasi	1.782.662.111	164.497.382
Pihak Ketiga	103.984.064.442	89.420.990.275
Sub Jumlah Tabungan Wadiah	<u>105.766.726.553</u>	<u>89.585.487.657</u>
<b>Jumlah</b>	<u>250.455.869.158</u>	<u>234.957.712.201</u>

**15. Simpanan Nasabah - lanjutan**

**b. Tingkat bonus simpanan wadiah dan nisbah rata-rata per tahun:**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	(%)	(%)
Giro Wadiah	0,80	0,67
Tabungan Wadiah	1,69	1,63

**c. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum**

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Capitalize "Bank" yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 diubah menjadi maksimum Rp 2.000.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**16. Perpajakan**

**a. Hutang Pajak**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
PPh Pasal 29	648.554.250	1.192.894.500
PPh Pasal 25	384.290.000	187.086.000
PPh Pasal 21	388.367.942	225.096.288
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	1.790.606.661	956.604.924
PPh Pasal 23	9.547.316	6.500.595
Pajak Pertambahan Nilai	27.001.990	19.007.599
Jumlah	3.248.368.159	2.587.189.906

**16. Perpajakan - lanjutan**

**b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Kini	(3.818.822.250)	(2.821.957.500)
Tangguhan	(241.055.931)	221.105.014
Jumlah	(4.059.878.181)	(2.600.852.486)

**c. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran laba fiskal Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan sesuai dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif	16.760.901.061	10.960.778.016
<b>Beda waktu :</b>		
Cadangan Pesangon/Realisasi Pembayaran		
Imbalan Pasca Kerja	(2.172.459.083)	141.439.176
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	(309.504.106)	(142.476.408)
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	-	(8.850.000)
Cadangan Biaya Mobile Banking dan Jaringan Prima	4.765.853	(86.999.978)
Cadangan IT	(242.095.000)	400.000.000
Cadangan Notaris Pengikatan/Legal	-	826.630
Cadangan Jasa Profesional	64.665.000	(44.195.796)
Cadangan Biaya Bonus, Jasa Produksi, THR	(3.048.078.709)	1.050.015.915
Cadangan Seragam	(18.551.905)	(130.097.749)
Cadangan Telepon dan Listrik	28.427.761	(38.627.761)
Cadangan Renovasi	(22.675.717)	119.685.613
Cadangan Promosi	(411.457.142)	563.543.558
Cadangan Surat Berharga	261.396.406	370.470.328
Beban (Pemulihan) Penyisihan Penghapusan Aset	3.278.003.534	(1.853.732.221)
Penyusutan Aset Tetap	186.018.207	(52.447.355)
Jumlah Beda Temporer	(2.401.544.901)	288.553.952

16. Perpajakan - lanjutan

c. Pajak Penghasilan Badan - lanjutan

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Beda Tetap :	Rp	Rp
Rugi Penghapusan Aset Tetap	(9.961.925)	(293.604.167)
Penyusutan Sewa Guna Usaha	324.558.750	-
Makan Minum	156.082.084	83.154.718
Pajak Lainnya	-	169.733.863
Promosi	310.384.368	-
<i>Entertainment</i>	134.870.102	79.214.290
Jumlah Beda Tetap	915.933.379	38.498.704
Laba Kena Pajak	15.275.289.000	11.287.830.000
<b>Taksiran Pajak Penghasilan badan:</b>		
Tarif pajak 25% X Laba Kena Pajak	3.818.822.250	2.821.957.500
Jumlah	3.818.822.250	2.821.957.500
<b>Pajak Penghasilan yang Dibayar Dimuka</b>		
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.170.268.000	1.629.063.000
<b>Pajak Penghasilan Kurang / (Lebih) Bayar</b>	<b>648.554.250</b>	<b>1.192.894.500</b>

16. Perpajakan - lanjutan

d. Aset Pajak Tangguhan

	31 Desember 2011	Dibebankan Ke Laba Rugi	31 Desember 2012	Dibebankan Ke Laba Rugi	31 Desember 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan					
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	587.237.417	463.433.055	1.050.670.472	123.387.421	1.174.057.893
Cadangan Pesangon	1.378.956.997	(35.359.794)	1.343.597.203	(472.395.182)	871.202.021
Penyusutan Aset Tetap	7.780.547	13.111.839	20.892.386	25.612.165	46.504.551
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	112.995.129	35.619.102	148.614.231	(148.614.231)	-
Cadangan Biaya Legal Action	52.183.275	2.212.500	54.395.775	(4.425.000)	49.970.775
Cadangan Premium Surat Berharga	80.386.735	-	80.386.735	157.966.683	238.353.418
Cadangan Biaya Bonus, Jasa Produksi & THR	637.496.021	(262.503.979)	374.992.042	(237.011.720)	137.980.322
Cadangan Biaya IT, Mobile Banking	-	-	-	43.917.718	43.917.718
Cadangan Notaris Pengikatan Legal	-	(206.658)	(206.658)	206.658	-
Cadangan Seragam	-	-	-	9.437.711	9.437.711
Cadangan Renovasi	-	-	-	24.252.474	24.252.474
Cadangan Promosi	-	-	-	76.144.604	76.144.604
Cadangan Jasa Profesional	6.250.000	4.798.949	11.048.949	318.352	11.367.301
Efek Perubahan Tarif:	-	-	-	-	-
Cadangan Pesangon	(119.382.316)	-	(119.382.316)	119.382.316	-
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	(40.764.099)	-	(40.764.099)	40.764.099	-
	2.703.139.706	221.105.014	2.924.244.720	(241.055.932)	2.683.188.788
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Surat Berharga	(1.492.052.107)	5.119.518.668	3.627.466.561	1.186.646.300	4.814.112.861
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>1.211.087.599</b>	<b>5.340.623.682</b>	<b>6.551.711.281</b>	<b>945.590.368</b>	<b>7.497.301.649</b>

**17. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha Bank, dibentuk sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
	Kolektibilitas	Saldo	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Digunakan Kafalah	-	-	-
			-
	31 Desember 2012		
	Kolektibilitas	Saldo	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Digunakan Kafalah	-	-	-
	Lancar	-	-
			-

Perubahan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	-	692.496
(Pemulihan) Penyisihan Selama Tahun Berjalan	-	(692.496)
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	-	-
Jumlah	-	-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya transaksi komitmen dan kontinjensi serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

**18. Kewajiban Lain-lain**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	3.484.808.082	5.657.267.165
Biaya yang Masih Harus Dibayar	2.443.788.185	6.368.254.849
Pendapatan Diterima Dimuka	4.286.737.486	2.451.401.666
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	2.875.069.484	1.784.533.102
Setoran Jaminan <i>Safe Deposit Box</i>	267.694.400	273.194.400
Titipan Dana Sosial - Dana Kebajikan	1.038.231.729	736.785.444
Titipan Dana Sosial - Zakat	42.097.012	26.470.596
Lainnya	-	685.894.665
Jumlah	14.438.426.378	17.983.801.887

**19. Dana *Syirkah* Temporer**

**a. Berdasarkan jenisnya**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<u>Investasi Tidak Terikat</u>		
Dari bukan bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak Berelasi	1.760.397.160	1.882.487.790
Pihak Ketiga	42.019.176.843	41.581.793.033
Sub Jumlah	43.779.574.003	43.464.280.823
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	42.745.042.670	7.222.328.080
Pihak Ketiga	1.366.377.286.652	978.324.645.813
Sub Jumlah	1.409.122.329.322	985.546.973.893
Dari bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	-	12.000.000.000
Sub Jumlah	-	12.000.000.000
Jumlah Investasi Tidak Terikat	1.452.901.903.325	1.041.011.254.716
<u>Investasi Terikat</u>		
Dari bukan bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	-	-
Sub Jumlah	-	-
Jumlah Investasi Terikat	-	-
	1.452.901.903.325	1.041.011.254.716

**19. Dana Syirkah Temporer**

**a. Berdasarkan jenisnya, Dana Syirkah Temporer - lanjutan**

Tabungan investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

**b. Dana Syirkah Temporer yang diblokir dan/atau dijadikan jaminan**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Investasi Tidak Terikat - Deposito Mudharabah	154.838.750.000	139.274.129.822
Investasi Terikat - Deposito Mudharabah	-	-
Jumlah	154.838.750.000	139.274.129.822

**c. Investasi Tidak Terikat - Deposito Mudharabah Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Jangka Waktu</i>		
Sampai dengan 1 Bulan	1.160.177.607.869	815.861.745.102
Jangka Waktu 3 Bulan	209.090.624.040	161.641.688.719
Jangka Waktu 6 Bulan	36.538.112.303	14.478.540.072
Jangka Waktu 12 Bulan	3.315.985.110	5.565.000.000
Jumlah	1.409.122.329.322	997.546.973.893

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<i>Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo</i>		
Kurang dari atau Sama Dengan 1 Bulan	1.252.939.742.107	806.516.183.190
Lebih dari 1 Sampai Dengan 3 Bulan	126.485.024.471	166.920.262.714
Lebih dari 3 Sampai Dengan 6 Bulan	27.921.256.570	8.290.527.989
Lebih dari 6 Sampai Dengan 12 Bulan	1.776.306.174	15.820.000.000
Jumlah	1.409.122.329.322	997.546.973.893

**19. Dana Syirkah Temporer**

**d. Nisbah dan Pendanaan Tingkat Bagi Hasil Per Tahun :**

	31 Desember 2013	
	Nasabah (%)	Bank (%)
Tabungan Mudharabah	18	82
Deposito Mudharabah	38	62

	31 Desember 2012	
	Nasabah (%)	Bank (%)
Tabungan Mudharabah	18	82
Deposito Mudharabah	38	62

**20. Modal Saham**

	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	296.299	99,9997%	296.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0003%	1.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>296.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>296.300.000.000</b>

Berdasarkan akta pendirian Bank No. 91 tanggal 21 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., telah ditetapkan modal dasar Bank sebesar Rp 30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000 saham.

Melalui akta perubahan No. 2 tanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., telah dilakukan perubahan modal dasar Bank menjadi Rp 150.000.000.000 yang terbagi atas 150.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. 02-8.694.HT.01.04.TH.97 tanggal 28 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%/. Selanjutnya melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., menyetujui penjualan satu saham kepada Tuan Franki Tjahyadikarta. Selebar saham tersebut kemudian dijual kembali kepada PT BCA Finance yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 16 Desember 2009. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada BI melalui surat No. 223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, berdasarkan surat no. 12/22/DPB3/TPB-3-6/RAHASIA, tanggal 11 Maret 2010.

Melalui Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank UIB No. 21 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 10 Agustus 2009 telah dilakukan perubahan modal dasar Bank menjadi Rp 950.000.000.000 yang terbagi atas 950.000 saham. Schubungan dengan perubahan modal dasar tersebut PT Bank BCA Tbk telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 200.000.000.000 atau setara dengan 200.000 saham pada tanggal 11 Agustus 2009.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat No. 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yang mewajibkan Bank menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp 0 (nol rupiah). Mempertimbangkan hal ini, pemegang saham perseroan memutuskan untuk menyetujui penggunaan seluruh laba ditahan Bank tanggal 2 April 2010 sebesar Rp 53.837.790.810 dialokasikan ke cadangan umum sebesar Rp 37.790.810 dan dialokasikan ke penempatan saham baru sebanyak 53.800 saham dengan jumlah sebesar Rp 53.800.000.000 oleh PT Bank Central Asia, Tbk. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01.10-30741 tanggal 1 Desember 2010. Akta tersebut juga sudah dilaporkan kepada Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No.294/DIR/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan surat No. 105/SKHS/2010 tanggal 9 Desember 2010, surat ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat no. 12/2564/DPBs tanggal 17 Desember 2010.

**21. Cadangan Umum**

Melalui Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Bank UIB No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., tanggal 20 April 2009, telah diputuskan untuk membentuk penyisihan cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan Perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat No. 73 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, SH., Cadangan Umum yang dibentuk sebesar Rp 137.790.810. Berdasarkan memo intern No. 045/MO/KEU/11 tanggal 31 Mei 2011, Bank telah menetapkan bahwa cadangan yang dibentuk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 bertambah sebesar Rp 112.290.190, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 250.000.000.

Pada tahun 2012, sesuai Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 122 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn., tanggal 27 April 2012, Cadangan Umum yang dibentuk sebesar Rp 200.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 250.000.000 menjadi berjumlah Rp 450.000.000.

Sesuai Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 10 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn., tanggal 2 Mei 2013, Cadangan Umum yang dibentuk sebesar Rp 300.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 450.000.000 menjadi berjumlah Rp 750.000.000.

**22. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib**

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Pendapatan dari Jual Beli :		
Pendapatan dari Marjin <i>Murabahah</i>	54.141.514.888	41.809.282.107
Jumlah	54.141.514.888	41.809.282.107
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan <i>Ijarah</i>	38.409.810.628	54.135.740.995
Beban Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>	(30.640.525.307)	(39.931.162.559)
Jumlah	7.769.285.321	14.204.578.436
Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	16.080.323.315	8.970.110.038
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	47.934.431.412	22.734.805.867
Jumlah	64.014.754.727	31.704.915.905
Pendapatan Usaha Utama Lainnya		
Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	15.356.095.943	20.221.577.505
Pendapatan Bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	9.007.295.833	7.976.104.861
Pendapatan Bagi Hasil dari Penempatan di Bank lain	4.789.650.641	1.069.511.284
Pendapatan Bagi Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah		
Antar Bank	8.458.333	-
Jumlah	29.161.500.750	29.267.193.650
<b>Jumlah</b>	<b>155.087.055.686</b>	<b>116.985.970.098</b>

Jumlah pendapatan yang diperoleh dari pihak berelasi pada 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.267.111 dan Rp 67.178.324.

**23. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<u>Dari Investasi Tidak Terikat</u>		
Bukan bank		
Pihak Berelasi	1.092.118	35.574.374
Pihak Ketiga	928.973.933	951.136.462
Sub Jumlah	<u>930.066.051</u>	<u>986.710.836</u>
Pihak Berelasi	375.102.861	75.879.421
Pihak Ketiga	72.991.582.863	48.867.134.179
Sub Jumlah	<u>73.366.685.724</u>	<u>48.943.013.600</u>
Bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	175.156.014	433.538.664
Sub Jumlah	<u>175.156.014</u>	<u>433.538.664</u>
	<u>74.471.907.789</u>	<u>50.363.263.100</u>
<u>Dari Investasi Terikat</u>		
Bukan bank		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>74.471.907.789</u></b>	<b><u>50.363.263.100</u></b>

**24. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Pendapatan Komisi		
Pendapatan Komisi <i>Real Time Gross Settlement</i>	481.186.363	3.804.320.454
Pendapatan Komisi Safe Deposit Box	181.800.000	181.250.000
Pendapatan Komisi Asuransi	238.380.810	151.560.956
Pendapatan Komisi Pengiriman Uang	112.482.500	107.076.500
Pendapatan Komisi Bank Garansi	3.621.989	10.288.966
Pendapatan Komisi Kliring	18.688.000	18.224.525
Pendapatan Komisi Lainnya	104.861.754	76.609.684
Jumlah	<u>1.141.021.416</u>	<u>4.349.331.085</u>
Pemulihan Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non Produktif		
Kredit yang Diberikan	1.750.000.000	2.430.757.980
Piutang dan Pembiayaan	6.131.954.112	1.925.605.600
Penempatan pada Bank Lain	577.967.814	96.640.702
Rekening Administratif	-	692.496
Surat Berharga	665.316.261	2.526.462.543
Jumlah	<u>9.125.238.187</u>	<u>6.980.159.321</u>
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Administrasi Bank	3.878.373.993	2.918.305.976
Laba Penjualan Surat-Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	-	-
Laba Penjualan Cek	31.617.800	33.980.025
Pendapatan <i>Ta'widh</i>	30.500.156	1.994.011
Lain-lain	1.004.981.635	179.885.965
Jumlah	<u>4.945.473.584</u>	<u>3.134.165.977</u>
	<b><u>15.211.733.187</u></b>	<b><u>14.463.656.383</u></b>

Pendapatan dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 481.186.363 dan Rp 3.804.320.454 atas pendapatan *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

**25. Beban Tenaga Kerja**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Gaji dan Uang Lembur	31.012.749.930	26.665.972.638
Tunjangan Karyawan	6.240.180.400	9.210.516.830
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 30)	1.969.425.910	1.250.947.263
Pendidikan Karyawan	937.378.214	1.046.841.376
Premi Program Dana Pesangon	-	600.000.000
Uang Makan dan Transport	36.111.500	87.110.500
Perjalanan Dinas	-	-
Lain-lain	487.130.860	177.406.422
<b>Jumlah</b>	<b>40.682.976.814</b>	<b>39.038.795.029</b>

**26. Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Murabahah	7.937.243.513	1.923.483.032
Musyarakah	4.565.822.080	1.940.170.666
Giro pada Bank Lain	1.594.133.684	561.640.722
Mudharabah	1.403.646.567	1.320.774.614
Qardh	37.005.209	462.833
Surat Berharga	8.593.364	2.508.978.456
Ijarah	4.697.606	242.763.189
<b>Jumlah</b>	<b>15.551.142.023</b>	<b>8.498.273.512</b>

**27. Beban Umum dan Administrasi**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Barang dan Jasa	11.225.261.267	11.311.961.326
Biaya Sewa Gedung dan Kendaraan	1.925.495.913	1.910.406.218
Penyusutan	1.812.473.259	1.369.787.903
Pemeliharaan dan Perbaikan	1.672.788.687	1.634.514.110
Promosi	649.262.293	1.203.261.557
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya	106.312.205	663.620.387
Biaya Premi Asuransi	43.243.524	47.983.835
Kerugian Penurunan Surat Berharga	71.109.832	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.505.946.980</b>	<b>18.141.535.336</b>

**28. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Pendapatan Non Usaha		
Laba Penjualan Aset	170.296.892	24.843.081
Lain-lain	239.877.554	14.276.506
	410.174.446	39.119.587
Beban Non Usaha		
Kerugian Penjualan Aset	2.863.633	45.602.023
Kerugian Penjualan Surat Berharga	-	-
Lain-lain	207.814.388	77.005.550
	210.678.021	122.607.573
<b>Jumlah</b>	<b>199.496.425</b>	<b>(83.487.986)</b>

**29. Komitmen dan Kontijensi**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Digunakan	-	-
Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
a. Pembiayaan Mudharabah	60.073.613.046	8.576.421.827
b. Pembiayaan Musyarakah	151.845.548.914	107.071.852.140
Jumlah Komitmen	211.919.161.960	115.648.273.967
Kontijensi		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan yang akan diterima dari Pembiayaan (Non Lancar)	8.742.386.049	3.581.207.972
Lainnya	-	708.430.458
Kewajiban Kontinjensi		
Bank Garansi yang Diberikan kepada Nasabah	-	81.355.560
Jumlah Kontijensi	8.742.386.049	4.208.282.870
<b>Jumlah Komitmen dan Kontijensi</b>	<b>203.176.775.911</b>	<b>111.439.991.097</b>

**30. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja**

Bank telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Perubahan penyisihan imbalan kerja yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal	5.657.267.165	5.515.827.989
Penyisihan Pesangon Selama Tahun Berjalan	1.969.425.910	1.850.947.263
Pengembalian Pembayaran Pesangon Selama Tahun Berjalan	-	-
Iuran yang dibayarkan ke Aset Program	(3.200.000.000)	(600.000.000)
Pembayaran Selama Tahun Berjalan	(941.884.993)	(1.109.508.087)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.484.808.082</b>	<b>5.657.267.165</b>

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dihitung oleh Aktuaris Independen PT Sakura Aktualita Indonesia berdasarkan laporan No.3491/SAI/DS/I/14 dan No.3203/SAI/DS/XI/12. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Tingkat Diskonto	9,00%	8,00%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%
Tingkat Mortalita	100,00%	100,00%
	dari tabel CSO 80	dari tabel CSO 80
Tingkat Cacat	9% dari tingkat asumsi mortalita	9% dari tingkat asumsi mortalita
Usia Pensiun	55 tahun	55 tahun

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Beban Jasa Kini	1.221.964.720	1.190.744.342
Beban Bunga	703.527.370	595.282.951
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	11.978.112	32.964.262
Biaya Jasa Lalu	31.955.708	31.955.708
Tambahan Beban atas Kekurangan Kewajiban Awal	-	-
<b>Jumlah Beban Imbalan Kerja</b>	<b>1.969.425.910</b>	<b>1.850.947.263</b>

**30. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja - lanjutan**

Perubahan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2013 Rp	31 Desember 2012 Rp
Saldo Awal Tahun	5.657.267.165	5.515.827.989
Koreksi Saldo Awal	-	-
Imbalan yang Dibayarkan	(941.884.993)	(1.109.508.087)
Iuran Bersih yang Dibayarkan ke Aktiva Program	(3.200.000.000)	(600.000.000)
Beban Tahun Berjalan	1.969.425.910	1.850.947.263
<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.484.808.082</b>	<b>5.657.267.165</b>

**31. Manajemen Risiko**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 serta PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun pedoman yang telah dituangkan ke dalam suatu Kebijakan Dasar Manajemen Resiko (KDMR) BCA Syariah pada saat akan beroperasinya di bulan April 2009 dengan tujuan :

- Menyamakan persepsi dalam memandang resiko, sehingga resiko yang dihadapi Bank BCA Syariah bisa diidentifikasi, diukur, diperbandingkan dan dikelola secara benar.
- Menekankan kewajiban pengelolaan resiko oleh setiap unit kerja.
- Meyakinkan bahwa semua resiko yang signifikan dapat dikendalikan dengan baik.

Penerapan manajemen risiko BCA Syariah secara terpadu dengan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Resiko ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan stakeholder value sesuai dengan risk appetite dan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Gagi Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia.

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko tersebut berupa:

- pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- pengendalian internal.

Bank BCA Syariah melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis resiko yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi, resiko strategik, resiko hukum, dan resiko kepatuhan. Hal tersebut lebih karena BCA Syariah sebagai anak perusahaan dari PT Bank BCA Tbk, juga mempunyai kewajiban untuk mengirimkan data kepada induk perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaannya.

Struktur organisasi Bank BCA Syariah telah mencerminkan pengelolaan manajemen risiko yang terpusat dan independen, yaitu dengan dibentuknya Komite Manajemen Risiko (KMR) yang bertanggung jawab kepada Direksi dan Departemen Manajemen Risiko (MRK) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

### 31. Manajemen Risiko - lanjutan

Wewenang dari Komite Manajemen Risiko adalah mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi dan misi dari Komite Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.

Adapun fungsi dari Komite Manajemen Risiko ini adalah:

- Menyusun kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Bank juga telah memiliki serangkaian prosedur dan metodologi untuk melakukan identifikasi dan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank, namun dengan berjalannya waktu Bank perlu melakukan penyempurnaan atau review terhadap prosedur dan metodologi yang telah disusun, agar prosedur dan metodologi tersebut dapat mencerminkan kondisi pengelolaan risiko Bank yang sebenarnya.

#### Risiko Kredit

Terkait dengan pengelolaan risiko kredit, bank telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai pembiayaan, antara lain yaitu:

- Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB)
- Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
- Manual Pembiayaan Konsumtif
- Manual Pembiayaan Produktif
- Kebijakan Penilaian Kualitas Penyisihan Penghapusan Aktiva
- Kebijakan Penyelamatan dan Penghapusan Pembiayaan
- Wewenang Memutus Pembiayaan

Dengan telah dimilikinya kebijakan Bank tersebut diatas, maka diharapkan Bank dapat mengoptimalkan kualitas pengelolaan resiko kredit melalui proses yang memadai, kecukupan agunan yang telah ditetapkan dan penetapan risk appetite Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

#### Risiko Pasar

BCA Syariah saat ini belum menjadi Bank Devisa, sehingga Bank belum secara langsung terkena dampak risiko pasar, namun Bank tidak terlepas dari risiko suku bunga walaupun dalam prakteknya BCA Syariah baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran pembiayaan tidak menggunakan suku bunga tapi nasabah yang dijangkau BCA Syariah bukan hanya nasabah yang loyalis kepada Bank Syariah melainkan nasabah yang berorientasi kepada suku bunga, sehingga apabila BCA Syariah dalam pemberian tingkat pembagian imbal hasilnya tidak kompetitif dengan rata-rata suku bunga yang berlaku dipasar, maka kemungkinannya nasabah-nasabah tersebut akan keluar dari BCA Syariah.

### 31. Manajemen Risiko - lanjutan

#### Risiko Likuiditas

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko likuiditas, yaitu:

- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- Metodologi Dalam Manajemen Risiko Likuiditas
- Kebijakan Tresuri

Tujuan dari manajemen likuiditas adalah memelihara posisi aset likuid secara optimal dan Bank dapat memenuhi seluruh kewajiban kontraktual dan ketentuan kewajiban keuangan, termasuk saat kondisi Bank sedang kritis. Untuk memenuhi kewajiban Bank kepada para nasabah dan *counterparties* seerta menyediakan kebutuhan likuiditas untuk transaksi operasionalnya, maka Bank saat ini sedang melakukan pemeliharaan dalam posisi *secondary reserves* pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah.

#### Risiko Operasional

Untuk pengelolaan risiko operasionalnya Bank telah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Sentra Operasi
- Ketentuan Limit Fiat Bayar, *Override* dan Otorisasi Transaksi di Aplikasi Pembiayaan.
- Manual Produk Dana
- Manual Kerja CSO
- Manual Kerja Teller
- Dan manual kerja lainnya

Mekanisme kontrol dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi yang semuanya tercantum dalam manual kerja Bank. Bank juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) untuk melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kepatuhan karyawannya atas prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Pembatasan akses sistem juga telah diterapkan secara berjenjang melalui mekanisme pembatasan limit dengan menggunakan *user id* dan *password* serta penerapan *restricted area* pada ruang pemrosesan data transaksi baik dikantor cabang maupun pusat.

Dalam rangka untuk meningkatkan *Risk Awareness* ke seluruh jenjang organisasi Bank khususnya untuk risiko operasional, maka telah dilakukan training internal mengenai pengenalan risiko operasional dan diharapkan setelah mengikuti training tersebut pemahaman akan risiko operasional akan lebih meningkat lagi.

#### Risiko Kepatuhan

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan, yaitu:

- Kebijakan Kepatuhan
- Pedoman Penerapan Program APU dan PPT
- Manual *Good Corporate Governance*

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, maka Bank telah melakukan beberapa sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai:

- Penerapan Program APU dan PPT
- Pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)
- Pengkinian data nasabah
- Kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal
- Database teroris yang diterima dari PBB setiap 6 (enam) bulan sekali

**31. Manajemen Risiko - lanjutan**

**Risiko Lainnya**

Risiko lainnya yang dimaksud disini adalah risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi yang harus dikelola oleh Bank dan untuk saat ini ketiga risiko tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Bank, namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketiga risiko tersebut, Bank telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi.

**32. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 7% pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Beban premi penjaminan Pemerintah selama tahun 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 2.587.180.473 dan Rp 1.935.039.975.

**33. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Menurut manajemen, transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada pengurus Bank sebagai suatu fasilitas jabatan.

Sehubungan dengan akuisisi pada tanggal 12 Juni 2009, transaksi antara Bank dengan PT Bank BCA Tbk dan anak perusahaannya diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<b>Aset</b>		
Giro pada Bank Lain		
Pemegang Saham Bank	3.068.188.598	1.482.593.414
Murabahah		
Pejabat Eksekutif	176.562.515	28.580.900
Mudharabah		
Pejabat Eksekutif	-	3.781.149.064
Musyarakah		
Pejabat Eksekutif	-	1.085.471.900
Jumlah Piutang / Pembiayaan yang Diberikan	<u>176.562.515</u>	<u>4.895.201.864</u>

**33. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	Rp	Rp
<b>Kewajiban</b>		
Simpanan		
Giro Wadiah		
Pemegang Saham Bank	100.219.494	2.074.924.456
Pejabat Eksekutif	-	-
Jumlah Giro Wadiah	<u>100.219.494</u>	<u>2.074.924.456</u>
Tabungan Wadiah		
Pejabat Eksekutif	1.782.662.111	164.497.382
Jumlah Tabungan Wadiah	<u>1.782.662.111</u>	<u>164.497.382</u>
Jumlah Simpanan	<u>1.882.881.605</u>	<u>2.239.421.838</u>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>		
Deposito Mudharabah		
Pemegang Saham Bank	-	-
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	42.745.042.670	7.222.328.080
Tabungan Mudharabah		
Pemegang Saham Bank	-	-
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	1.760.397.160	1.882.487.790
Jumlah Dana Syirkah Temporer	<u>44.505.439.830</u>	<u>9.104.815.870</u>
Persentase Terhadap Jumlah Aset		
Piutang / Pembiayaan yang diberikan	0,01%	0,31%
Persentase Terhadap Jumlah Kewajiban		
Giro Wadiah	0,0364%	0,8080%
Tabungan Wadiah	0,6482%	0,0641%
Persentase Terhadap Jumlah Dana Syirkah Temporer		
Deposito Mudharabah	2,94%	0,69%
Tabungan Mudharabah	0,12%	0,18%

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan**  
31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

**34. Rasio Likuiditas**

	2013 ( Dalam Jutaan Rupiah)						
	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh	Sampai dengan 1 Bulan	1 Sampai dengan 3 Bulan	3 Sampai dengan 6 Bulan	6 Bulan dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	7.161	-	7.161	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	81.398	-	81.398	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	252.700	-	252.700	-	-	-	-
Giro pada Bank Lain	3.099	-	3.099	-	-	-	-
Deposito Pada Bank Lain	150.000	-	150.000	-	-	-	-
Efek-efek	107.063	1.000	-	-	-	50.239	55.824
Piutang Murabahah	606.671	-	79	719	2.786	33.632	569.455
Piutang Qardh	235	-	-	3	9	23	200
Pembiayaan Mudharabah	203.906	-	-	-	-	-	203.906
Pembiayaan Musyarakah	537.036	-	26.971	40.231	52.251	176.173	241.410
Ijarah	73.776	-	-	110	300	2.791	70.575
Aktiva Lain-lain	37.196	27.443	5.910	-	-	-	3.843
Sub Jumlah	2.060.241	28.443	527.318	41.063	55.346	262.858	1.145.213
Pendapatan Ditangguhkan	-						
Penyisihan Penghapusan	(18.824)						
Jumlah	<b>2.041.417</b>						
Kewajiban							
Kewajiban Segera	5.824	5824	-	-	-	-	-
Simpanan dari Nasabah							
Giro	144.689	-	144.689	-	-	-	-
Tabungan	105.767	-	105.767	-	-	-	-
Simpanan dari Bank Lain	-						
Pinjaman Diterima	1.034	-	--	-	1.034	-	-
Kewajiban Lain-lain	14.438	-	14.438	-	-	-	-
Dana Syirkah Temporer	-						
Tabungan Mudharabah	43.780	-	43.780	-	-	-	-
Deposito Mudharabah	1.409.122	-	1.252.940	126.485	27.921	1.776	-
Sub Jumlah	1.724.654	5.824	1.561.614	126.485	28.955	1.776	-
Perbedaan Jatuh Tempo	335.587		(1.034.296)	(85.422)	26.391	261.082	1.145.213
Posisi Selisih	316.763						
	<b>2.041.417</b>						

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan**  
31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)

**34. Rasio Likuiditas - lanjutan**

	2012 ( Dalam Jutaan Rupiah)						
	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh	Sampai dengan 1 Bulan	1 Sampai dengan 3 Bulan	3 Sampai dengan 6 Bulan	6 Bulan dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	5.896	-	5.896	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	58.780	-	58.780	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	258.000	-	258.000	-	-	-	-
Giro pada Bank Lain	1.483	-	1.483	-	-	-	-
Deposito Pada Bank Lain	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Efek-efek	206.886	750	-	-	53.210	42.174	110.752
Piutang Murabahah	439.943	-	116	320	1.477	14.060	423.970
Piutang Qardh	46	-	-	2	8	18	18
Pembiayaan Mudharabah	126.024	-	-	-	-	-	126.024
Pembiayaan Musyarakah	341.829	-	5.000	40.695	81.847	87.337	126.950
Ijarah	99.896	-	-	-	4.776	4.344	90.776
Aktiva Lain-lain	24.435	15.519	6.928	-	-	-	1.988
Sub Jumlah	1.613.217	16.269	386.203	41.017	141.318	147.933	880.478
Pendapatan Ditangguhkan	-						
Penyisihan Penghapusan	(11.036)						
Jumlah	<b>1.602.181</b>						
Kewajiban							
Kewajiban Segera	1.161	1.161	-	-	-	-	-
Simpanan dari Nasabah							
Giro	145.372	-	145.372	-	-	-	-
Tabungan	89.585	-	89.585	-	-	-	-
Simpanan dari Bank Lain	-						
Pinjaman Diterima	104	-	-	-	104	-	-
Kewajiban Lain-lain	17.984	-	17.984	-	-	-	-
Dana Syirkah Temporer	-						
Tabungan Mudharabah	43.464	-	43.464	-	-	-	-
Deposito Mudharabah	997.548	-	849.066	132.988	9.929	5.565	-
Sub Jumlah	1.295.218	1.161	1.145.471	132.988	10.033	5.565	-
Perbedaan Jatuh Tempo	317.999		(759.268)	(91.971)	131.284	142.368	880.478
Posisi Selisih	306.963						
	<b>1.602.181</b>						

**PT BANK BCA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan**  
31 Desember 2013 dan 2012  
(*Dalam Rupiah*)

---

**35. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang KPMM bank umum yang menjalankan prinsip syariah. Pada tanggal 27 Pebruari 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.8/7/PBI/2006 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005.

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	( Dalam Jutaan)	( Dalam Jutaan)
	Rp	Rp

---

Modal Inti	306.003	299.142
Modal Pelengkap	15.433	9.447
Jumlah Modal Inti dan Pelengkap	321.436	308.589
Penyertaan	-	-
Jumlah Modal	321.436	308.589

---

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar

	1.438.025	980.624
	22,35%	31,47%

**36. Opini Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No. 001/DPS/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dan No. 001/DPS/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

**37. Kondisi Ekonomi**

Kegiatan usaha Bank mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimasa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, tindakan yang berada di luar kendali Bank.

**38. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 19 Januari 2014.